

Radityo Dharmaputra
Agastya Wardhana

**REVOLUSI INFORMASI
DALAM PERSPEKTIF HI:
*ISU & STRATEGI***



REVOLUSI INFORMASI DALAM PERSPEKTIF HI: ISU DAN STRATEGI

Penulis: Radityo Dharmaputra, Agastya Wardhana

Cetakan Pertama, Desember 2017

Hak Cipta @ Cakra Studi Global Strategis (CSGS)

Desain Sampul: Adisty Yulinda Putri

Tata Letak: Adisty Yulinda Putri

Diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh

Cakra Studi Global Strategis (CSGS)

Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286, Jawa Timur

Telp. (031) 5046453; 61016125; Faks. (031) 5012442

E-mail: global.strategis@gmail.com

Website: <http://www.hi.fisip.unair.ac.id>

iv + 144 hlm

15,5 x 23,5 cm

ISBN:

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Hubungan internasional dan kajian revolusi informasi mulai banyak dipelajari seiring dengan semakin derasnya globalisasi dan semakin tingginya keterikatan terhadap informasi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya aktivitas manusia dalam ruang siber yang merupakan dimensi baru yang hadir seiring dengan globalisasi. Dalam ruang tersebut identitas social ditunjukkan dalam bentuk akun dan interaksi social berubah dari kehidupan sehari-hari dengan tatap muka menjadi interaksi tiap saat berbasis narasi dan diskursus yang terjadi. Perubahan ini tidak hanya berdampak terhadap kehidupan social masyarakat namun juga actor-aktor lain hubungan internasional yang juga turut beraktivitas dalam dimensi siber ini. Oleh karena itu buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mengenai revolusi informasi melalui kajian hubungan internasional.

. Atas selesainya buku ini penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap tim penyusun buku yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Departemen Hubungan Internasional dan tim dari CSGS sehingga penyusunan buku ini dapat dilakukan meski dalam waktu yang terbatas. Terakhir, banyak yang masih ingin ditambahkan dalam naskah buku ini, namun karena keterbatasan waktu hal tersebut masih belum bisa dilakukan. Untuk itu kritik dan sarannya masih diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut.

Surabaya, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	
Revolusi Teknologi Informasi dalam Kajian Hubungan Internasional	1
BAB II	
Keamanan Global di Era Globalisasi Informasi	7
BAB III	
Relasi Perang Informasi dengan Keamanan Manusia dalam Kerangka Konflik Global.....	23
BAB IV	
Civil Society di Era Globalisasi : Analisis Hambatan dan Peluang	45
BAB V	
Kesuksesan ISIS : Manajemen Ekonomi dan Strategi Media Global	63
BAB VI	
Strategi di Era Pos-Modern: Perang Informasi dalam Konflik Negara dengan Kelompok Separatis	83
<i>BAB VII</i>	
Relevansi Strategi Sun Tzu dan Clausewitz di era Perang Virtual.....	103
BAB VIII	
Model Multilateral-Holistik dalam Pengentasan Digital Divide: Implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity	121
Bab IX	
Epilog: Arti Penting Informasi dalam Dunia Era Kontemporer.....	143

BAB I

Pengantar:

Revolusi Teknologi Informasi dalam Kajian Hubungan Internasional

Buku ini berisi kumpulan tulisan tim penulis yang bertujuan untuk memetakan dan memperkenalkan isu-isu terkait revolusi informasi melalui kajian Hubungan Internasional. Tulisan yang ada dalam buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengalaman bagi pembaca untuk lebih jauh mengenal revolusi informasi, utamanya melalui kajian HI. Isu revolusi informasi merupakan bagian kecil dari globalisasi yang telah lama kita rasakan namun jarang sekali kita memberikan pemaknaan atasnya.

Globalisasi melalui revolusi informasi menghadirkan beberapa potensi peluang dan ancaman baru bagi penikmatnya. Situasi ini berupa keberadaan manusia yang semakin lama semakin terikat pada identitasnya sebagai makhluk social yang di era globalisasi berarti bahwa setiap manusia akan memiliki keterkaitan erat identitasnya pada dunia siber. Hal ini dikarenakan pada era globalisasi ruang kehidupan manusia tidak hanya sebatas pada dunia nyata melainkan juga pada media social dan jaringan informasi. Mulai dari keterikatan dengan identitas pada surel, *facebook*, *twitter* dan media social lainnya hingga identitas yang lebih resmi dan representative dalam akun pembayaran online hingga data kependudukan elektronik yang kesemuanya berada dimensi baru *cyberspace*.

Keberadaan dimensi baru tersebut mengakibatkan beberapa isu-isu baru muncul akibat adanya ketidaktahuan dan misinformasi yang terjadi.

Oleh karena itu kajian mengenai isu-isu baru yang mencakup dimensi ini mutlak diperlukan. Kajian tersebut yang menjembatani antara dimensi nyata manusia dengan identitas sibernya seringkali dikenal dengan studi revolusi informasi yang mempelajari perjalanan kehidupan manusia sejalan dengan perjalanan revolusi informasi. Kajian tersebut seringkali berkaitan dengan interaksi manusia dengan sistematisa dan dinamika informasi.

Dalam dimensi siber, identitas dan isu yang dibahas ternyata tidak hanya berkaitan dengan manusia sebagai individu namun juga berkaitan dengan manusia sebagai kumpulan kelompok yang memiliki satu kesatuan dan tujuan dalam entitas negara. Akibatnya, kajian revolusi informasi tidak mutlak menjadi studi yang berkaitan dengan manusia saja namun juga berkaitan dengan kajian negara dan aktor-aktor lain non individu yang terlibat di dalamnya. Dalam kasus ini kajian hubungan internasional memainkan perannya untuk menjelaskan keterlibatan negara, transformasi yang ada di dalamnya serta dinamika konflik antar aktor yang mewarnainya.

Tidak hanya kajian hubungan internasional yang menekankan pada interaksi antar negara dan memahami sebab akibat dalam dimensi siber, diperlukan juga kajian strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalamnya. Hal ini dikarenakan dalam revolusi informasi yang merupakan *frontier* baru umat manusia semakin banyak isu-isu yang tidak kita kenal namun membutuhkan penyelesaian dan jalan keluar atasnya. Oleh karena itu buku ini berusaha memetakan kajian isu-isu yang muncul dalam dimensi tersebut serta memberikan proposisi strategis dalam upaya menyelesaikannya.

Struktur Buku

Bab II membicarakan tentang relasi antara globalisasi dan keamanan, yang telah menjadi tantangan bagi para sarjana HI untuk menganalisisnya secara lengkap. Dengan memfokuskan pada globalisasi informasi, mendasarkan diri pada hasil kajian Manuel Castells dan Frank Webster, bab ini mencoba menjawab pertanyaan utama “sejauh mana globalisasi informasi mempengaruhi keamanan manusiawi?”. Pertanyaan ini lantas diuji dengan menggunakan dua kasus utama, yaitu terorisme dan perang virtual. Dalam upaya menjawab pertanyaan utama, penulis membagi bab II menjadi beberapa bagian, dimulai dengan menunjukkan arti penting keamanan di era globalisasi informasi, mencoba menggambarkan debat-debat utama kajian keamanan di HI, serta memikirkan kembali fakta dan realita terkait keamanan global. Walaupun ternyata perkembangan keamanan global di era informasi diwarnai dengan kemunculan pandangan-pandangan baru tentang keamanan, semakin maraknya aksi teror, dan makin canggihnya perang virtual, namun penulis menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dramatis pada kondisi keamanan manusiawi. Media masih memainkan peran utama dalam “amplifying and magnifying” isu-isu terkait keamanan.

Bab III melanjutkan penggambaran kondisi di bab II dengan mencoba memotret serta menggambarkan relasi spesifik antara perang informasi dengan keamanan manusiawi. Dengan menggunakan klasifikasi dari Roland Paris mengenai keamanan manusiawi dan menggabungkannya dengan konsep perang di era informasi yang dikembangkan oleh James Der Derian, Michael Ignatieff, David Ronfeldt, dan John Arquilla, penulis pada bab ini berargumen bahwa walaupun kedua konsep (perang informasi dan keamanan manusiawi) cenderung merupakan konsep baru

dalam kajian III, terdapat relasi erat antara keduanya. Dengan menggunakan kasus perang Kosovo serta kasus-kasus umum lainnya mengenai konflik global dan mengaitkan dengan *netwar* dan *cyberwar*, penulis menggambarkan relasi antara kedua konsep utama melalui model diagram antara konsep-konsep turunannya.

Bab IV berbicara mengenai isu dan problem yang dihadapi masyarakat sipil global di era informasi. Berdasar pada konsepsi Mary Kaldor mengenai masyarakat sipil, pada teori Frank Webster mengenai masyarakat informasi, beserta konsep identitas kolektif yang diusulkan Alexander Wendt dan Jan Aart Scholte, penulis menggunakan kasus Battle of Seattle dan bantuan kemanusiaan *flotilla* Israel untuk merefleksikan inefektifitas dari gerakan sosial dan masyarakat sipil di level global, walaupun secara teoritik seharusnya globalisasi informasi memudahkan aktor nonnegara untuk memainkan perannya. Ketidadaan identitas kolektif dan adanya dimensi kultural dari masyarakat informasi menjadi salah satu faktor krusial yang menyebabkan tidak efektifnya gerakan sosial di era ini.

Bab V membahas mengenai kemunculan Islamic State of Iraq and Syria yang telah banyak menarik atensi dunia. Kebanyakan masyarakat mengerti dan mengetahui eksistensi ISIS sebagai sebuah gerakan teror yang telah melegitimasi diri ke dalam bentuk negara di wilayah Iraq dan Syria. Akibatnya keberadaan ISIS menjadi populer dalam caranya sendiri. Hal ini berdampak terhadap semakin tingginya arus dukungan kepada ISIS dari orang-orang yang sepaham. Di sisi lain ISIS juga populer dan efektif dalam menyebarkan teror kepada masyarakat dalam bentuk penyebaran video dan rilis eksekusi hukuman mati, kekerasan dan penyiksaan yang mereka lakukan. Dari kedua parameter tersebut dapat dianalisis bahwa sebagai sebuah gerakan teror maka usaha ISIS tergolong

berhasil dikarenakan ISIS berhasil membuat orang bergabung ke dalam gerakannya dan di sisi lain ISIS juga mampu menyebarkan teror kepada masyarakat. Keberhasilan ISIS ini penulis analisis melalui dua variabel yaitu keberhasilan manajemen ekonomi dan keberhasilan strategi global ISIS.

Bab VI membicarakan soal kompleksitas kajian strategi di era informasi. Berdasarkan pertanyaan "sejauh mana perubahan sifat perang di era informasi mempengaruhi kajian strategi", bab ini menganalisis strategi dan kontrastrategi (terutama negara terhadap kelompok separatis, dalam hal ini adalah Gerakan Papua Merdeka dan Chechnya). Dimulai dengan beberapa ikhtisar mengenai perkembangan studi strategis sepanjang sejarah, dan perdebatan tentang perang informasi dan *netwar*, penulisingin menunjukkan bahwa strategi *netwar* lebih sesuai untuk aktor non-negara, sementara strategi (dan kontrastrategi) negara justru lebih kompleks sehingga kurang strategis bagi negara untuk melakukan strategi *netwar* yang serupa.

Bab VII berargumen bahwa revolusi informasi telah membawa perang baru, yaitu perang virtual. Oleh karenanya, strategi yang selalu dipelajari melalui studi perang, juga mengalami perubahan besar. Dapatkah ahli strategi klasik seperti Sun Tzu dan Clausewitz menjelaskan apa yang telah terjadi di era dunia maya? Apakah strategi mereka masih relevan di era perang baru ini? Bab ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan argumen Derian dan Ignatieff terkait perang virtual sebagai dasar dan strategi Sun Tzu dan Clausewitz, artikel ini mencoba untuk mengevaluasi relevansi strategi-strategi klasik tersebut. Bagian pertama dari bab ini menjelaskan perlunya melakukan evaluasi terhadap strategi Sun Tzu dan Clausewitz. Bagian kedua

menganalisis poin-poin kunci dalam kedua strategi tersebut. Bagian ketiga menggambarkan konsep perang virtual. Bagian keempat mencoba mengevaluasi strategi klasik tersebut dengan membandingkan poin-poin kunci dengan fakta-fakta di era informasi. Penulis lantas menyimpulkan bahwa strategi Sun Tzu bisa menjadi yang paling relevan karena gaya filosofisnya, namun strategi Clausewitzian mungkin memerlukan evaluasi di era virtual.

Bab VIII lantas mengembangkan strategi informasi dan mencoba melihat bagaimana ASEAN (sebagai aktor nonnegara) berupaya untuk bermain di arena informasi dan mencoba menyelesaikan tantangan *digital divide*. *Digital divide* merupakan salah satu tantangan utama yang dialami oleh negara dalam era masyarakat informasi. Semakin lebarnya jurang informasi antara negara maju dan negara berkembang membuat terhambatnya pembangunan dan pengembangan masyarakat yang secara otomatis akan menghambat kemajuan negara. Keberadaan sepuluh negara dengan tingkat akses dan infrastruktur informasi yang berbeda membuat integrasi kawasan menjadi terhambat. Kebijakan dan respon berbeda yang oleh setiap negara, tidak secara langsung mengatasi permasalahan digital divide. Untuk merespon hal tersebut, ASEAN telah mencanangkan sebuah program yaitu Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) yang diharapkan dapat membuat ASEAN semakin terkoneksi sehingga langkah integrasi kawasan akan menjadi lebih mudah.

BAB II

Keamanan Global di Era Globalisasi Informasi

Pendahuluan

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang memicu banyak perdebatan. Permasalahan keamanan global juga menjadi salah satu bagian dari debat globalisasi tersebut. Seperti yang diungkapkan Ayooob (2005), terdapat banyak perbedaan diantara para ahli dalam memaknai hubungan antara globalisasi dan keamanan. Salah satunya adalah kelompok yang menganggap bahwa di era globalisasi, problematika keamanan telah bergeser dari isu-isu keamanan negara menjadi isu-isu keamanan manusia (Ayooob 2005, 11). Hal inilah kemudian yang menjadi fokus utama dari tulisan ini. Namun, untuk lebih memfokuskan arah tulisan, penulis mempersempit isu globalisasi yang ada menjadi globalisasi informasi.

Alasan penyempitan isu menjadi globalisasi informasi ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kemajuan luar biasa dalam bidang teknologi informasi. Kemajuan ini bahkan dianggap oleh Castells (1996) telah menciptakan sebuah revolusi teknologi informasi. Bila dilihat faktanya, kemajuan dalam bidang teknologi informasi memang begitu cepat. Castells (1996) menggambarkan perubahan dalam bidang teknologi informasi yang menurutnya diawali dari penemuan transistor dan komputer pada 1947 sampai pada era bioteknologi tahun 1970an. Di era saat ini, penemuan teknologi telepon seluler, komputer yang semakin canggih, dan internet mewarnai perkembangan teknologi informasi kontemporer.

Alasan kedua yang menyebabkan penulis mempersempit ruang globalisasi menjadi globalisasi informasi adalah bagaimana globalisasi

informasi telah mengubah pola-pola hubungan antara negara dan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Giddens (dalam Webster 2006), negara saat ini semakin dipaksa untuk menjalankan pola-pola *surveillance* demi menjamin kesejahteraan warganya. Disisi lain, kebebasan yang dimunculkan akibat adanya media-media seperti internet, televisi global, dan media komunikasi lain memungkinkan adanya opini dunia yang seakan meminggirkan peran negara di level global (Parsons 2007; Barnett 2003). Paradoks-paradoks semacam inilah yang kemudian mewarnai hubungan antara negara dengan warga negara sehingga potensial mengubah dimensi keamanan global.

Dengan mengacu pada dua alasan utama tersebut, bahwa kemajuan teknologi informasi telah semakin pesat dan mengubah kehidupan manusia, serta bahwa globalisasi informasi telah mengubah pola-pola hubungan antara negara dengan warga negara, maka penulis mengemukakan pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu sejauh mana sebenarnya globalisasi (dalam hal ini globalisasi informasi) mempengaruhi keamanan global?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan beberapa kerangka analisis. Pertama, dibutuhkan sebuah kerangka pikir mengenai konsep keamanan kontemporer. Hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap problematika konseptual mengenai keamanan yang terkait hubungan keamanan dengan globalisasi, terutama globalisasi informasi. Kedua, diperlukan sebuah pendekatan yang dianggap mampu menjelaskan problematika keamanan di era globalisasi informasi ini.

Untuk itu, tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama akan terdiri dari dua sub bagian yang masing-masing membahas

kerangka analisis yang telah dijabarkan sebelumnya. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana sebenarnya fakta yang ada terkait dengan ancaman di era globalisasi informasi ini. Bagian terakhir merupakan sebuah telaah kesesuaian antara kerangka analisis dengan fakta yang ada.

Diskursus Konseptual Keamanan Kontemporer dalam Kerangka Globalisasi Informasi

Sub-bagian pertama dari pembahasan mengenai kerangka analisis ini membahas mengenai diskursus konseptual keamanan kontemporer dengan memakai kerangka globalisasi informasi. Keamanan selama ini didefinisikan dalam kerangka sistem negara-bangsa. Ini bisa dilihat dari pemahaman perspektif-perspektif mainstream dalam Hubungan Internasional mengenai perdamaian dan keamanan. Kelompok realis misalnya memahami perdamaian dan keamanan sebagai sebuah kondisi ketiadaan perang (Barash & Webel 2002). Keamanan dengan begitu dianggap selalu berkaitan dengan perang. Menurut Barash dan Webel, tradisi *negative peace* ini didasarkan pada pandangan kelompok realis dan neo-realis (2002, p.6). Ini, menurut Richmond, muncul dari pandangan Thomas Hobbes yang menekankan pada perang sebagai kondisi natural manusia (2008, 2). Walaupun begitu, perdamaian dan kondisi aman masih mungkin dicapai melalui Leviathan. Disinilah kemudian tradisi *negative peace* sebagai *the absence of war* menjadi salah satu pendekatan yang cukup umum dalam studi Hubungan Internasional.

Pendekatan lainnya menganggap bahwa perdamaian dan situasi aman bukan hanya permasalahan ketiadaan perang fisik. Michael Howard mengatakan bahwa perdamaian tidak saja berarti ketiadaan perang namun juga berarti pengelolaan masyarakat yang terlindungi dari ancaman dan

tekanan dari pihak agresor serta adil dan terlindungi dari eksploitasi pihak yang lebih kuat (dalam Cortright 2008, 6). Barash dan Webel mengatakan bahwa *positive peace* berarti kondisi ketika eksploitasi ditekan sampai titik terendah atau bahkan dieliminasi hingga tidak adanya kekerasan struktural (2002, 6). Kekerasan struktural disini merupakan kondisi kekerasan dan ketidakadilan, kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan sosial, dan masalah-masalah non-perang lainnya (Cortright 2008, 7).

Cukup sulit untuk melakukan kontekstualisasi dalam permasalahan definisi situasi aman di era globalisasi saat ini. Menurut Booth (2005), era kontemporer ini diwarnai dengan adanya “multiplication of morbid symptoms”. Ini adalah kondisi ketika semua pola-pola konseptual yang bertentangan muncul secara bersamaan. Di satu sisi, perang masih ada di era globalisasi informasi. Memakai *timeline* dari Castells (1996), yang menganggap revolusi teknologi informasi telah terjadi sejak akhir Perang Dunia II, maka sejak berakhirnya Perang Dunia II sampai tahun 1995 telah terjadi 58 kali perang antar negara ataupun intervensi negara ke negara lain yang berujung konflik bersenjata (Holsti 1995). Namun disisi lain, pola-pola kekerasan struktural juga tetap terjadi. Kemiskinan, kelaparan, dan permasalahan lingkungan juga masih mewarnai masyarakat era globalisasi. Dari gambaran tersebut, bisa diambil satu benang merah bahwa sebenarnya tidak ada perubahan mendasar yang terjadi pada era globalisasi terkait dengan problematika keamanan. Perang tetap saja terjadi bersamaan dengan kekerasan struktural lainnya. Lantas, apa yang sebenarnya berubah?

Keamanan di Era Globalisasi Informasi

Apa kemudian karakteristik era globalisasi informasi yang berkaitan erat dengan keamanan global? Paling tidak ada dua hal yang melandasi problematika keamanan di era globalisasi informasi. Yang pertama adalah semakin kuatnya peran media dalam membentuk opini publik. Hal ini ditekankan oleh Nacos (2002) misalnya, ketika membahas bagaimana media seakan memperbesar efek terorisme global. Bahkan, Nacos (2002) lebih jauh juga menekankan bagaimana media “amplify and magnify” segala bentuk “political violence”. Pandangan Nacos ini menegaskan bagaimana di era globalisasi informasi ini, media berperan dalam memperbesar isu-isu, terutama isu-isu yang dianggap mengancam kehidupan manusia.

Hal kedua yang melandasi problematika keamanan di era globalisasi informasi adalah bahwa revolusi teknologi informasi telah menciptakan kemajuan besar dalam teknologi militer. Ini memungkinkan perang dilakukan dalam skala yang lebih masif, lebih destruktif, namun dengan resiko dan personel yang lebih sedikit. Michael Ignatieff (2000) menjelaskan bagaimana perang Kosovo tahun 1999 menunjukkan keunggulan teknologi Amerika Serikat dan dampaknya yang mengubah filosofi dasar mengenai perang. Ignatieff (2000) menekankan bahwa perang yang sebelumnya masih mungkin dihentikan dengan alasan masih besarnya kemungkinan korban di kedua belah pihak, terlebih di era nuklir, kemudian berubah menjadi ajang “turkey shoot”. Ignatieff lantas memberikan pandangannya bahwa era “virtual war” ini justru potensial meningkatkan ketidakamanan, karena pihak-pihak lain di luar pemegang teknologi akan menggunakan cara-cara seperti teror, serangan biologis, dan serangan kimia (2000, 212).

Dari kedua pandangan tersebut, bisa diambil kesimpulan sementara bahwa era globalisasi informasi ini memang tidak menghasilkan ancaman-ancaman baru pada kehidupan manusia, dan negara pada umumnya, namun ancaman keamanan yang telah ada ini seakan diperbesar oleh kekuatan media dan peningkatan teknologi yang membuat ancaman menjadi lebih masif.

Perspektif Keamanan Kontemporer

Dalam rangka mendekati problematika keamanan kontemporer, Richmond (2008) memberikan banyak perspektif yang bisa digunakan. Penulis menganggap bahwa terkait dengan peran media dalam “memperbesar” permasalahan keamanan dan semakin masifnya ancaman yang muncul dikarenakan pola-pola “virtual war” ini bisa didekati melalui pendekatan *social constructivism*. Pemilihan ini didasarkan pada argumen bahwa baik realisme dan liberalisme menekankan pada isu-isu militeristik dan ekonomi serta kepentingan nasional sebagai sesuatu yang *given* dan nyata (Koledziej 2007). Sementara itu, di era globalisasi informasi ini, seperti yang ditekankan Ignatieff (2000, 214), “...we live our lives in language and thus in representation...see through a glass darkly, never face to face...”. Realitas, dalam hal ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pemikir-pemikir konstruktivisme sosial, merupakan sebuah konstruksi sosial, bukan hanya sebuah obyek yang berupa realitas eksternal (Dannreuther 2007, p.40). Oleh karenanya, pemahaman mengenai keamanan dan ketidakamanan di era globalisasi informasi ini kemudian merupakan konstruksi sosial, baik melalui media maupun pola-pola “virtual war” yang ada.

Namun, perlu ditekankan bahwa pola-pola konstruktivisme sosial ini, yang menjelma dalam bentuk pendekatan *securitization* milik Buzan masih harus dilengkapi dengan pendekatan *politicization* milik Ayooob (2005). penulis menganggap sebuah pendekatan yang lebih holistik diperlukan dalam memahami permasalahan keamanan global. Pandangan Buzan mengenai *securitization* sebenarnya bisa dijadikan landasan, namun kritik Ayooob dan sarannya mengenai *politicization* juga perlu dipertimbangkan. Oleh karenanya, pendekatan terhadap perdamaian dan keamanan global yang didasarkan pada konsep *politicization-securitization* menjadi sebuah pandangan yang cukup relevan. Dengan melakukan *securitization*, semua isu yang potensial mengancam kelangsungan hidup manusia bisa dianggap sebagai sebuah isu keamanan. Namun, dengan juga memasukkan elemen *politicization*, maka kita tidak melupakan fakta bahwa negara masih memegang kontrol dalam menjamin keamanan masyarakatnya. Gabungan kedua konsep ini, baik dari Buzan maupun Ayooob, menurut penulis bisa cukup menjelaskan problematika keamanan di era pasca Perang Dingin, ketika hampir semua isu menjadi permasalahan keamanan dan negara masih tetap menjadi pihak yang dominan menguasai dan mengontrol permasalahan keamanan ini.

Simpulan teoritik yang kemudiann didapatkan dari beberapa kerangka yang telah dibahas adalah bahwa secara fundamental tidak terdapat ancaman-ancaman baru terhadap kehidupan manusia. Yang terjadi di era globalisasi informasi adalah semakin “meningkatnya” intensitas ancaman akibat adanya pemberitaan media massa dan kemajuan teknologi perang. Namun, “peningkatan” intensitas ini baru berpengaruh apabila ada proses *politicization-securitization* yang terjadi pada level negara. Dengan kata lain, ketika sebuah isu yang di-blow-up oleh media

ataupun dipengaruhi oleh kemajuan pesat teknologi perang kemudian menjadi isu politis di level pemerintahan, barulah kemudian permasalahan tersebut benar-benar menjadi permasalahan keamanan baru di era globalisasi informasi.

“Realita” Keamanan Global

Bagian ini ditujukan untuk menunjukkan beberapa “fakta” dan “realita” yang menggambarkan problematika keamanan di era globalisasi informasi saat ini. Perlu dicatat bahwa perspektif konstruktivisme sosial yang dipakai penulis akan digunakan di bagian selanjutnya untuk memaknai bagaimana “fakta” dan “realita” tersebut.

Salah satu ancaman utama di era globalisasi ini adalah terorisme. Seperti yang diutarakan Nacos (2002), terorisme bukanlah hal yang baru. Pola-pola serangan menggunakan kekerasan dengan menekankan pada korban masyarakat sipil telah terjadi sejak lama. Weinberg dan Eubank (2006) misalnya memberikan beberapa contoh tindakan teror yang telah terjadi sejak tahun 1983 (ditandai dengan serangan teroris di Lebanon) sampai pada serangan terhadap World Trade Center tahun 2001. Bahkan, Weinberg dan Eubank (2006) menemukan bahwa dasar terorisme bisa dilacak sampai pada era Yunani Kuno.

Namun, permasalahan mendasar yang membedakan terorisme lama dengan terorisme di era globalisasi informasi adalah bagaimana peran media, seperti yang diungkapkan Nacos, memperbesar efek globalisasi. Sebelum tragedi 9/11, serangan-serangan teroris sebenarnya juga membunuh banyak korban. Seperti dicatat Weinberg dan Eubank (2006), serangan tahun 1983 di Beirut menewaskan 242 warga AS dan 58 warga Perancis. Serangan tahun 1993 di WTC menewaskan 6 orang dan

melukai 1000 orang lainnya. Pada tahun 1995, serangan teroris di Jepang menewaskan 12 orang dan melukai hampir 6 ribu orang. Serangan kelompok fundamentalis kanan AS di Oklahoma City menewaskan 166 orang, yang pada saat itu merupakan serangan terbesar di wilayah AS. Serangan terhadap pesawat India tahun 1985 menewaskan 329 orang. Beberapa contoh kasus tersebut memang belum sebanding dengan korban serangan 11 September 2001 yang mencapai 3 ribuan orang. Namun, serangan 11 September 2001 mengguncang dunia dengan cara lain.

Nacos (2002) menekankan bagaimana pada saat itu kondisi *real-time* dan *live event* yang terjadi ketika serangan tersebut membuat efek multiplikasi begitu besar. Serangan tersebut kemudian memberikan dampak yang begitu besar pula secara politis. Pola-pola *War on Terror* yang dilakukan George W. Bush didasarkan pada serangan tersebut. Eytan Gilboa (2002) mengilustrasikannya dengan begitu baik ketika ia mengemukakan adanya sebuah *CNN Effect* dalam pembentukan kebijakan luar negeri. *CNN effect* yang dimaksudkan Gilboa (2002, 732) disini adalah di era globalisasi informasi ini, media berperan begitu dominan dalam mempengaruhi pola-pola pengambilan kebijakan. Pola ini nampak begitu jelas dalam kondisi pasca-9/11 ketika kebijakan AS lebih diakibatkan pemberitaan besar-besaran dan liputan langsung yang dilakukan oleh media massa.

Ini menunjukkan bahwa dari segi pola-pola serangan tidak ada perubahan signifikan dari ancaman terorisme terhadap kehidupan manusia. Sesuai dengan yang diungkapkan Gilboa dan Nacos, yang terjadi adalah *blow up* oleh media yang menyebabkan isu-isu yang ada seakan menjadi isu teramat besar. Kondisi ini tidak saja terjadi di ranah internasional. Isu terorisme di ranah domestik pun diekspos oleh media

dan menyebabkan ketakutan yang luar biasa. Penggerebekan teroris yang disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi swasta tahun 2009 lalu misalnya, dikritik banyak pihak karena dianggap mendramatisir masalah. Ketua KPI saat itu, Sasa Djuarsa, melihat bahwa media bukan lagi memerangi terorisme tetapi mendramatisir persoalan (Viva News 11 Agustus 2009). Praktisi media, Danang Sangga Buwana, menelaah perilaku media terkait terorisme itu (2009). Ia melihat bahwa apa yang dilakukan media menimbulkan paradoks baru, karena di satu sisi masyarakat menjadi antipati terhadap tindakan teror namun di sisi lain juga merasa bersimpati. Selain itu, muncul anggapan bahwa media menjadi alat untuk mengonstruksi realitas bahwa teroris itu beragama Islam dan berasal dari pesantren (Buwana 2009). Padahal, seperti yang telah diilustrasikan Weinberg dan Eubank (2006), teroris yang ada selama ini tidak saja berasal dari kelompok Islam. Disinilah kemudian media memainkan perannya sebagai pencipta realitas.

Namun, perlu juga dicatat bahwa bahkan dramatisasi oleh media tidak akan berjalan tanpa adanya aksi politis dari negara terkait terorisme. Di Indonesia, penanganan terorisme oleh Densus 88 dengan mengundang media yang kemudian menghasilkan pemberitaan besar-besaran. Ataupun sebaliknya, pemberitaan media kemudian direspon oleh negara sehingga menimbulkan isu-isu keamanan.

Fakta terkait fenomena politisasi isu ini nampak jelas dalam ranah internasional. Dalam hal ini, pandangan kelompok pro-globalisasi yang menganggap bahwa peran negara telah semakin berkurang, dan isu-isu keamanan telah bergeser menjadi hanya keamanan manusia mengalami kegagalan dalam menunjukkan fakta. Yang ada, gerakan-gerakan masyarakat seperti World Social Forum justru tidak mampu mengubah

apapun (Parsons 2007). Negara, dalam banyak hal, tetap menjadi aktor utama dalam konteks internasional, apalagi dalam bidang keamanan. Pandangan Buzan mengenai *securitization*, sebuah kondisi ketika semua isu potensial menjadi isu keamanan selama terjadi ancaman terhadap kehidupan manusia, ternyata tidaklah mampu menjelaskan bagaimana negara tetap memegang kontrol terhadap isu-isu keamanan.

Memang, kekuatan media mampu mengangkat isu-isu lama yang sebelumnya bukan isu sentral menjadi lebih memiliki kekuatan di masyarakat. Namun, isu-isu seperti permasalahan lingkungan, kemiskinan, dan yang termasuk dalam isu-isu *human security* lainnya sebenarnya telah ada sejak era-era sebelumnya. Media, seperti yang diungkapkan Nacos (2002) hanya berfungsi sebagai *amplifier* dan *magnifier* bagi isu-isu “baru” tersebut. Negara tetap sebagai penjamin keamanan utama bagi warganya. Ini sesuai dengan yang diungkapkan Giddens (dalam Webster 2006) bahwa di era globalisasi informasi ini negara justru semakin kuat posisinya karena ia memiliki kemampuan untuk melakukan *surveillance* pada warganya, dengan tujuan menjejakkan warga supaya warga tersebut mau berkorban demi negaranya.

Apalagi kemudian dengan berkembangnya pola-pola pertempuran virtual. Di era informasi saat ini, konsep perang era industrial mulai tergantikan dengan perang informasi. Beberapa karakter perang informasi menurut Webster (2006) antara lain adalah munculnya *knowledge warriors*, pentingnya *perception management*, penggunaan teknologi tingkat tinggi, adanya *cyberwar*, dan bahwa perang informasi telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya (pre-programmed). Contoh nyata perang informasi yang diberikan Webster (2006) adalah Perang Teluk tahun 1991.

Ignatieff (2000) juga menekankan bagaimana perang teknologi tinggi, yang mengandalkan informasi sebagai dasar peperangan, telah menciptakan ketakutan-ketakutan akan berkembangnya perang nuklir, kimia, dan biologis. Lagi-lagi, semua fitur peperangan ini bukanlah hal baru. Seperti dikemukakan Castells (1996), perkembangan keilmuan biologi dan kimia telah terjadi sejak tahun 6000 SM, dan semakin berkembang dengan adanya kemajuan teknologi informasi di tahun 1970-1980an. Walaupun begitu, ketakutan akan adanya perang biologis dan kimiawi, seperti yang dikatakan Ignatieff (2000), baru muncul setelah era perang-perang virtual dengan superioritas Amerika Serikat.

Disini perlu ditekankan pula bahwa media kembali memainkan peranan sebagai pembentuk realitas. Mengutip Ignatieff (2000, 196), "...in virtual war, the media creates the illusion that what we are seeing is true...in reality, nothing is what it seems...". Ignatieff memberikan gambaran seperti penggunaan media oleh pemerintah Yugoslavia demi menggelorakan semangat tempur warganya, dan ketidakmampuan NATO dalam mengontrol media di Kosovo serta bagaimana Rusia mengatur pergerakan media agar pertempuran di Chechnya yang begitu destruktif tidak mampu ditangkap oleh jurnalis. Dari pernyataan Ignatieff tersebut, nampak jelas bahwa media telah melakukan *CNN Effect*, dengan kemudian membentuk realitas yang potensial mempengaruhi kebijakan suatu negara. Namun, dalam realitanya, perang tidak mengalami perubahan berarti, tidak menjadi lebih terbuka dan menaati nilai-nilai HAM dan juga tidak menjadi amat destruktif.

Era Globalisasi Informasi: Ke(tidak)amanan Global?

Dari semua penjelasan yang telah dikemukakan, penulis menganggap bahwa fakta yang ada dan pandangan-pandangan peneliti lain telah menunjukkan bagaimana problematika keamanan di era globalisasi informasi. Temuan yang ada mengonfirmasikan pandangan awal penulis bahwa era globalisasi informasi tidaklah memberikan banyak perubahan dari segi bentuk ancaman terhadap kehidupan manusia. Yang terjadi di era ini adalah efek dramatisasi, *amplifying and magnifying*, dari media massa terhadap semua isu yang potensial mengancam kehidupan manusia. Nacos (2002) menyebutnya sebagai “the political violence as media event”. Pengaruh media ini seakan membuat kehidupan manusia menjadi lebih berbahaya daripada era sebelumnya. Namun apakah memang itu yang terjadi? Faktanya, terorisme misalnya, sebagai salah satu bentuk konstruksi ancaman melalui media massa, telah terjadi sejak lama.

Yang mungkin berubah adalah intensitas dari ancaman tersebut, terutama ancaman perang. Perang-perang virtual, seperti dikemukakan Ignatieff dan Webster, memang memiliki potensi untuk lebih destruktif dan menciptakan banyak korban karena menggunakan teknologi yang semakin canggih. Namun, sekali lagi, ancaman yang lebih besar dari sebuah perang virtual adalah ketakutan via media yang ditimbulkannya dan ketakutan tersebut potensial menyebabkan respon dari negara dan aktor lain dalam bentuk senjata biologis, kimia, dan nuklir.

Dengan demikian, menghadapi pertanyaan besar sejauhmana era globalisasi informasi ini berpengaruh terhadap keamanan, penulis mengemukakan sebuah argumentasi bahwa sebenarnya tidak ada perubahan mendasar dalam keamanan global. Yang terjadi hanyalah efek media sehingga menyebabkan ancaman keamanan seakan menjadi lebih

besar dan lebih beragam. Perlu dicatat pula pandangan penulis bahwa konsep keamanan manusia yang kemudian bisa dipertanyakan lebih lanjut seiring fakta bahwa negara masih memegang kendali penuh terhadap keamanan.

Oleh karenanya, penulis meragukan adanya sebuah ancaman lebih besar dalam era globalisasi informasi terhadap keamanan manusia. Ini dikarenakan dua hal penting yaitu fakta bahwa realitas yang ada hanyalah merupakan konstruksi sosial oleh media massa dan fakta lain bahwa konsep keamanan manusia bahkan masih bisa dipertanyakan keberadaannya karena ternyata negara masih memegang peranan penting.

Referensi

- Ayoob, M., 2005. Security in the Age of Globalization. dalam E. Aydinli & J. Rosenau, eds. *Globalization, Security, and the Nation State: Paradigms in Transition*. New York: State University of New York Press. Bab 1.
- Barash, D., & Webel, C., 2002. *Peace and Conflict Studies*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Barnett, A., 2003. *World Opinion: The New Superpower?*. [online]. dalam <http://www.stwr.org/the-un-people-politics/world-opinion-the-new-superpower.html> [diakses 9 Mei 2010].
- Booth, K., 2005. Two Terrors, One Problem. dalam E. Aydinli & J. Rosenau, eds. *Globalization, Security, and the Nation State: Paradigms in Transition*. New York: State University of New York Press. Bab 2.
- Buwana, D.S., 2009. *Terorisme dalam "Drama" Televisi*. [online]. dalam <http://www.lssp.org/index.php/?/20090829668/terorisme-dalam-qdramaq-televisei.html> [diakses 10 Mei 2010].
- Castells, M., 1996. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publisher.

- Cortright, D., 2008. *Peace: A History of Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dannreuther, R., 2007. *International Security: The Contemporary Agenda*. Cambridge: Polity Press.
- Gilboa, E., 2002. Global Communication and Foreign Policy. *Journal of Communication*, 52(4), hlm.731-748.
- Holsti, K.J., 1995. War, Peace, and the State of the State. *International Political Science Review*, 16(4), hlm.319-339.
- Ignatieff, M., 2000. *Virtual War: Kosovo and Beyond*. New York: Picador.
- Koledziej, E., 2007. *Security and the International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nacos, B., 2002. *Mass-Mediated Terrorism: The Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism*. Oxford: Rowman & Littlefield Publisher.
- Parsons, A.W., 2007. *Mobilising 'World Opinion' - The Movement of All Movements*. [online]. dalam <http://www.stwr.org/the-un-people-politics/mobilising-world-opinion-the-movement-of-all-movements.html> [diakses 9 Mei 2010].
- Richmond, O.P., 2008. *Peace in International Relations*. Oxon and New York: Routledge.
- VIVA News, 2009. *Penggerebekan Jaringan Noordin M. Top: KPI Kritik Pemberitaan TV tentang Terorisme*. [online] 11 Agustus, dalam <http://nasional.vivanews.com/news/read/82043-kpi-kritik-pemberitaan-tv-tentang-terorisme> [diakses 10 Mei 2010].
- Webster, F., 2006. *Theories of the Information Society*. 3rd ed. London & New York: Routledge.
- Weinberg, L. & Eubank, W.L., 2006. *What Is Terrorism?*. New York: Chelsea House Publishers.

BAB III

Relasi Perang Informasi dengan Keamanan Manusia dalam Kerangka Konflik Global

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah memunculkan banyak konsep baru mengenai peperangan. Beberapa terminologi seperti *information warfare* (Webster 2006), *virtual war* (Ignatieff 2000), *virtuous war* (Derian 2000), maupun *netwar* (Ronfeldt & Arquilla 2001) muncul menjadi konsep-konsep baru yang menjelaskan kondisi perang di era informasi ini. Di saat yang bersamaan, kondisi pasca Perang Dingin juga memunculkan konsep baru mengenai keamanan, yaitu keamanan manusia. Didasarkan pada usulan UNDP pada tahun 1994, konsep keamanan manusia (human security) muncul menjadi konsep baru dalam studi keamanan.

Yang belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelum ini adalah mengenai keterkaitan antara kedua konsep tersebut. Baik perang di era informasi dan keamanan manusia merupakan konsep pasca Perang Dingin yang tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan konsep klasik perang dan keamanan. Tulisan ini mencoba menelaah mengenai keterkaitan antara kedua konsep tersebut dan bagaimana fakta yang ada menunjukkan keterkaitan itu.

Untuk mencapai tujuan penulisan tersebut, tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ditujukan untuk mengelaborasi konsep dan teori yang ada terkait hubungan antara keamanan manusia dengan perang di era informasi. Bagian kedua berfungsi menggambarkan fakta yang ada terkait relasi antara kedua konsep tersebut. Bagian terakhir

berisikan kesimpulan dan, diharapkan, model teoritik yang menjelaskan hubungan antara kedua-nya.

Dari data dan fakta serta elaborasi teoritik dan konseptual yang telah dilakukan dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat hubungan erat antara kedua konsep, yaitu perang di era informasi dan keamanan manusia. Tabel yang dikonstruksi oleh penulis pada halaman 13 dari tulisan ini menggambarkan dengan jelas bagaimana hubungan yang ada tersebut.

Elaborasi Konsep dan Teori :

Keamanan Manusia dan Perang di Era Informasi

Konsep besar pertama yang perlu dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini adalah konsep keamanan manusia. Konsep ini pertama kali muncul saat laporan UNDP tahun 1994 berjudul *New Dimensions of Human Security* mengetengahkan pentingnya aspek-aspek lain dalam permasalahan keamanan. MacFarlane dan Khong (2006) menuliskan bahwa ada dua aspek penting dalam konsep awal keamanan manusia menurut UNDP, yaitu keamanan dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi serta perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan sehari-hari.

Masalahnya kemudian, seperti yang diungkapkan Paris (2001, p.89), definisi awal ini memungkinkan semua aspek yang mengganggu kehidupan sehari-hari menjadi bagian dari studi keamanan. Padahal, seperti yang diutarakan Gasper (2008), istilah “keamanan” adalah istilah yang digunakan untuk melakukan klaim prioritas suatu isu sebagai isu ancaman eksistensial, yang dilanjutkan dengan justifikasi prioritas dengan mengesampingkan isu-isu lain. Apabila semua isu dianggap isu keamanan,

maka benarliah anggapan Sartori (dalam Paris 2001, p.93) bahwa “if human security means almost anything, then it effectively means nothing”.

Untuk itu, dan untuk kepentingan penelitian dalam tulisan ini, perlu adanya upaya menyempitkan konsep keamanan manusia. Sudah banyak peneliti lain yang mencoba menyempitkan konsep tersebut, dan penulis tidak bermaksud mengulang upaya meninjau literatur yang telah dilakukan banyak penulis lain. Penulis hanya akan menekankan beberapa aspek penting dalam keamanan manusia yang menjadi kriteria utama dalam pembahasan tulisan ini. Yang pertama, penulis mengutip anggapan Acharya (2001) bahwa aspek yang lebih utama dalam keamanan manusia adalah “freedom from fear”. Ini didasarkan pada argumen Acharya bahwa selama ini keamanan manusia justru lebih menitikberatkan “freedom from want”, yang bisa jadi memiliki banyak variasi di setiap negara. Tidak semua orang menginginkan demokrasi misalnya, tapi banyak orang lebih menginginkan tidak adanya ketakutan akan ancaman dari orang lain. Ini menjadi salah satu dasar hubungan antara keamanan manusia dengan perang di era informasi.

Yang kedua, penulis mengambil usulan Paris (2001) mengenai kriteria keamanan manusia. Berbeda dengan banyak peneliti lain¹ yang menekankan pada aspek-aspek tertentu seperti lingkungan, kesehatan, dan lain-lain, Paris justru mencoba melakukan klasifikasi keamanan, seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

¹ Misalnya, Chen (2004) yang memfokuskan pada isu kesehatan.

Tabel 3.1. Klasifikasi Keamanan Menurut Roland Paris

		What Is the Source of the Security Threat?	
		Military	Military, Nonmilitary, or Both
Security for Whom?	States	<p><u>Cell 1</u></p> <p>National security (conventional realist approach to security studies)</p>	<p><u>Cell 2</u></p> <p>Redefined security (e.g., environmental and economic security)</p>
	Societies, Groups, and Individuals	<p><u>Cell 3</u></p> <p>Intrastate security (e.g., civil war, ethnic conflict, and democide)</p>	<p><u>Cell 4</u></p> <p>Human security (e.g., environmental and economic threats to the survival of societies, groups, and individuals)</p>

Sumber : Paris 2001, p.98.

Dari tabel yang dikemukakan Paris, nampak jelas bahwa keamanan manusia berada di kuadran 4, yang menunjukkan adanya ancaman militer dan nonmiliter terhadap masyarakat, kelompok, dan individu. Penulis menggunakan pemahaman keamanan manusia menurut Paris ini sebagai dasar analisis di bagian selanjutnya.

Setelah menemukan kerangka untuk membahas keamanan manusia, aspek kedua yang perlu dielaborasi pada sub-bagian ini adalah mengenai perang di era informasi. Untuk menelaah lebih lanjut, penulis menggunakan pembagian yang dikemukakan Paris sebagai dasar pembagian pola-pola perang model baru di era informasi. Pembagian tersebut adalah dalam bentuk militer maupun nonmiliter serta melibatkan negara maupun masyarakat serta individu.

Secara militer, ada beberapa terminologi yang muncul. Salah satunya adalah *virtual war/virtuous war* yang dikemukakan Ignatieff (2000) dan Der Derian (2000). Ignatieff mendasarkan konsep ini pada kondisi invasi NATO ke Kosovo tahun 1999. Dalam peristiwa tersebut, tentara NATO menggunakan kemajuan teknologi informasi yang mereka punyai untuk melakukan serangan-serangan berupa serangan udara, serangan rudal yang dikontrol dari jarak jauh, dan tidak melibatkan langsung personel manusia. Mengutip Der Derian (2000, 772), *virtuous war* adalah sebuah konsep ketika aktor memiliki kemampuan yang diperlukan, baik secara teknik maupun etik, untuk mengancam ataupun melakukan tindakan kekerasan terhadap aktor lain dari jarak jauh dengan tanpa menimbulkan korban, atau paling tidak dengan jumlah korban minimal, di pihak sendiri.

Dari pemahaman Der Derian tersebut, paling tidak ada satu konsep dasar dari *virtuous war* yaitu adanya kemampuan teknik dan etik dari suatu aktor. Kemampuan teknik tentu terkait dengan teknologi yang dimiliki oleh suatu aktor. Terkait dengan kemampuan etik, baik Der Derian dan Ignatieff juga sejalan ketika menganggap bahwa pola-pola perang virtual ini potensial mengubah etika-etika perang yang sebelumnya ada. Der Derian (2000) menjelaskannya dengan mengatakan bahwa *virtuous war* memungkinkan orang untuk membunuh tanpa bertanggung jawab atas perbuatannya, memungkinkan orang merasakan “kematian” tanpa merasakan konsekuensi tragis yang dihasilkannya. Dalam kalimat Ignatieff (2000), *virtual war* potensial menghasilkan *moral impunity*, atau kebebasan dari keterikatan moral. Bagi keduanya, ini merupakan hal yang amat krusial, yang menandai perbedaan antara perang model lama dengan *virtual war*. Dari penjelasan tersebut, penulis menekankan bahwa

virtual/virtuous war justru potensial menghasilkan lebih banyak korban, karena ada aspek moral yang hilang ketika tidak ada faktor resiko yang sama terhadap pihak-pihak yang bertempur.

Konsep lain yang juga terkait dengan isu militer adalah *cyberwar*. Dikemukakan pertama kali oleh David Ronfeldt dan John Arquilla (1993), *cyberwar* memiliki dimensi militeristik yang kuat, namun tidak menimbulkan efek kehancuran yang sama dengan *virtual war*. Kalau *virtual war* diasumsikan Ignatieff dan Der Derian sebagai cara mengancam aktor lain dari jarak jauh maka Ronfeldt dan Arquilla (1993) menawarkan proposisi bahwa *cyberwar* adalah operasi militer yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip terkait informasi seperti merusak atau bahkan menghancurkan sistem informasi dan komunikasi lawan serta menekankan sisi intelijen dari pertempuran. Ini berarti, *cyberwar* berada dalam lingkup yang dilakukan oleh negara dan bersifat militeristik, namun tidak berdampak secara langsung pada kehidupan masyarakat dan negara.

Setelah menekankan dua konsep yang terletak pada sisi militeristik, penulis beralih kepada konsep lain yang dikembangkan Ronfeldt dan Arquilla dalam tataran nirmiliter. Konsep *netwar* pertama kali muncul bersamaan dengan *cyberwar*, yaitu tahun 1993, ketika Ronfeldt dan Arquilla menuliskan “Cyberwar is Coming!”. Pengertian *netwar* sendiri menurut Ronfeldt & Arquilla (2001, p.6) adalah:

“...an emerging mode of conflict (and crime) at societal levels, short of traditional military warfare, in which the protagonists use network forms of organization and related doctrines, strategies, and technologies attuned to the information age...”

Dari pengertian yang dikemukakan Ronfeldt dan Arquilla tersebut, nampak beberapa karakteristik *netwar*, seperti bahwa *netwar* berada di

level masyarakat, tidak menggunakan pola-pola militeristik, mengutamakan jaringan-jaringan organisasi dan doktrin-doktrin jaringan, serta adanya aspek teknologi informasi (dalam hal ini internet). Lebih jauh lagi, Ronfeldt dan Arquilla (1993, p.146) telah menunjukkan bahwa yang dituju dari penggunaan *netwar* adalah “disrupt, damage, or modify what a target population knows or thinks it knows about itself and the world around it”. Bentuk-bentuknya antara lain adalah diplomasi publik, propaganda, kampanye psikologis, subversi kultural dan politis, pengalihan isu melalui media lokal, infiltrasi kepada jaringan komputer, serta upaya mendukung gerakan-gerakan perlawanan dan oposisi melalui jaringan komputer.

Penjelasan mengenai keamanan manusia yang menekankan pada “freedom from fear” serta ancaman berupa militer dan nirmiliter terhadap masyarakat, kelompok, dan individu bersesuaian dengan beberapa konsep baru perang di era informasi. Oleh karenanya, bagian analisis selanjutnya menekankan pada kasus-kasus umum ketika pola-pola perang informasi ini dijalankan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, kelompok, serta individu.

Analisis Konflik Global di Era Informasi dan Dampaknya terhadap Keamanan Manusia

Bagian ini membahas mengenai bagaimana sebenarnya pola-pola perang informasi yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap keamanan manusia. Untuk konteks virtual war, penulis membahas mengenai intervensi NATO di Kosovo tahun 1999 yang menandai penggunaan teknologi tinggi dalam peperangan. Dalam kerangka cyberwar

dan netwar, penulis melihat pelaksanaan pola-pola tersebut secara umum dari beberapa kasus yang telah diteliti sebelumnya.

Dalam konteks virtual war, Ignatieff (2000) telah melakukan studi lanjut dalam kasus Kosovo. Yang menjadi masalah kemudian bagaimana dampak dari penggunaan teknologi tinggi tersebut. Benarkah asumsi awal penulis bahwa korban yang jatuh justru potensial lebih banyak daripada perang-perang konvensional?

Ada beberapa fakta menarik terkait hal ini. Jackson (2000, p.289) menunjukkan bagaimana pasukan NATO sangat enggan menurunkan pasukan darat dan justru memilih mengedepankan pasukan udara, dengan resiko *collateral damage* yang lebih besar (sekitar 1200 orang sipil meninggal karena salah tembak dari serangan udara NATO). Layne (2000) juga menegaskan hal yang sama. Fakta yang ditemukan Layne adalah bahwa serangan brutal yang dilakukan pemerintah Yugoslavia justru merupakan respons atas serangan udara NATO ke wilayah Kosovo. Fakta lainnya adalah bahwa *collateral damage*, yang dikemukakan oleh Jackson, ternyata juga ditemukan semakin tinggi dan berbanding lurus dengan pengeboman yang dilakukan oleh pesawat-pesawat NATO. Data yang dikemukakan Layne (2000) menunjukkan bahwa setiap 10 ton bom yang dijatuhkan NATO membunuh satu orang sipil, dengan total estimasi sekitar 1200 sampai 2000 orang sipil yang terbunuh. Hal yang sama dilakukan Amerika Serikat di Vietnam, dengan rasio sekitar 20 ribu ton bom membunuh sekitar 1600 orang sipil. Fakta ini tentu menjadi penting mengingat Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic dianggap bersalah karena kebijakannya menyebabkan gelombang pengungsi sekitar 750 ribu orang dan korban tewas sekitar 2000 orang (BBC News, 2006).

Kelompok yang menganggap bahwa *virtual war* bisa menghasilkan perang yang “bersih” bisa berargumen bahwa fakta menunjukkan tidak banyak korban dari pihak NATO kecuali bila kita menghitung helikopter dan pesawat yang jatuh. Fakta ini membenarkan konsep *virtual war* yang menekankan minimalisasi korban, terutama di pihak kita sendiri. Dari segi tersebut, bisa jadi *virtual war* terlihat lebih menekankan keamanan manusia daripada perang konvensional. Namun, fakta bahwa jumlah korban salah tembak yang hampir 2000 orang berada di tataran yang sama dengan korban kekejaman Milosevic yang juga sekitar 2000 orang menunjukkan bahwa *virtual war* tidak lebih manusiawi daripada perang konvensional. Hal ini memunculkan kesimpulan bahwa *virtual war* berpengaruh langsung terhadap keamanan manusiawi, terutama dalam konteks “freedom from fear”, karena justru menyebabkan ketakutan akan serangan brutal dari pihak yang memiliki teknologi lebih canggih. Kesimpulan ini didukung misalnya, dalam kasus lain, ketika pasukan Amerika Serikat di Irak melakukan serangan brutal terhadap sekelompok orang sipil (Guardian 5 April 2010; TIME 6 April 2010).

Dalam konteks lain, yaitu konteks *netwar* serta *cyberwar*, kaitannya dengan keamanan manusia menjadi semakin sulit dilihat. Bahkan, terkait *netwar*, Ronfeldt dan Arquilla (2001) menekankan bahwa pola-pola *netwar* sebenarnya lebih cocok dengan kelompok-kelompok non-negara. Dari asumsi ini, seharusnya masyarakat diuntungkan dengan keberadaan *netwar*. Permasalahannya kemudian, benarkah demikian? Apakah memang tidak ada ancaman berarti terhadap masyarakat dari penggunaan pola-pola *netwar*? Apakah tidak ada ancaman keamanan manusia dari perang jaringan internet ini?

Dalam beberapa kasus, nampak bahwa memang jaringan berbasis internet lebih menguntungkan masyarakat dan tidak mengancam keamanan manusia. Penelitian Lim (2005) mengenai penggunaan jaringan internet oleh kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia menunjukkan bahwa internet memang berguna bagi kelompok yang menganggap dirinya termarginalkan dengan cara menguatkan identitas dan ideologi kelompok, memperluas jaringan, dan memberikan informasi serta pemahaman mereka kepada masyarakat luas. Kelompok yang tadinya tidak memiliki akses pada persoalan politik justru sekarang memiliki akses kepada publik dan politisi. Ini sesuai dengan argumen keamanan manusia terutama dalam hal “freedom from want” terkait demokrasi ataupun akses politik. Jaringan internet memberikan kemungkinan hal tersebut bagi kelompok-kelompok marginal.

Studi lain mengenai hal ini dilakukan oleh Vidanage (2009) yang melihat konflik antara pemerintah Sri Lanka dengan kelompok Macan Tamil. Ia melihat bahwa internet justru menjadi medium bagi kelompok marginal dan tertindas seperti Macan Tamil untuk mempromosikan dan mempropagandakan pandangan-pandangannya yang selama ini diisolasi oleh negara. Pandangan yang sama juga dilihat oleh Whitaker (2004) yang meneliti situs berita Macan Tamil, tamilnet.com. Situs itu menjadi jalan bagi kelompok Tamil untuk melakukan pertimbangan terhadap propaganda yang dilakukan pemerintah.

Beberapa contoh kasus yang disebutkan menunjukkan bahwa secara umum, ada pandangan bahwa pola-pola *netwar* justru mendorong pemenuhan keamanan manusia, terutama dari penindasan secara politik oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan anggapan bahwa peran negara perlu dikurangi. Asumsi tersebut nampak dalam anggapan bahwa ketika

negara justru menjadi sumber permasalahan, maka kooptasi permasalahan keamanan oleh negara akan menyebabkan ketidakamanan (Bellamy dan McDonald 2002, dalam Fierke 2007). Masalahnya kemudian, apakah memang tidak ada ancaman terhadap masyarakat dari pola-pola *netwar*?

Beberapa kasus menunjukkan justru ada potensi besar ancaman terhadap keamanan manusia. Ada dua pola yang bisa dilihat, yaitu ancaman tidak langsung maupun ancaman dari efek balik. Ancaman tidak langsung akan terlihat dari kasus penggunaan pola-pola *netwar* oleh kelompok-kelompok teroris, kelompok kriminal, maupun kelompok hooligan dan anarkis yang dalam bahasa Ronfeldt dan Arquilla (2001) disebut sebagai *violence-prone netwars*.

Dalam kasus terorisme, Egerton (2009) menunjukkan bahwa forum-forum internet dijadikan alat untuk menyebarkan pandangan jihad dan mengubah identitas orang menjadi pendukung jihad. Ini memungkinkan pola-pola jiha yang sebelumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok dari negara-negara non-Barat menjadi dilakukan oleh orang-orang Barat sendiri. Kasus lain terkait terorisme dibahas oleh Zanini dan Edwards (2001) ketika mereka berargumen mengenai munculnya *cyberterrorism*. Berbeda dari pandangan Hoffman (1994) yang menganggap bahwa terorisme tetap akan mengandalkan bom dan senjata bahkan di era informasi, Zanini dan Edwards justru beranggapan bahwa teroris akan mengalami perubahan signifikan di era informasi. Bila sebelumnya hanya mengandalkan senjata dan bom saja, maka terorisme di era informasi, walaupun tetap mengandalkan senjata dan bom, akan mengutamakan penggunaan internet dan jaringan media untuk menyebarkan ketakutan kepada masyarakat. Zanini dan Edwards (2001, p.48) bahkan menemukan fakta bahwa pola-pola *netwar* dilakukan oleh

hackers asal Palestina terhadap situs-situs pemerintahan Israel dan perbankan di Israel. Gerakan *counter-netwar* kemudian dilakukan oleh *hackers* asal Israel, yang membajak situs-situs Hamas dan Otoritas Nasional Palestina.

Penggunaan jaringan berbasis informasi oleh teroris tidak hanya terjadi di ranah internet. Penyebaran pesan singkat (SMS) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang berisikan pesan-pesan terkait terorisme, juga potensial mengancam keamanan manusia, terutama karena menyebabkan ketakutan di masyarakat. Ditangkapnya seorang pelaku diduga teroris, didasarkan pada pesan-pesan singkat yang ia kirimkan, menjadi bukti bahwa bahkan negara menganggap serius ancaman dari penggunaan jaringan informasi ini (ANTARA News, 6 Agustus 2010). Penggunaan jaringan untuk memperoleh dana, baik melalui SMS maupun internet, juga telah dilakukan oleh teroris dan diungkap oleh Kabareskrim Polri Susno Duadji tahun 2009 lalu (Detik News, 3 September 2009). Walaupun hanya menjadi pola subsider dari pola-pola klasik senjata dan bom, namun penggunaan jaringan berbasis teknologi oleh teroris ini ternyata secara tidak langsung mengancam keamanan manusia.

Dalam konteks jaringan kriminal dan kelompok anarkis, penggunaan pola-pola *netwar* ternyata juga potensial berdampak tidak langsung pada masyarakat. Williams (2001) menunjukkan kondisi ini dengan membahas penggunaan pola-pola *netwar* oleh organisasi kriminal transnasional. Contoh yang diberikan Williams misalnya adalah jaringan antara mafia Sicilian Cosa Nostra, penyelundup obat terlarang di Turki, Sacra Corona Unita (di Italia Selatan), dan dengan 'Ndrangheta (dari Calabria). Contoh lain misalnya jaringan perdagangan narkotika di Turin, Italia, yang melibatkan orang-orang Calabria, Turki, Pakistan, dan

Kolombia. Istilah khusus yang digunakan Williams (2001, p.77) untuk menggambarkan kondisi ini adalah “highly cosmopolitan criminal networks”.

Jaringan kriminal global ini jelas mengancam masyarakat, terutama dalam aspek keamanan manusia terkait kesehatan. Selain itu, jaringan ini juga terkait dengan tindakan korupsi yang bisa jadi terjadi di suatu negara. Penelitian Williams (2001, p.84) menemukan bahwa dalam kasus pencucian uang sebesar 70 juta dolar di New York, jaringan yang terlibat adalah penyelundup obat terlarang dari Kolombia, supir taksi asal Amerika Serikat, Konsulat Jenderal asal Bulgaria, aparat polisi dari New York, dua orang rabbi (pemuka agama Yahudi), seorang pemadam kebakaran New York, seorang jaksa, dan dua pegawai bank di Zurich, Swiss. Jaringan kriminal yang menggunakan pola-pola *netwar* seperti ini, walaupun tidak secara langsung mengancam keamanan manusia, tetapi potensial menimbulkan ketakutan dalam diri masyarakat, apalagi kalau jaringan ini melibatkan aparat-aparat penegak hukum. Pernyataan terpidana kasus mafia pajak, Gayus Tambunan, bahwa ada orang asing yang terlibat dalam pembuatan paspor palsu miliknya, jelas menunjukkan adanya jaringan tersebut di Indonesia, dan bisa jadi menimbulkan ketakutan banyak orang ketika akan berurusan dengan aparat penegak hukum (Jawa Pos National Network, 21 Januari 2011).

Sementara itu, dalam bentuk violence-prone *netwars* yang terakhir, pola-pola *netwar* oleh kelompok hooligan maupun kelompok anarkis seperti yang diutarakan Williams (2001) dalam kaitannya dengan kelompok geng motor Hell’s Angels, yang memiliki jaringan di 16 negara. Sullivan (2001) menjelaskan kasus lain ketika organisasi jalanan seperti PAGAD (People Against Gangsterism and Drugs) di Afrika Selatan dan

Black Bloc (taktik menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang biasanya digunakan gerakan anti-globalisasi) menggunakan pola-pola netwar, mengandalkan jaringan yang dibentuk melalui internet, demi mencapai tujuannya. Permasalahannya kemudian, seperti yang terjadi pada PAGAD di Afrika, organisasi ini justru terlibat dalam pola-pola kerusuhan yang berujung tindakan kriminal. Black Bloc di Seattle tahun 1999 bahkan menghancurkan banyak tempat seperti Starbucks, Old Navy, dan GAP. Ancaman terhadap keamanan manusia timbul dari ketakutan terhadap kelompok-kelompok seperti Hell's Angels dan PAGAD serta taktik Black Bloc.

Setelah menelaah beberapa pola-pola netwar yang menimbulkan ancaman tak langsung, selanjutnya perlu ada pemahaman tersendiri mengenai pola-pola netwar yang mengancam keamanan manusia melalui efek balik. Maksud dari efek balik di sini adalah pola-pola netwar memungkinkan timbulnya gerakan counter-netwar, yang justru mengancam keamanan manusia. Potensi counter-netwar yang mengancam keamanan manusia ini dilakukan oleh negara, dalam rangka melawan netwar dari kelompok-kelompok marjinal.

Ada beberapa bentuk efek balik yang bisa terjadi. Pertama, efek balik yang mengancam secara langsung. Seperti yang dikatakan Ronfeldt dan Arquilla (2001), seharusnya pola-pola jaringan dilawan dengan menggunakan pola-pola jaringan berbasis informasi lagi. Masalahnya, negara sudah sangat nyaman dengan pola-pola hierarkis sehingga sulit melakukan adaptasi terhadap taktik netwar kelompok marjinal. Konflik Sri Lanka dengan Macan Tamil menjadi salah satu contoh ketika negara menggunakan pola-pola kekerasan dan penggunaan otoritas dalam melawan gerakan-gerakan di dunia maya. Baik Vidanage (2009) maupun

Whitaker (2004) menuliskan bahwa salah satu strategi awal dari negara adalah berupaya menghentikan pola-pola jaringan berbasis internet Tamil dengan melakukan intimidasi fisik terhadap orang-orang yang terlibat. Pola-pola intimidasi menggunakan kekerasan ini misalnya, juga terjadi ketika Wikileaks menyebarkan informasi rahasia mengenai pemerintah Amerika Serikat di internet. Pendiri Wikileaks, Julian Assange, sampai ditangkap dan diadili dengan alasan yang mengada-ada (BBC, 8 Desember 2010).

Pola *counter-netwar* yang lain, yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penutupan secara resmi terhadap situs-situs yang dimiliki oleh gerakan oposisi maupun kelompok non-pemerintah. Contoh dari pola ini adalah upaya Sri Lanka untuk meminta bantuan Amerika Serikat menutup situs berita resmi Macan Tamil (Vidanage 2009), upaya pemerintah Rusia untuk menutup situs-situs Chechen (Kramer 2005), dan upaya Amerika Serikat menutup Wikileaks (MSNBC, 2010). Pola seperti ini jelas tidak berpengaruh langsung terhadap keamanan manusia, apalagi mengancam masyarakat. Hanya saja, apabila definisi keamanan manusia yang digunakan adalah milik UNDP, maka hal ini jelas potensial mencederai keamanan politis dan keamanan personal.

Pola lain yang dipakai oleh negara dalam menghadapi gerakan-gerakan netwar ini adalah dengan juga memakai pola-pola netwar. Pemerintah Sri Lanka telah mencoba melakukan hal ini, dengan memunculkan situs resmi dari pemerintah yang mencoba melakukan counter-netwar (Vidanage 2009). Pemerintah Rusia juga telah melakukan pola yang sama, dengan meluncurkan situs www.kavkazcenter.com serta situs www.itar-tass.com (Mulvey 2000). Pola ini menurut penulis menjadi

satu-satunya pola yang kemungkinan tidak memiliki dampak terhadap keamanan manusia.

Terkait dengan cyberwar, fakta yang ada menunjukkan bahwa cyberwar lebih dekat dengan keamanan nasional dan negara daripada keamanan manusia. Karatzogianni (2006) menunjukkan beberapa kasus ketika insiden-insiden terkait cyberwar melibatkan negara-negara. Salah satunya adalah ketika *database* Amerika Serikat di New York disusupi oleh *hackers*, yang setelah dilacak berasal dari Rusia. Selain itu pemerintah Rusia juga, paling tidak dalam rentang waktu 2007-2008, telah “dianggap” melakukan dua kali cyberwar terhadap Georgia dan Estonia. *Cyberwar* terhadap Estonia dilakukan ketika banyak situs pemerintah Estonia yang lumpuh pasca pemindahan monumen peringatan Soviet dari ibukota Estonia (Guardian, 17 Mei 2007). Sementara itu, *cyberwar* terhadap Georgia “dianggap” dilakukan tepat sebelum serangan Rusia ke Georgia tahun 2008 silam (The Telegraph, 11 Agustus 2008). Permasalahan utama dalam kasus *cyberwar* antar negara adalah, sulit sekali membuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar dilakukan oleh pemerintah Rusia. Yang bisa dibuktikan hanyalah bahwa banyak serangan *hackers* tersebut dilakukan dari institusi-institusi resmi pemerintah Rusia (dapat dilihat dari alamat internet yang bersangkutan) serta karena latar belakang yang terjadi sebelum *cyber attack* tersebut dilakukan. Namun demikian, cyber war memang tidak terkait langsung kepada keamanan manusia, karena target dan sasarannya lebih pada sasaran-sasaran strategis negara dan pemerintahan.

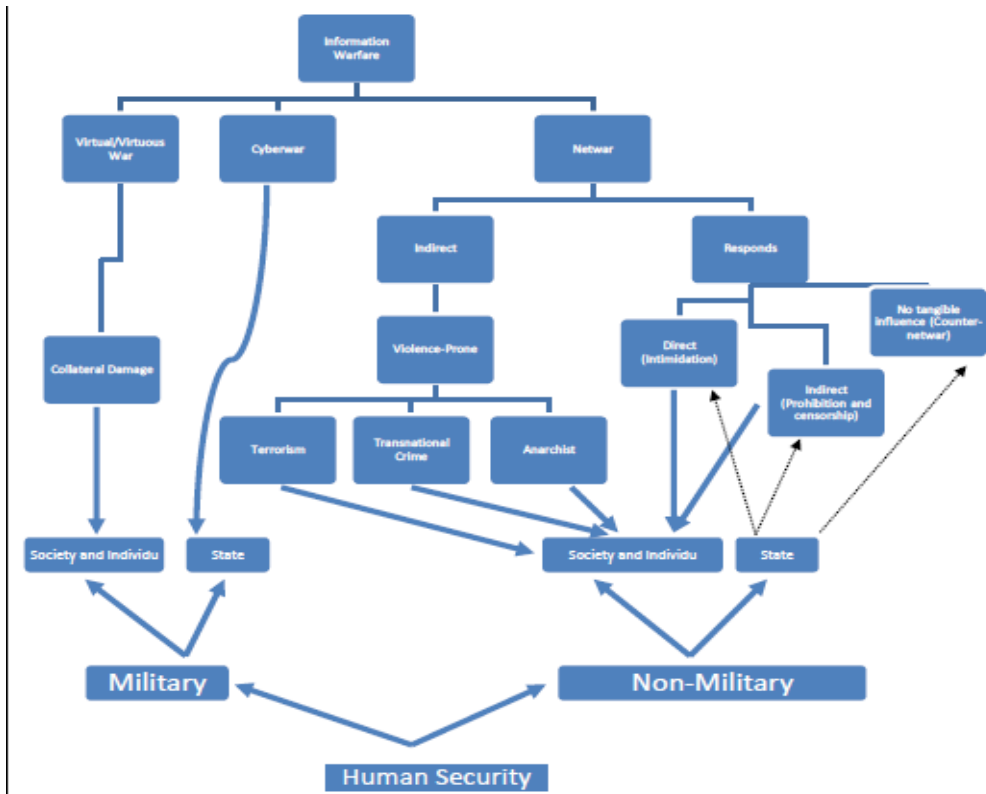
Konflik Berbasis Informasi dan Kaitannya dengan Keamanan Manusia

Dari penjelasan yang telah disampaikan dalam bagian sebelumnya, penulis bisa menyimpulkan keseluruhan bagiannya dalam sebuah diagram mengenai keterkaitan antara perang di era informasi, keamanan manusia, dalam ruang lingkup konflik global. Perlu dicatat bahwa diagram yang dihasilkan dari pembahasan di bagian sebelumnya berpotensi menghilangkan beberapa aspek minor. Ini tentunya tidak bisa dihindari apabila kita melakukan sebuah reduksi data secara kualitatif, namun penulis meyakini bahwa diagram yang ada cukup mampu menggambarkan hubungan antara beberapa konsep tersebut.

Penjelasan mengenai tabel 2 di bawah terkait dengan pembahasan di bagian sebelumnya. Perang informasi secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu *virtual/virtuous war*, *cyberwar*, dan *netwar*. *Virtual war* menyebabkan *collateral damage* yang terkait langsung dengan keamanan manusia dari aspek militer. *Cyberwar* bahkan secara langsung terkait dengan aspek militer dari keamanan manusia. Yang menjadi agak rumit adalah posisi *netwar* dalam kajian keamanan. *Netwar* tidak berpengaruh langsung kepada keamanan manusia, namun berpengaruh secara tidak langsung atau melalui respon balik dari pemerintah. Secara tidak langsung, *netwar* menimbulkan *violence-prone* (kondisi rawan-kekerasan) dalam bentuk terorisme, tindakan kriminal transnasional, dan gerakan-gerakan anarkis di jalanan. Sedangkan dalam bentuk respon balik dari pemerintah, *netwar* memiliki respon langsung dalam bentuk kekerasan fisik, respon tak langsung dalam bentuk pengekangan kebebasan informasi dan penutupan situs-situs resmi, serta dalam bentuk respon pola *counter-netwar* yang tidak berpengaruh pada kondisi

keamanan manusia. Lebih singkatnya, tabel di bawah ini menunjukkan hal tersebut.

Tabel 3.2. Relasi Perang Informasi dengan Keamanan Manusia



Dari keseluruhan tabel, terlihat bahwa ada hubungan yang nyata antara informasi dan keamanan manusia, terutama dalam konteks perang di era informasi. Tentu hal ini masih bisa digali lebih dalam lagi dengan mengadakan studi kasus mendalam terhadap beberapa fenomena yang ada. Namun, paling tidak tulisan ini telah memenuhi tujuan awal penulis, yaitu menghasilkan gambaran besar hubungan antara kedua konsep ini.

Referensi

- Acharya, A., 2001. Human Security: East versus West. *International Journal*, 56(3), pp.442-460.
- ANTARA News, 2010. *Polda Metro Jaya Bekuk Terduga Teroris ber-SMS*. [internet] 6 August. Available at: <http://www.antaranews.com/berita/1281082106/polda-metro-jaya-bekuk-terduga-teroris-ber-sms>. [accessed 21 January 2011].
- Arquilla, J. & Ronfeldt, D., 1993. Cyberwar is Coming!. *Comparative Strategy*, 12(2), pp. 141-165.
- _____, 1997. *In Athena's Camp: Preparing For Conflict in the Information Age*. CA: RAND Corporation.
- _____, 2001. The Advent of Netwar (Revisited). In: J. Arquilla & D. Ronfeldt, eds. 2001. *Networks dan Netwar: The Future of Terror, Crime, and Militancy*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Ch.1.
- BBC, 2006. *Flashback to Kosovo's war*. [internet] 10 July. Available at: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5165042.stm>. [accessed 19 January 2011].
- _____, 2010. *Wikileaks founder Julian Assange refused bail*. [internet] 8 December. Available at: <http://www.bbc.co.uk/news/uk-11937110>. [accessed 20 January 2011].
- Chen, L.C., 2004. *Health as a Human Security Priority for the 21st Century*. Paper for Human Security Track III, Helsinki Process.
- Derian, J.D., 2000. Virtuous War/Virtual Theory. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 76(4), pp.771-788.
- Detik News, 2009. *Pengiriman Dana Teroris Lewat SMS Atau Internet, Polri Sulit Lacak*. [internet] 3 September. Available at: <http://us.detiknews.com/read/2009/09/03/180220/1196170/10/pengiriman-dana-teroris-lewat-sms-atau-internet-polri-sulit-lacak>. [accessed 21 January 2011].
- Egerton, F., 2009. The Internet and Militant Jihadism: Global to Local Re-imaginings. In: A. Karatzogianni ed. 2009. *Cyber Conflict and Global Politics*. Oxon: Routledge. Ch. 8.

- Fierke, K.M., 2007. *A Critical Approaches to International Security*. Cambridge: Polity Press.
- Gaspar, D., 2008. The Idea of Human Security. *Garnet Working Paper*, 28(08).
- Guardian, 2007. *Russia accused of unleashing cyberwar to disable Estonia*. [internet] 17 May. Available at: <http://www.guardian.co.uk/world/2007/may/17/topstories3.russia>. [accessed 19 January 2011].
- _____, 2010. *Wikileaks reveals video showing US air crew shooting down Iraqi civilians*. [internet] 5 April. Available at: <http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/05/wikileaks-us-army-iraq-attack>. [accessed 20 January 2011].
- Hoffman, B., 1994. Responding to Terrorism Across The Technological Spectrum. In: J.Arquilla & D.Ronfeldt, eds. 1997. *In Athena's Camp: Preparing For Conflict in the Information Age*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Ch.15.
- Ignatieff, M., 2000. *Virtual War: Kosovo and Beyond*. New York: Picador.
- Jackson, R., 2000. *The Global Covenant: Human Conduct in a World of States*. New York: Oxford University Press.
- Jawa Pos National Network, 2011. *Sebut Keterlibatan CIA, Gayus Dinilai Mengada-ada*. [internet] 21 January. Available at: <http://www.jpnn.com/read/2011/01/21/82541/Sebut-Keterlibatan-CIA,-Gayus-Dinilai-Mengada-ada->. [accessed 21 January 2011].
- Karatzogianni, A., 2006. *The Politics of Cyberconflict*. Oxon: Routledge.
- _____, 2009. Introduction: New Media and the Reconfiguration of Power in Global Politics. In: A. Karatzogianni ed. 2009. *Cyber Conflict and Global Politics*. Oxon: Routledge.
- Kramer, M., 2005. Guerrilla Warfare, Counterinsurgency and Terrorism in the North Caucasus: The Military Dimension of the Russian-Chechen Conflict. *Europe-Asia Studies*, 57(2), hlm.209-290.
- Layne, C., 2000. Collateral Damage in Yugoslavia. In: T.G.Carpenter, ed. 2000. *NATO's Empty Victory : A Postmortem on the Balkan War*. Washington D.C.: Cato Institute. Ch.4.

- Lim, M., 2005. *Islamic Radicalism and Anti-Americanism in Indonesia: The Role of the Internet*. Policy Studies 18. Washington: East-West Center Washington.
- MacFarlane, S.N. & Khong, Y.F., 2006. *Human Security and the UN: A Critical History*. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.
- MSNBC, 2010. *Arrested WikiLeaks chief denied bail in U.K.* [internet] 7 December. Available at: http://www.msnbc.msn.com/id/40544697/ns/us_news-wikileaks_in_security/. [accessed 20 January 2011].
- Mulvey, S., 2000. *Chechen War on the Web*. [internet] Available at: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/619180.stm>. [Accessed 26 November 2010].
- Paris, R., 2001. Human Security: Paradigm Shift or Hot Air. *International Security*, 26(2), pp.87-102.
- Sullivan, J.P., 2001. Gangs, Hooligans, and Anarchists: The Vanguard of Netwar in the Streets. In: J. Arquilla & D. Ronfeldt, eds. 2001. *Networks dan Netwar: The Future of Terror, Crime, and Militancy*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Ch.4.
- The Telegraph, 2008. *Georgia: Russia 'conducting cyber war'*. [internet] 11 August. Available at: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2539157/Georgia-Russia-conducting-cyber-war.html>. [accessed 19 January 2011].
- TIME, 2010. *Combat Video: The Pentagon Springs a WikiLeaks*. [internet] 6 April. Available at: <http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1978017,00.html>. [accessed 20 January 2011].
- Vidanage, H., 2009. Rivalry in Cyberspace and Virtual Contours of a New Conflict Zone: The Sri Lankan Case. In: A. Karatzogianni ed. 2009. *Cyber Conflict and Global Politics*. Oxon: Routledge. Ch.10.
- Webster, F., 2006. *Theories of the Information Society*. 3rd ed. London & New York: Routledge.

- Whitaker, M., 2004. Tamilnet.com: Some Reflections on Popular Anthropology, Nationalism, and the Internet. *Anthropological Quarterly*, 77(3), pp.469-498.
- Williams, P., 2001. Transnational Criminal Networks. In: J. Arquilla & D. Ronfeldt, eds. 2001. *Networks dan Netwar: The Future of Terror, Crime, and Militancy*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Ch.3.
- Zanini, M. & Edwards, S.J.A., The Networking of Terror in the Information Age. In: J. Arquilla & D. Ronfeldt, eds. 2001. *Networks dan Netwar: The Future of Terror, Crime, and Militancy*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Ch.2.

BAB IV

Civil Society di Era Globalisasi Informasi: Analisis Hambatan dan Peluang

Pendahuluan

Battle of Seattle tahun 1999 menandai sebuah pola pergerakan massa baru di era kontemporer. Armond (2000) mengatakan bahwa peristiwa di Seattle tersebut menginspirasi peristiwa-peristiwa serupa yang bertemakan gerakan protes global. Parsons (2007) bahkan mengatakan bahwa Battle of Seattle tersebut mendorong sebuah “movements of all movements” dalam konteks perjuangan global yang kemudian diteruskan oleh pembentukan World Social Forum (WSF) tahun 2001. Di tahun 2010 ini, sebuah reaksi global juga muncul pasca insiden serangan Israel kepada *flotilla* pembawa bantuan di perairan Gaza (Nieuwhof 2010).²

Beberapa kasus pasca insiden Battle of Seattle menunjukkan bahwa pergerakan massa di era globalisasi ini telah menggunakan *netwar*, seperti yang diutarakan oleh Arquilla dan Ronfeldt (2001).³ Penggunaan jaringan-jaringan informasi untuk melakukan pergerakan massa secara global ini seakan menjadi karakter baru dalam *the information age* ini. Namun, apakah memang upaya-upaya melakukan gerakan global dengan menggunakan jaringan informasi ini lebih mampu mengorganisir massa di

²Reaksi ini, menurut Nieuwhof (2010), tidak saja datang dari *civil society* di wilayah Arab, melainkan juga dari kelompok masyarakat di beberapa negara seperti Swedia, Afrika Selatan, Inggris, dan Norwegia.

³*Netwar*, dalam hal ini, adalah “...an emerging mode of conflict (and crime) at societal levels, short of traditional military warfare, in which the protagonists use network forms of organization and related doctrines, strategies, and technologies attuned to the information age...” (Ronfeldt & Arquilla 2001, 6).

level global? Seberapa efektif sebenarnya pergerakan ini? Inilah yang menjadi fokus utama dari tulisan singkat ini.

Tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama berupa pengantar singkat terhadap urgensi dari tulisan ini. Bagian kedua merupakan diskusi teoritik terkait dengan konsep-konsep dan teori yang terkait isu gerakan massa, *civil society*, dan era informasi. Bagian ketiga merupakan kontekstualisasi dari diskusi teoritik dalam kasus-kasus yang ada saat ini. Bagian terakhir merupakan kesimpulan dari tulisan ini.

Sebelum melangkah pada bagian kedua tulisan, yang berupa diskusi dan elaborasi konsep serta teori, penulis mengutarakan tujuan utama tulisan ini adalah menelaah bagaimana konsep-konsep dan teori mengenai gerakan massa dan *civil society* di era informasi bisa digunakan di dunia nyata. Lantas tujuan berikutnya adalah, setelah digunakan di dunia nyata, seberapa efektif sebenarnya pola-pola pergerakan tersebut? Untuk itu, di bagian akhir tulisan, penulis mengungkapkan apa sebenarnya kendala paling utama yang dihadapi oleh *civil society* di era informasi ini.

Elaborasi Teoritik:

Civil Society, Netwar, Information Society, dan Identitas

Kolektif

Dalam bagian ini, penulis membahas beberapa konsep dan teori terkait *civil society*, era informasi, dan teori-teori ataupun pendekatan lain yang mungkin bisa menjelaskan kondisi gerakan massa di era ini. Dimulai dari pembahasan mengenai *civil society*, perannya dalam hubungan internasional, kondisi di era informasi, konsep-konsep *netwar* dan perang informasi, serta pendekatan konstruktivis yang dianggap penulis bisa lebih sesuai daripada pendekatan Hubungan Internasional lainnya.

Terminologi *civil society* merupakan terminologi yang sering digunakan di era kontemporer ini. Glasius (2001) menuliskan bahwa salah satu konsep *civil society* yang cukup komprehensif adalah konsep yang dimunculkan oleh Centre for Civil Society bahwa “...civil society refers to the set of institutions, organisations, and behaviours situated between the state, the business world, and the family”. Ini berarti bahwa *civil society* dimaknai sebagai interkoneksi antara negara, keluarga, dan pasar.

Anheier et al. (2001) menggambarkan perkembangan konsep *civil society* yang secara umum terbagi menjadi tiga posisi. Yang pertama adalah konsep *civil society* sebagai lawan dari *barbarian*, bahwa *civil society* merupakan konsep berisikan aturan-aturan serta proposisi yang berkebalikan dengan *state of nature* manusia yang anarki. Pandangan kedua, yang didasarkan pada pandangan Hegel dan de Tocqueville, menekankan pada konsep *civil society* sebagai sesuatu yang terpisah dari negara. Hegel (1991, dalam Glasius 2001) menganggap bahwa *civil society* sebagai “...something separate from, although symbiotic with, the state...”. Sementara de Tocqueville menganggap bahwa “...As the state took over more and more functions of daily life...an active voluntary sector was necessary to provide a check on state power...” (Anheier et al. 2001, 13). Pandangan terakhir muncul dari Gramsci, yang menganggap *civil society* sebagai pihak ketiga dalam kontestasi negara dan pasar. Gramsci menganggap bahwa *civil society* merupakan sebuah struktur kultural, yang disatu sisi bisa digunakan kelompok borjuis untuk menekan kelas proletar, namun disisi lain juga bisa digunakan sebagai alat revolusi kelas oleh kelompok proletar (Anheier et al. 2001, 13).

Sementara itu, Kaldor (2003, 8-11) membagi konsep *civil society* di era kontemporer menjadi tiga bentuk yaitu *activist*, *neo-liberal*, dan *post-*

modern. Activist civil society yang dimaksudkan Kaldor adalah konsep bahwa “... instead of trying to change the state, it was important to change the relation between state and society, to create self-organized institutions, independent of the state that could challenge the reach of the state...” (Michnik 1985, dalam Kaldor 2003, 8). Kaldor menganggap bahwa *activistcivil society* ini menekankan pada tempat, diluar partai politik, ketika individu dan kelompok mencoba mendemokratisasi negara, meredistribusi kekuasaan, dan terasosiasi dengan gerakan-gerakan sosial terkait perdamaian, lingkungan, perempuan, HAM, dan isu-isu lain (2003, 9). Mengutip Habermas, *activistcivil society* bertujuan menciptakan ruang publik sebagai tempat pertukaran ide-ide (1999, dalam Kaldor 2003, 9).

Neo-liberalcivil society menurut Kaldor adalah sebuah posisi antara negara dan pasar, dalam kaitannya dengan isu-isu ekonomi (2003, 9). Ini didasarkan pada argumen neo-liberalisme yang mencoba menekan peran negara dalam kegiatan ekonomi. Dengan begitu, organisasi-organisasi donor dan *charity* menjadi aktor pentingnya. Sementara *post-moderncivil society* mencoba memberikan argumen bahwa konsep *activist* dan *neo-liberal* merupakan konsep Barat yang meniadakan perbedaan kultural di dunia (Kaldor 2003, 10).

Terkait bentuk-bentuk *civil society*, Kaldor memberikan gambaran pada tabel 4.1:

Tabel 4.1. Tipe-tipe Aktor *Civil Society*

Types of Civil Society Actors				
	Social Movements	NGO	Social Organizations	Nationalist and Religious Groups
Mission	Emancipation of the poor and excluded	Development and humanitarian relief	Protection and promotion of members	Empowerment of national and religious groups

			interest	
Activities	Protest, demonstration s, mediatique events	Service provision and advocacy	Service provision and lobbying	Mobilization through media, religious organizations , and sometimes violence
Social Compositio n	Activist, committed individual, students	Professional staff	Workers, farmers, employers, local communitie s, displaced persons	Newly urbanized groups, peasant
Forms of Organizatio n	Loose horizontal coalitions, network	Range from bureaucratic and corporate to small-scale and informal	Range from vertical and hierarchical to informal networks	Vertical and hierarchical although can involve networks of tightly organized cells, charismatic leadership

Sumber: Kaldor 2003, 12.

Terkait dengan penggunaan strategi informasi, ada beberapa pandangan mengenai hal itu. Rattray (2001, 9) mengatakan bahwa biasanya *information warfare* dipahami secara luas, seperti pemahaman bahwa perang informasi merupakan penggunaan informasi untuk pencapaian tujuan nasional (Stein 1995, dalam Rattray 2001, 9). Alger menganggap bahwa perang informasi mencakup kejahatan finansial, pengumpulan data intelijen, dan ancaman-ancaman teroris (Alger 1994, dalam Rattray 2001, 9). Libicki (1995) mengidentifikasi tujuh bentuk perang informasi, yaitu

command and control warfare, intelligence-based warfare, electronic warfare, psychological warfare, hacker warfare, economic information warfare, dan cyberwarfare.

Libicki (1995) juga memberikan tiga pemahaman mengenai fenomena perang informasi. Yang pertama, bahwa perang informasi tidak selalu tergantung pada kemampuan teknologi informasi yang dimiliki. Informasi bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dan terus dipertahankan, melainkan selalu berubah dan berpotensi untuk dikuasai oleh pihak lain. Kedua, bahwa fungsi dari korps informasi pada militer bukanlah untuk bertempur dengan pihak lain, melainkan untuk mencapai kepentingan negara ataupun kelompoknya. Ketiga, pengetahuan mengenai kondisi pihak lain menjadi kunci dalam pelaksanaan perang informasi.

Terkait perang informasi ini, Ronfeldt dan Arquilla (1999) mengemukakan tiga area yang terkait dengan pentingnya informasi di era kontemporer. Yang pertama adalah *cyberspace*. *Cyberspace* disini dimaknai sebagai:

“...global system of internetted computers, communications infrastructures, on-line conferencing entities, databases, and information utilities... mostly means the Internet... may also be used to refer to the electronic environments and critical infrastructures of a corporation, military, government, or other organization” (Ronfeldt & Arquilla 1999, 353).

Dalam konteks *cyberspace*, perang informasi adalah upaya mengamankan *cyberspace* milik internal, dan upaya mengeksploitasi kelemahan *cyberspace* milik pihak lain (Ronfeldt & Arquilla 1999, 353). Konteks yang dianggap lebih tinggi dari sekedar *cyberspace* adalah *infosphere* dan *noosphere* (Ronfeldt & Arquilla 1999, 353-354). *Infosphere* adalah konteks ketika informasi menjadi dasar ruang global,

tidak saja berada dalam level *cyberspace* melainkan juga semua hal terkait informasi seperti media, perpustakaan manual, dan institusi yang belum melakukan digitalisasi. Sementara itu, *noosphere* adalah konsep yang paling abstrak, dalam artian bahwa bukan saja informasi yang menjadi penting namun “mind” menjadi pembentuk ruang global.

Ronfeldt dan Arquilla pada tahun 1993 mengemukakan konsep *netwar* untuk menjelaskan fenomena strategi penggunaan jaringan-jaringan dan teknologi informasi dalam pencapaian kepentingan kelompok-kelompok tertentu (Ronfeldt & Arquilla 2001, 2). Pengertian *netwar* sendiri menurut Ronfeldt & Arquilla (2001, 6) adalah:

“...an emerging mode of conflict (and crime) at societal levels, short of traditional military warfare, in which the protagonists use network forms of organization and related doctrines, strategies, and technologies attuned to the information age...”

Mengutip Libicki (1995), informasi bukanlah suatu hal yang bisa terus menerus dikuasai oleh kekuatan teknologi saja. Oleh karenanya, jaringan menjadi amat penting dalam strategi *netwar* ini. Apalagi, mengutip Ronfeldt dan Arquilla (2001), perang informasi di *cyberspace* lebih sesuai dengan aktor-aktor non-negara.

Pembahasan teori selanjutnya adalah teori Webster (2006) mengenai masyarakat informasi. Ada lima tahapan masyarakat informasi menurut Webster, yaitu tahapan *technological*, *economic*, *occupational*, *spatial*, dan *cultural* (2006, 9).⁴ Secara garis besar, tahapan atau konsep masyarakat informasi ini mendasarkan diri pada kemajuan teknologi, berkembangnya informational economics, berubahnya sisi tenaga kerja

⁴Penjelasan lebih lengkap mengenai detail tahapan-tahapan ini bisa dilihat pada tulisan Webster (2006). Penulis disini hanya menekankan beberapa hal penting terkait argumen Webster.

dari manufaktur menuju sektor jasa, semakin terintegrasinya dunia melalui *cyberspace*, dan penetrasi informasi dalam kehidupan kultural sehari-hari masyarakat (Webster 2006, 9-21). Penulis berargumen bahwa semakin kultural sebuah gerakan massa di era informasi, maka semakin mudah gerakan tersebut menjadi efektif dan memenuhi tujuannya. Disisi lain, semakin hanya berbasis teknologi saja sebuah gerakan, maka semakin sulit untuk menjadi gerakan yang efektif.

Terakhir, penulis mengambil pandangan Wendt mengenai konstruktivisme. Basis dari semua argumen konstruktivis adalah adanya identitas kolektif. Tentunya banyak yang kemudian mempertanyakan, terutama terkait pandangan Wendt mengenai *Self* dan *Other*. *Self* akan tercipta ketika ada *Other*, atau dalam konteks pemikiran Wendt disebut *social identities* (1994, 385). Untuk menciptakan identitas kolektif, konstruktivis menekankan pada upaya penerimaan *Other* sebagai bagian dari *Self*, bukan sebagai bagian penuh dari *Self* melainkan ada beberapa nilai bersama yang disepakati menjadi dasar pembentukan identitas kolektif (Wendt 2003, 512). Disini kemudian, penulis mencoba memparalelkan pandangan Wendt ini dengan argumen Webster mengenai masyarakat informasi di tingkat kultural. Sebuah identitas kolektif kemudian menjadi penting bagi sebuah gerakan global, karena perbedaan-perbedaan kultural yang ada diantara mereka bisa saja menjadi penghambat koordinasi global.

Menurut Scholte, selama ini komunitas dibentuk dari proses *othering*, yaitu proses interaksi antara *Self* dan *Other* (2000, 161). Pola ini tidak berubah di era globalisasi, walaupun memang terjadi pergeseran pada hal-hal yang mendasari pembentukan komunitas. Scholte mencatat bahwa identitas kolektif yang selama ini didasarkan pada konsep negara dan

bangsa mengalami pergeseran menjadi sesuatu yang lebih holistik, lebih kosmopolit, dan juga memunculkan banyak “hybrid identities and overlapping communities” (2000, 161).

Telaah Kasus:

Battle of Seattle 1999 dan Reaksi Global dalam Kasus *Flotilla*-Israel

Dari pandangan mengenai terminologi *civil society*, nampaknya gerakan-gerakan massa di era globalisasi ini masih variatif. Gerakan seperti Battle of Seattle lebih tepat diartikan dalam konteks Gramsci dan *neo-liberal civil society* milik Kaldor, terkait *civil society* sebagai pihak ketiga diluar negara dan pasar. Dari deskripsi yang diberikan Armond (2000) terkait kronologi yang terjadi di Seattle, 30 November 1999, ada dua poin penting yang perlu dicatat. Yang pertama bahwa tujuan demonstrasi saat itu adalah menunjukkan oposisi terhadap World Trade Organization (WTO). Yang kedua adalah bahwa, menurut Armond (2000, 232), salah satu penyebab suksesnya gerakan massa saat itu adalah kegagalan polisi dalam menangani persoalan demonstrasi. Dari dua poin ini nampak bahwa demonstrasi di Seattle tersebut amat jelas berada pada level *non-state, non-market*.

Dalam kasus reaksi global terhadap serangan Israel, jelas bahwa yang diinginkan oleh masyarakat adalah tindakan negara. Nieuwhof (2010) mendeskripsikan dengan cukup jelas beberapa contoh reaksi masyarakat yang menginginkan pembukaan blokade Israel atas Gaza dan sanksi internasional terhadap Israel. Negara kemudian seakan tunduk pada kehendak masyarakat. Terbukti dari kecaman yang mengalir dari hampir semua negara. Indonesia, melalui Menlu Marty Natalegawa, mengutuk

serangan Israel tersebut dan akan bekerjasama dengan dunia internasional untuk memastikan Israel bertanggungjawab. Lebih dari itu, Marty mengatakan bahwa Israel melanggar hukum internasional dengan memblokade perairan Gaza (ANTARA, 2010a). Kecaman tidak hanya datang dari Indonesia ataupun negara-negara Muslim yang selama ini mendukung Palestina saja. Perancis, melalui Menlu Bernard Kouchner juga mendesak investigasi terhadap kejadian tersebut (www.timeslive.co.za, 31 Mei 2010). PM Erdogan dari Turki menganggap bahwa tindakan melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia itu harus dihukum dengan semua cara yang ada (ANTARA, 2010b). Dengan begitu, pola-pola reaksi global terhadap Israel berada dalam konteks pandangan Hegel dan de Tocqueville.

Terkait dengan tipe *civil society* yang ada, penulis dalam hal ini melihat kesamaan pola. Baik Battle of Seattle dan reaksi global terhadap serangan Israel menggunakan pola-pola *social movements*. Keduanya mengandalkan protes, demonstrasi, dan penggunaan media dalam aksi-aksinya.⁵ Selain itu, keduanya terdiri dari aktivis-aktivis dan individu-individu yang berkomitmen terhadap tujuan awal gerakan serta keduanya memiliki struktur organisasi yang tidak jelas.

Dikaitkan dengan pandangan Kaldor mengenai tiga tipe *civil society*, maka terdapat suatu variasi yang sama dengan variasi dalam terminologi. Battle of Seattle memang bisa dikategorikan dalam konteks *neo-liberal civil society*, karena tujuannya yang memang menentang dominasi pasar dan juga menekan negara. Namun, konteks reaksi global terhadap Israel tidak berada dalam level neo-liberal, melainkan lebih pada *activist civil society*. Dalam banyak hal, sebenarnya tidak terlalu jelas

⁵Untuk analisis menarik mengenai penggunaan media, baik oleh Israel maupun oleh kelompok demonstran dan relawan, bisa dilihat pada tulisan Friedman (2010).

pembedaan ini. Yang lebih jelas justru argumen sebelumnya dari Kaldor mengenai *social movements*. Oleh karenanya, penulis lebih memilih pandangan bahwa kedua kasus merupakan bentuk *social movements*, bukan sekadar *civil society* biasa.

Mengenai penggunaan strategi *netwar*, Armond (2000, 232) mengatakan bahwa Battle of Seattle telah menjadi inspirasi bagi penggunaan strategi *netwar* di Amerika Serikat. Bahkan, Armond (2000, 232) juga menekankan bahwa *netwar* yang terjadi saat itu telah masuk bukan saja pada ranah *cyberspace*, melainkan sudah sampai pada ranah *infosphere*. Ini berarti, menurut Armond, fenomena saat itu telah berhasil menjadi dasar dari *global sphere*.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Battle of Seattle telah mengilhami gerakan-gerakan massa di tempat lain. Segerstrom (2010) menunjukkan bagaimana pasca Battle of Seattle, ide-ide anti-globalisasi seperti yang diutarakan Naomi Klein menjadi mengemuka. Oates dan Gibson (2006, 8) mengemukakan bahwa keberhasilan saat Battle of Seattle 1999 itu menandai penggunaan strategi koordinasi blokade pengunjung rasa dan taktik lewat internet. Selain itu, penggunaan telepon genggam dan *website* untuk mengoordinasikan logistik demonstrasi dan menyediakan siaran langsung dari lapangan melalui internet menjadi karakter yang nampak dalam pergerakan massa sesudah peristiwa tersebut. Namun, setelah beberapa waktu, apakah kemudian ada upaya sejenis yang berhasil?

Menurut penulis, satu-satunya isu yang bisa menarik dukungan ataupun membentuk opini global hanyalah isu-isu kemanusiaan. Reaksi dunia yang hampir seragam terkait serangan Israel terhadap *flotilla* kemanusiaan menjadi barang yang amat langka ditengah arus globalisasi

ini. Kritikus seperti Eschle (2005, 17) mengatakan bahwa sejak Battle of Seattle, tidak ada lagi gerakan massa yang mampu bergerak secara global. Parsons (2007) juga menyangsikan kemampuan gerakan lain seperti WSF yang muncul dari hasil Battle of Seattle. Lantas apakah memang pola-pola seperti ini menjadi tidak efektif justru di era yang memudahkan informasi secara global? Apakah kemudian strategi yang berbasis internet justru tidak lagi efektif di era, yang menurut Scholte (2000), identik dengan adanya universalisasi, westernisasi, liberalisasi, dan internasionalisasi?

Disinilah kemudian pembahasan dan analisis terkait teori Webster dan permasalahan identitas kolektif menjadi krusial. Menurut penulis, belum ada sebuah identitas kolektif yang menyatukan gerakan sosial secara global. Inilah yang menjadi permasalahan utama mengapa belum ada sebuah gerakan global dari *civil society*. Pendapat ini sebelumnya telah diungkapkan Eschle (2005, 18), walaupun Eschle lebih optimistis dengan menganggap telah ada sebuah gerakan sosial global dengan identitas yang “contested and complex”. Penulis disini justru menganggap bahwa persoalan ketiadaan identitas kolektif inilah yang menjadi penyebab mengapa misalnya, dalam kasus reaksi global terhadap serang Israel kepada *flotilla* kemanusiaan, negara kembali harus turut campur. Bahkan, Enloe (2010) justru menekankan pentingnya peran Amerika Serikat sebagai hegemon dunia untuk menjadi penentu jalannya kasus ini.

Ketiadaan identitas kolektif ini bisa dilihat dari fakta bahwa gerakan-gerakan sosial global biasanya tidak memiliki kejelasan mengenai siapa mereka dan siapa lawan mereka. Identitas biasanya dikaitkan dengan pertanyaan “siapa kita?”, “apa yang kita lakukan?”, dan “siapa mereka?” (Hudson 2007, 104). Tanpa memahami siapa Kita (Self) dan Mereka (Other), maka sulit menentukan identitas kolektif yang mendasari

pergerakan massa ini. Kritik Naomi Klein (2001) bahwa gerakan-gerakan sosial terlalu “...screaming about what it is against...” dan melupakan apa yang sebenarnya harus dilakukan menunjukkan bagaimana gerakan sosial lewat *civil society* ini belum memiliki identitas kolektif. Inilah yang kemudian menjadi penanda ketidakefektifan ini, terbukti dari pernyataan-pernyataan sebelumnya mengenai ketiadaan gerakan baru yang sama dan sekelas dengan Battle of Seattle.

Ini kemudian berimplikasi pada fakta bahwa gerakan *civil society* seperti Battle of Seattle dan terkait serangan Israel pada *flotilla* kemanusiaan hanya berada dalam tataran yang sempit, belum mencakup seluruh konsep Webster mengenai masyarakat informasi. Benar bahwa secara teknologi, masyarakat informasi dalam konteks gerakan massa sudah tercapai. Argumen Oates dan Gibson (2006) bisa dijadikan alasan, bahwa kemajuan teknologi telah memudahkan koordinasi global. Selain konteks teknologi, bisa dilihat pula bahwa kemajuan *cyberspace* dan konsep-konsep *netwar* sebenarnya telah membuat konsep masyarakat informasi ini sampai di level spasial. Ini terbukti dari kemudahan koordinasi antar wilayah yang berjauhan, seakan tidak ada batasan geografis yang menghalangi. Namun, lagi-lagi permasalahan muncul terkait konteks kultural. Belum ada kesamaan pandangan bahwa informasi telah masuk dalam ranah kultural, sehingga sulit kemudian memanfaatkan informasi sebagai penembus kultur ini untuk membentuk identitas kolektif.

Ada beberapa hal yang bisa penulis simpulkan dari analisis diatas, yaitu *pertama*, pola-pola pergerakan melalui jaringan-jaringan informasi telah menjadi fenomena standar di era kontemporer ini. Terbukti dari beberapa upaya seperti Battle of Seattle dan penggalangan reaksi global

mengancam serangan Israel ke *flotilla* kemanusiaan di Gaza menggunakan pola-pola dan strategi *netwar*. *Civil society* yang muncul berupa gerakan sosial dan berada pada posisi menekan negara ataupun pihak ketiga antara negara dan kekuatan pasar. Kedua, secara teoritik, sebenarnya pola-pola seperti ini potensial menjaring massa dengan lebih banyak dan lebih mudah. Ini karena kemajuan teknologi informasi dan karakteristik globalisasi yang memudahkan pertukaran informasi. Ketiga, bahwa ternyata fakta menunjukkan sulit bagi gerakan massa, setelah Battle of Seattle 1999, untuk melakukan koordinasi dan melakukan pola-pola demonstrasi dan protes yang efektif. Keberhasilan penggalangan reaksi global terhadap Israel terbatas pada isu-isu humaniter saja. Sementara isu-isu ekonomi, yang menjadi poin penting *neo-liberal civil society* justru tidak bergaung sama sekali. Keempat, ketiadaan identitas kolektif yang mendasari pergerakan massa menjadi salah satu faktor yang membuat ketidakefektifan gerakan tersebut. Poin ini juga didukung dengan tidak adanya konteks kultural dalam pengembangan masyarakat informasi yang ada saat ini.

Dari beberapa poin simpulan tersebut, penulis memahami bahwa analisis dalam tulisan ini masih terlalu sedikit untuk membuat kesimpulan yang generalistik. Penulis mengakui bahwa perlu adanya studi kuantitatif sebagai dasar analisis, yang mengkaji mengenai kondisi gerakan massa pasca Battle of Seattle. Dari sebuah studi kuantitatif tersebut, barulah kemudian bisa dilakukan analisis mendalam mengenai mengapa terjadi kegagalan atau ketidakefektifan dalam upaya gerakan-gerakan massa di era globalisasi. Oleh karenanya, penulis mendorong upaya-upaya untuk melakukan *single-case studies* dengan analisis mendalam terhadap kasus-kasus unik seperti reaksi global terhadap serangan Israel ke

flotillakemanusiaan di Gaza. Tulisan ini penulis harapkan mampu memberikan gambaran umum mengenai kondisi gerakan massa di era globalisasi dan kaitannya dengan identitas kolektif, sebelum dilakukannya penelitian lebih mendalam.

Referensi

- Anheier, H. et al., 2001. *Introducing Global Civil Society*. dalam: *Global Civil Society 2001*. [online]. dalam: <http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Publications/Yearbooks/2001/2001chapter1.pdf> [diakses 3 Juli 2010].
- ANTARA, 2010a. *Pemerintah Kecam Serangan Israel ke Kapal Kemanusiaan*. [internet] 31 Mei. dalam: <http://www.antaranews.com/berita/1275301784/pemerintah-kecam-serangan-israel-ke-kapal-kemanusiaan> [diakses 3 Juli 2010].
- _____, 2010b. *Attack On Freedom Flotilla Pits Israel Against World Community*. [internet] 2 Juni. dalam: <http://www.antaranews.com/en/news/1275461182/attack-on-freedom-flotilla-pits-israel-against-world-community> [diakses 3 Juli 2010].
- Arquilla, J. & Ronfeldt, D., 2001. *The Advent of Netwar (Revisited)*. Dalam: J. Arquilla & D. Ronfeldt, eds. 2001. *Networks dan Netwar: The Future of Terror, Crime, and Militancy*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Bab 1.
- De Armond, P., 2000. *Netwar in the Emerald City: WTO Protest Strategy and Tactics*. Dalam: J. Arquilla & D. Ronfeldt, eds. 2001. *Networks dan Netwar: The Future of Terror, Crime, and Militancy*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Bab 7.
- Enloe, G., 2010. *Gaza flotilla attack puts blame-Israel world opinion into high gear*. [internet] 1 Juni. dalam: <http://voices.kansascity.com/node/9192/> [diakses 3 Juli 2010].

- Eschle, C., 2005. Constructing 'the anti-globalisation movement'. Dalam: C. Eschle & B. Maiguascha, eds. *Critical Theories, International Relations, and 'the Anti-Globalisation Movement': The Politics of Global Resistance*. New York: Routledge. Bab 1.
- Friedman, G., 2010. *Flotillas and the Wars of Public Opinion*. [internet]. dalam: http://www.stratfor.com/weekly/20100531_flotillas_and_wars_public_opinion [diakses 3 Juli 2010].
- Glasius, M., 2001. *Civil Society: A Brief History*. [internet]. dalam: http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/pdf/Glasius_briefing1.pdf [diakses 4 Juli 2010].
- Hudson, Valerie, 2007. *Foreign Policy Analysis : Classic and Contemporary Theory*. Plymouth : Rowman and Littlefield Publishers, Inc.
- Kaldor, M., 2003. Civil Society and Accountability. *Journal of Human Development*, 4(1), hlm.5-27.
- Klein, N., 2001. *World Social Forum: A Fete for the End of the End of History*. [internet]. dalam: <http://www.commondreams.org/views01/0303-04.htm> [diakses 16 Juli 2010].
- Libicki, M.C., 1995. *What Is Information Warfare?*. Washington, DC: National Defense University.
- Nieuwhof, A., 2010. *Global boycotts of Israel intensify after bloody Flotilla attack*. [internet] 4 Juni. dalam <http://electronicintifada.net/v2/article11318.shtml> [diakses 15 Juli 2010].
- Oates, S. & Gibson, R.K., 2006. The Internet, Civil Society, and Democracy: a comparative perspective. Dalam: S. Oates et al., eds. *The Internet and Politics: Citizens, Voters, and Activists*. New York: Routledge. Bab 1.
- Parsons, A.W., 2007. *Mobilising 'World Opinion' - The Movement of All Movements*. [online]. dalam <http://www.stwr.org/the-un-people-politics/mobilising-world-opinion-the-movement-of-all-movements.html> [diakses 9 Mei 2010].
- Rattray, G.J., 2001. *Strategic Warfare in Cyberspace*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

- Ronfeldt, D. & Arquilla, J., 1999. Noopolitik: A New Paradigm for Public Diplomacy. dalam: N. Snow & P. M. Taylor, eds., 2009. *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. New York & London: Routledge. Bab.29.
- Scholte, J.A., 2000. *Globalization: A Critical Introduction*. Hampshire and London: MacMillan Press Ltd.
- Segerstrom, P.S., 2010. *Naomi Klein and the Anti-Globalization Movement*. [internet] 23 Juni. dalam: <http://www2.hhs.se/personal/segerstrom/naomiklein.pdf> [diakses 15 Juli 2010].
- TIMES Live, 2010. *Israel flotilla action sinks world opinion*. [internet] 31 Mei. dalam: <http://www.timeslive.co.za/world/article479566.ece/Israel-flotilla-action-sinks-world-opinion> [diakses 3 Juli 2010].
- Webster, F., 2006. *Theories of the Information Society*. 3rd ed. London & New York: Routledge.
- Wendt, A., 1994. Collective Identity Formation and the International State. *The American Political Science Review*, 88(2), pp.384-396.
- , 2003. Why a World State is Inevitable. *European Journal of International Relations*, 9(4), pp.491-542.

BAB V

Kesuksesan ISIS:

Manajemen Ekonomi dan Strategi Media Global

Pendahuluan

ISIS merupakan organisasi terorisme yang lebih dari sekedar organisasi teroris dikarenakan ia merupakan gerakan politik dan ideologi dengan merepresentasikan perwujudan khilafah islamiah atau kepemimpinan dunia islam dibawah satu orang(Khalifah) yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi. ISIS sebagai gerakan teroris dapat juga didefinisikan sebagai sebuah gerakan fundamentalis Islam dikarenakan ISIS membawa agenda-agenda fundamental seperti revivalisme paham salafi-jihadi dalam Islam yang mereka gunakan sebagai justifikasi aksi-aksi mereka(Meir Amit, 2014:36). Revivalisme ini menurut Abu Bakar Al Baghdadi hanya dapat dicapai melalui perwujudan negara Islam dengan dasar hukum Syariah yang menaungi. Baghdadi kemudian menerjemahkan hal tersebut dengan mengadakan deklarasi kelahiran Islamic State of Iraq and Greater Syria pada 30 Juni 2014(Mubah, 2015). Sebagai gerakan Fundamentalisme, ISIS berusaha untuk menyebarkan nilai-nilai absolut yang ia pegang, dalam konteks ini adalah nilai-nilai keislaman dan *khilafah islamiyah*.

Manuel Castells dalam tulisannya *Communal Heavens* menyatakan bahwa dalam era globalisasi hal paling penting adalah Identitas dikarenakan identitas merupakan *sources of meaning*. Tanpa identitas maka individu/kelompok tidak akan memiliki makna di tengah dunia yang kabur ini(Castells, 2010:6). Oleh karena itu kehadiran ISIS juga dapat dipahami sebagai upaya kolektif pembentukan identitas

bersama oleh sekelompok orang yang menganut nilai-nilai keislaman. Posisi orang-orang ini berada dalam tekanan arus Westernisasi dan Amerikanisasi yang berujung pada homogenisasi identitas sehingga ketika Al-Baghdadi menyuarakan dibentuknya kekhalifahan Islam dan perwujudan Negara Islam Iraq-Syiria maka banyak orang yang dengan sukarela dan senang hati bergabung.

Keberadaan ISIS juga dapat ditarik kebelakang hingga saat keberadaan Al-Qaeda Iraq(AQI) dibawah pimpinan Abu Musab Al-Zarqawi(Friedland, 2014:6). Pada era tersebut AQI merupakan organisasi teroris yang bersama pemerintahan Saddam Husein berperang melawan pendudukan Amerika Serikat. Keberadaan AQI pada waktu itu merupakan bentuk resistensi terhadap nilai-nilai Amerika Serikat yang semakin mengglobal dan mengancam eksistensi nilai-nilai islam yang mereka junjung. AQI mencapai kejayaannya ketika masa pendudukan Amerika Serikat di Iraq. Pada saat itu AQI secara terang-terangan melakukan perlawanan terhadap keberadaan Amerika di Iraq. Tetapi setelah Amerika meraih kemenangan di Iraq dan setelah terbunuhnya beberapa pemimpin AQI gerakan ini menjadi surut dan cenderung menghilang dalam peta perpolitikan di Iraq. Andrew Phillips kemudian mengkaitkan keadaan ini dengan kelahiran ISIS sebagai sebuah penerus dari gerakan AQI. Ia menyatakan bahwa ISIS lahir akibat adanya *status quo* paska kepergian Amerika dari Iraq, adanya perpecahan dan ketidakstabilan dalam pemerintahan Iraq dan adanya konflik berkepanjangan antara pemerintah dan oposisi di Syria(Phillips, 2014:496). Ketiga faktor tersebut menurut Phillips menjadi titik balik perjuangan AQI dan ISIS secara keseluruhan.

Meskipun pada awalnya ISIS adalah sebuah gerakan teroris yang memiliki afiliasi terhadap AQI tetapi dalam perkembangannya ISIS telah menjadi sebuah gerakan yang jauh lebih sukses dibandingkan pendahulunya tersebut. parameter kesuksesan pertama ISIS dilihat dari kemampuan rekrutmennya. ISIS telah mampu mengumpulkan pejuang lebih banyak dibandingkan AQI. Pada awal terbentuknya ISIS mampu menghimpun lebih dari 30.000 pejuang untuk berjuang bersama ISIS. Sementara AQI pada masa jayanya hanya bisa memobilisasi 1000 hingga 3000 pejuang saja (Gerges, 2014:341). Keberhasilan ISIS dalam rekrutmen ini didasari oleh berhasilnya strategi global ISIS dalam melakukan rekrutmen *foreign fighters* yang secara konsisten berdatangan. Selain itu seringkali para pejuang ini hadir dan rela untuk berjuang bersama ISIS dikarenakan insentif dan janji-janji yang ditawarkan oleh ISIS. Insentif tersebut berupa kesejahteraan dan janji akan kehidupan akhirat yang lebih baik bagi para pengikutnya. Insentif ini dapat diberikan oleh ISIS dikarenakan mereka memiliki sumber pendanaan dan sumber ekonomi yang mencukupi bahkan lebih dari cukup untuk memberikan insentif kepada para pengikutnya. Kuatnya ekonomi ISIS merupakan hasil dari kombinasi manajemen ekonomi dan praktek penjarahan yang mereka lakukan terhadap wilayah yang mereka kuasai.

Selain itu Kesuksesan kedua adalah kesuksesan ISIS untuk menjadi jauh lebih menakutkan dan meresahkan dibandingkan AQI. Masyarakat diseluruh belahan dunia hampir semuanya telah mendengar dan mengetahui praktek-praktek brutal yang dilakukan oleh ISIS. Praktek brutal ini memang dalam skala kecil seperti pembunuhan sandera tidak melalui aksi teror masif yang dilakukan oleh Al-Qaeda misalnya. Tetapi, cara yang digunakan oleh ISIS untuk mengemas ketakutan tersebut

berbeda dibandingkan Al-Qaeda. ISIS menggunakan media massa dan dimensi komunikasi global untuk menyampaikan ketakutan tersebut. ISIS secara khusus menggunakan media yang dekat dengan masyarakat seperti sosial media untuk menyebarkan efek viral dan struktural dari aksi teror yang mereka lakukan (Stalinsky & Sosnow, nd). Manajemen ketakutan yang dilakukan oleh ISIS ini tidak dapat terlepas dari strategi global yang mereka terapkan untuk baik melakukan rekrutmen ataupun untuk menyebarkan aksi teror mereka. ISIS secara khusus juga memiliki majalah untuk menyebarkan propaganda, majalah ini diberi nama DABIQ.

Oleh karena itu dari dua parameter diatas dapat disimpulkan bahwa ISIS telah menjadi sebuah organisasi yang lebih baik dibandingkan pendahulunya yaitu AQI. Tujuan-tujuan yang dibawa ISIS kurang lebih merupakan kepanjangan dari tujuan AQI tetapi di bawah kepemimpinan Al-Baghdadi, ISIS telah menjadi sebuah entitas yang jauh lebih terorganisir dibandingkan AQI. AQI yang masih merupakan kelompok teroris dengan sistem sel dan cenderung tertutup sangatlah berbeda dengan ISIS yang sangat terstruktur dan secara jelas memiliki organisasi yang baik sebagai sebuah negara. ISIS sebagai sebuah kelompok teroris yang menciptakan *pseudo-states* juga telah berhasil menyebarkan teror dan melakukan manajemen ekonomi secara efektif untuk mendukung tujuan utama mereka mewujudkan revitalisasi ajaran salafi-jihadi serta mewujudkan khilafah islamiyah di seluruh dunia.

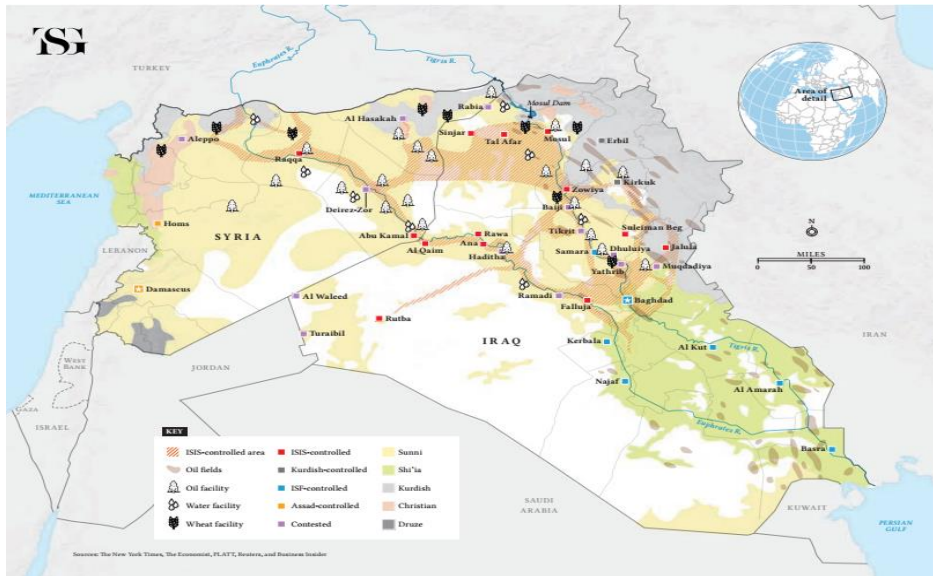
Manajemen Ekonomi ISIS

Salah satu kunci kesuksesan ISIS adalah keberhasilannya menjadi organisasi teroris paling kaya di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa ISIS memiliki total aset kekayaan diantara \$1,3 hingga \$2

Miliar (Meir Amit, 2014; Cohen dalam Levitt, 2014). Dengan total aset tersebut ISIS dengan mudah mengalahkan GDP negara-negara kecil seperti Tonga, Nauru dan Marshall Islands. Selain itu pada Juni 2014 ketika terjadi penangkapan pejabat ISIS Abdurrahman al Bilawi berhasil juga disita dokumen keuangan ISIS yang menyatakan bahwa organisasi tersebut memiliki aset berupa uang tunai sebesar kurang lebih \$875 juta (Barrett, 2014:45). Aset ini diperkirakan bertambah setelah pendudukan ISIS atas Mosul. Hal ini dikarenakan ISIS berhasil menyita dan menduduki bank Sentral Iraq di Mosul, pendudukan ini dikabarkan memberikan tambahan aset \$475 juta kepada ISIS (Barrett, 2014:46). Jumlah kekayaan yang dihimpun oleh ISIS ini merupakan angka yang fantastis dan merupakan prestasi tersendiri bagi sebuah kelompok teroris yang seringkali tidak berfokus pada aspek ekonomi dan keuangan. Seringkali kelompok teror hanya menggantungkan keuangannya pada para pendonor atau ditopang oleh bisnis ilegal. Tetapi ISIS secara khusus memiliki strategi ekonomi yang berbeda dari kelompok teror pada umumnya karena ISIS memiliki keuntungan berupa kontrol teritori yang berdampak pada besarnya pendapatan ISIS dari sektor perdagangan sumber daya alam. Oleh karena itu dalam menjelaskan manajemen ekonomi ISIS penulis membagi sumber pendapatan ISIS ke dalam tiga kategori yaitu sektor sumber daya alam, donasi, dan bisnis kriminal.

Sektor Sumber Daya Alam

Gambar 5.1. Sumber Daya Alam yang dikuasai ISIS



Dalam praktek ekonominya salah satu sumber pendapatan ISIS didapatkan dari hasil penjualan sumber daya alam yang berada dalam wilayah okupasi ISIS. Sumber daya alam utama yang menjadi pemasukan bagi ISIS adalah minyak. Minyak merupakan komoditas utama perdagangan Timur Tengah oleh karena itu ketika ISIS menguasai wilayah-wilayah di Timur Tengah maka secara tidak langsung ISIS mendapatkan kontrol atas minyak yang ada di wilayah tersebut. Iraq merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar keempat di dunia dan memiliki setidaknya 40% cadangan minyak dunia sehingga ketika ISIS menguasai wilayah-wilayah tertentu maka potensi tersebut menjadi milik ISIS.

Dari perdagangan minyak ISIS bisa mendapatkan keuntungan hingga lebih dari \$100 juta dalam satu bulan (Levitt, 2014). Pendapatan

sebesar ini didapatkan dari banyaknya ladang minyak dan kilang minyak yang dikuasai oleh ISIS. Ladang minyak yang dikuasai oleh ISIS tersebar di wilayah Iraq dan Syria meskipun begitu belum ada data pasti mengenai jumlah tersebut akibat terdapatnya kesimpangsiuran data terkait dengan jumlah pasti fasilitas minyak yang dikuasai oleh ISIS. Salah satu sumber menyatakan bahwa ISIS memiliki kontrol terhadap 7 ladang minyak di Syria tepatnya di wilayah provinsi Deir ez-Zor dan Raqqah. Wilayah ini merupakan tempat ladang minyak terbesar Syria yaitu Al-Omar berada bersama wilayah lain seperti Tanak dan Jafra dan kilang lain yang jika digabungkan kesemuanya mampu menghasilkan hingga 60.000 barel minyak setiap harinya. Sementara itu di Iraq berdasarkan data International Energy Agency ISIS mengontrol lebih dari 13 ladang minyak di wilayah Nineveh, al-Anbar, Salaheddiin dan Kirkuk dengan kapasitas ekstraksi hingga 60.000 barel setiap harinya. Selain itu ISIS juga menguasai beberapa kilang minyak di Iraq dan Syria(Brisard and Martinez, 2014:6). Sedangkan sumber lain menyatakan bahwa ISIS hingga Agustus 2014 telah menguasai 350 ladang minyak di Iraq dan 60% ladang minyak di Syria. Produksi minyak mereka telah menyentuh angka 80.000 barel setiap harinya dari ladang minyak tersebut(Levitt, 2014). Tetapi sekalipun terdapat perbedaan jumlah pasti kilang minyak yang dikuasai oleh ISIS, angka-angka diatas telah dapat menunjukkan seberapa besar kapabilitas ekonomi ISIS.

Gambar 5.2.Ladang Minyak yang dikuasai ISIS di Iraq dan Syria



(Islamist Movement.com)

Dari berbagai sumber minyak diatas ISIS setidaknya dapat menjual hingga 50.000 barel minyak setiap harinya dengan harga antara \$25 hingga \$40 di pasar gelap. Penjualan minyak yang dilakukan oleh ISIS kebanyakan terjadi di pasar gelap. Jaringan yang digunakan oleh ISIS untuk menjual minyaknya merupakan jaringan-jaringan lama yang dimiliki oleh Iraq dan Syria. Dalam jaringan tersebut ISIS menjual minyaknya dengan harga murah sehingga para penadah dapat menjualnya kembali dengan harga minyak normal(FATF, 2014:13). Selain itu minyak ISIS juga dijual kepada pembeli ilegal di beberapa negara seperti Turki, Kurdistan dan Jordania(Levitt,2014). Pemanfaatan sumber minyak oleh ISIS juga dilakukan dalam bentuk orientasi internal organisasi yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri guna mencukupi kebutuhan dalam negeri baik kebutuhan sipil maupun militer ISIS. Reorientasi ini dilakukan

karena mulai terdapat kesulitan dalam praktek penjualan minyak kepada pihak luar. Selain keberhasilan penjualan, strategi lain yang diterapkan oleh ISIS dalam manajemen sumber minyaknya adalah kebijakan untuk menggunakan para pekerja lama di ladang dan kilang minyak yang mereka punyai. Dengan begitu mereka dapat membayar para pekerja tersebut dengan harga murah dan tetap secara optimal dapat mengoperasikan kilang-kilang serta ladang minyak secara efektif. Kebanyakan para pekerja bersedia untuk menerima tawaran ISIS ini juga dikarenakan mereka mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan-kesejahteraan(Levitt,2014).

Sumber daya lain yang dimanfaatkan oleh ISIS adalah agrikultur dan bahan tambang lain seperti gas alam dan mineral berharga. Potensi agrikultur yang dimiliki oleh Iraq dan Syria sangatlah tinggi dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur sehingga produksi gandum dan gabah ISIS dapat mencapai hingga \$200juta setiap tahunnya dari pasar gelap(Brisard and Martinez, 2014:8). Gas alam lain yang menjadi sumber pendapatan ISIS adalah fosfor dan sulfur beserta turunannya yang mencapai \$600juta setiap tahunnya, serta Semen yang mencapai \$500juta setiap tahunnya(Brisard and Martinez, 2014:9).

Sektor Donasi

Sektor pendapatan kedua ISIS didapat dari adanya donasi yang mereka terima. Sebagai organisasi terorisme maka salah satu sumber pendapatan utama ISIS adalah donasi dikarenakan sejak awal berdirinya hingga sekarang ISIS telah mendapatkan bantuan dari berbagai macam sumber. Pada kurun waktu 2006 hingga 2009 ISIS dapat mengumpulkan hingga \$40juta dari donasi,dana tersebut berasal dari para pimpinan AQI,

pejuang asing dan penduduk lokal Iraq yang mendukung ISIS(Levitt, 2014:5). Pada periode tersebut donasi merupakan sumber pendanaan paling vital tetapi sekarang sektor donasi bukan sumber utama ekonomi ISIS dikarenakan keuntungan ekonomi dari sektor sumber daya alam dan sektor bisnis gelap lebih besar. Donasi paska tahun 2012 lebih banyak dilakukan oleh individu-individu dan organisasi-organisasi non pemerintah yang memiliki afiliasi dukungan terhadap ISIS seperti dilakukan oleh masyarakat dan kelompok organisasi di wilayah Timur Tengah(Qatar, Arab Saudi, Kuwait)(Levitt,2012:6) dan wilayah-wilayah yang melakukan Bai'at(*pledge of allegiance*) terhadap ISIS(Kelompok Ansar Bayt al Maqdis di Mesir serta Kelompok Abu Sayyaf di Filipina)(FATF, 2015:18).

Pada April 2013 pejabat ISIS menyatakan bahwa sumber donasi utama gerakan tersebut berasal dari negara-negara di kawasan Teluk Persia(Levitt,2015:6). Walaupun tidak secara spesifik disebutkan negara mana yang memberikan donasi tetapi dari data-data yang dikumpulkan oleh David Cohen sumber donasi ISIS mengarah pada beberapa negara utamanya yaitu Qatar dan Kuwait serta beberapa negara arab lain yang masih belum bisa diverifikasi seperti Arab Saudi dan Jordania. Qatar dan Kuwait menjadi target utama donor ISIS dikarenakan kedua negara tersebut memiliki aturan yang cenderung permisif terhadap bantuan terhadap organisasi teror. Amerika Serikat dan negara-negara barat telah berupaya untuk mengurangi celah yurisdiksi tersebut melalui upaya bilateral seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada Arab Saudi sehingga terjadi pengetatan aturan donor terhadap kelompok teror(Humud et.al, 2015:11). Dari Qatar dan Kuwait ISIS diperkirakan mendapatkan dana hingga \$40Juta pada 2014(Levitt, 2014:6).

Selain dalam bentuk donor melalui negara ISIS juga mendapatkan donor dari kegiatan propaganda medianya. Media-media ini diantaranya adalah melalui Skype, Twitter bahkan Ask.fm. Dalam media-media tersebut ISIS secara jelas meminta dukungan dan bantuan dari para pengikutnya. Salah satu donor menyatakan bahwa ISIS dapat meraup keuntungan donasi hingga \$5000 dari satu keluarga yang berafiliasi dengan ISIS(FATF, 2015:24).

Sektor Bisnis Kriminal

Dalam menjalankan kegiatan ekonominya ISIS juga mengusahakan dan menjalankan kegiatan kriminal baik yang berskala besar ataupun berskala kecil. Kegiatan kriminal ini dilaksanakan dalam bentuk pencurian ternak, memberikan paspor untuk pejuang asing, memberlakukan pajak, serta menjalankan bisnis penyiksaan dan penculikan. Dari bisnis-bisnis ilegal ISIS dapat meraup keuntungan \$70juta hingga \$200juta setahunnya(Levitt, 2014:9).

Salah satu usaha yang paling banyak memberikan kontribusi bagi ISIS adalah penarikan pajak. Pajak ini meliputi beberapa aspek seperti : (1) Pajak semua komoditas dagang besarnya antara \$50 hingga \$400, (2) Pajak komunikasi yang dikenakan pada penggunaan sarana jasa telekomunikasi, (3) Pajak penarikan bank yang dikenakan kepada orang-orang yang melakukan penarikan uang pada bank tertentu, (4) Pajak penghasilan keseluruhan pendapatan yang besarnya 5%, (6) Pajak jalan sebesar \$200 di wilayah Iraq Utara, (7) Pajak masuk \$800 per kendaraan yang memasuki wilayah ISIS, (8) Pajak situs arkeologi dikenakan kepada banyak situs-situs arkeologi yang dimiliki oleh ISIS, diperkirakan dari hasil penjualan artefak kuno ISIS mendapatkan keuntungan hingga \$50juta dan

yang terakhir adalah Pajak bagi perlindungan masyarakat non muslim yang disebut Jizya yang besarnya \$720 setiap kepalanya (Brisard and Martinez, 2014:5).

Bisnis lain yang merupakan ciri khas ISIS adalah bisnis kekerasan dan penyiksaan yang mereka lakukan. Bisnis penyanderaan ISIS dapat menghasilkan dana hingga \$132,5 dari satu penyanderaan. Jumlah tersebut diajukan oleh ISIS kepada keluarga jurnalis Amerika James Foley yang pada akhirnya terbunuh. Pada kasus lain pemerintah Perancis misalnya bersedia membayar hingga \$18 juta untuk menebus keempat jurnalis mereka yang tertangkap, penduduk lokal di sisi lain dikabarkan bersedia membayar \$500 hingga \$200.000 setiap kasus penyanderaannya. Tetapi sekalipun bisnis penyanderaan berpotensi menghasilkan pemasukan yang besar bagi ISIS tetapi tingkat penyerapannya sangat rendah akibat tidak semua negara dan tidak semua keluarga sandera bersedia membayarkan tebusan. Di sisi lain terdapat juga negara-negara yang bersedia membayar tebusan tersebut dalam bentuk lain seperti dalam pemberian bantuan melalui proxy atau dalam bentuk bantuan pembangunan yang secara tidak langsung tidak berdampak pada perekonomian ISIS (Humud et.al, 2015:10).

Strategi Media Global ISIS

Parameter kedua yang membuat ISIS lebih berhasil dibandingkan pendahulunya yaitu Al-Qaeda dalam perwujudan gerakan teror adalah keberhasilannya dalam mengusahkan strategi global. Strategi global ini dilakukan oleh ISIS dengan cara menggalakkan aktivitas melalui media sosial baik itu aktivitas rekrutmen ataupun aktivitas persebaran teror. Secara khusus ISIS dianggap sukses dalam memanfaatkan dan

mengeksploitasi media sosial yang ada. Hal ini dilakukan oleh ISIS melalui berbagai macam akun media sosial resmi dan departemen media yang secara khusus menangani permasalahan propaganda dan media informasi. Penggunaan media sosial oleh ISIS ini setidaknya memiliki sembilan tujuan utama yaitu (1) melakukan konstruksi terhadap media dan perhatian internasional untuk menyampaikan pesan dan tujuan mereka, (2) melakukan kontrol terhadap dimensi naratif masyarakat melalui kontrol media (dibandingkan dengan kontrol teritori hal ini dipandang oleh ISIS sebagai lebih efektif), (3) melakukan perlawanan terhadap gerakan penentang ISIS utamanya negara-negara barat, gerakan Shiah muslim atau gerakan jihad tandingan serta melawan propaganda untuk menjatuhkan ISIS, (4) melakukan kontestasi dengan kelompok jihad lain dalam ranah media guna menunjukkan bahwa ISIS jauh lebih superior dibandingkan dengan gerakan lain, (5) Untuk menjembatani dan memfasilitasi jaringan pendukung ISIS, (6) Untuk melakukan rekrutmen, (7) Untuk melakukan intimidasi dan menyebarkan teror terhadap masyarakat, (8) sebagai ajang demonstrasi kapabilitas jaringan dan struktur mereka serta yang terakhir adalah (9) Untuk penggalangan dana (Nissen, 2014:4).

Oleh karena itu dalam menjalankan strategi tersebut, ISIS memiliki target penonton tersendiri yang coba dipengaruhi yaitu (1) Simpatisan dan supporter (untuk memperluas dukungan dan jaringan), (2) Calon potensial simpatisan, (3) Para pendonor, (4) Media Internasional, (5) Penonton lokal untuk memperkuat propaganda dan yang terakhir adalah (6) komunitas internasional (Nissen, 2014:4).. Keenam calon potensial seringkali memiliki tingkat keaktifan dan kepekaan yang berbeda dalam setiap media sosial yang digunakan oleh ISIS. Oleh karena itu ISIS secara komprehensif menggabungkan penggunaan beberapa media

sosial untuk menjalankan aksinya tersebut. Media-media tersebut diantaranya adalah Twitter, Youtube, Facebook, Ask.fm, dan Instagram serta beberapa forum online.

Selain itu dalam penggunaan media sosialnya, ISIS memiliki setidaknya tiga perintah utama yang ia coba sebarkan kepada masyarakat luas utamanya kepada para calon pengikut ISIS yaitu (1) seruan untuk melakukan Hijrah dengan berpindah ke wilayah teritori ISIS dan berjuang bersama, (2) Melakukan Bay'at atau melakukan deklarasi loyalitas dan membuat komunitas pendukung ISIS di wilayah tersebut, serta yang terakhir adalah (3) Pelaksanaan serangan independen yang disebut sebagai *lone wolf attacks* yaitu praktek serangan dan agresi di tempat tertentu terhadap musuh-musuh ISIS(McFate et.al, 2014:3).

Hingga Agustus 2014 aktivitas ISIS dalam Twitter merupakan yang paling aktif dibandingkan kelompok militan lainnya. Tetapi kemudian ISIS merubah strateginya menjadi lebih sporadis dan cenderung menggunakan akun-akun pribadi dan privat untuk menghindari permintaan blokir Amerika terhadap Twitter dan akun media sosial resmi lainnya(Lister, 2014:24-26). Meskipun begitu hingga kini ISIS masih mendapatkan perhatian yang besar dalam media sosial. Melalui twitter misalnya ketika telah terdapat permintaan blokir Amerika tetapi data yang dihimpun oleh J.M Berger dan Jonathan Morgan dalam tulisannya "ISIS Twitter Census" menyatakan bahwa masih terdapat banyak sekali akun yang berafiliasi dengan ISIS. Berger & Morgan menuliskan bahwa terdapat setidaknya 46.000 akun yang mendukung ISIS dan secara tidak langsung menyebarkan ajaran-ajaran mereka tersebut(Berger & Morgan, 2015:6). Akun-akun tersebut memiliki setidaknya 100 hingga lebih dari 1000 pengikut sehingga jika dikalkulasikan secara kasar maka pesan

berantai ISIS melalui media Twitter telah tersampaikan kepada lebih dari 4.600.000 orang di seluruh dunia. Angka ini sangat fantastis dibandingkan kelmopak-kelompok teror lain yang cenderung kurang responsif terhadap media sosial.

Selain dalam media Twitter ISIS juga aktif berpartisipasi dalam Skype untuk melakukan fungsi rekrutmen dan wawancara pendukung guna mendapatkan pengikut. Media Skype juga seringkali digunakan untuk mencari sumber donor potensial yang dapat membantu perekonomian ISIS (Stalinsky & Sosnow .nd:67). Media lain yang digunakan oleh ISIS adalah Youtube karena seringkali melalui situs video itu ISIS menyebarkan video-video pemenggalan hingga video-video kekerasan yang bertujuan untuk mempertegas legitimasi teror yang ia miliki. Penggunaan media Ask.fm juga merupakan media yang cukup efektif dikarenakan dalam situs media sosial yang menekankan kepada interaksi anonim tersebut para pendukung ISIS dapat berinteraksi secara langsung terhadap masyarakat umum yang nantinya bisa diarahkan dan dibimbing menuju calon pendukung potensial.

Selain itu media propaganda efektif ISIS lainnya adalah publikasi tertulisnya melalui majalah DABIQ. Majalah ini merupakan majalah buatan ISIS yang digunakan untuk menyebarkan seluk-beluk dan berita mengenai ISIS dan secara tidak langsung berusaha mempengaruhi masyarakat untuk mendukung ISIS. Salah satu tulisan yang menunjukkan propaganda ISIS tertuang dalam Issue2 majalah *Dabiq* yang berisi :

“If you cannot perform hijrah (immigrate to the Islamic State) for whatever extraordinary reason, then try in your location to organize bay’at (pledges of allegiance) to the Khalifah Ibrahim. Publicize them as much as possible. Gather people in the masjid, Islamic centers, and Islamic organizations, for example, and make public

announcements of bay'ah. Try to record these bay'ah and then distribute them through all forms of media including the Internet. It is necessary that bay'ah becomes so common to the average Muslim that he considers those holding back as grossly abnormal...if you live in a police state that will arrest you over such bay'at, then use means of anonymity to convey your bay'ah to the world."(McFate et.al, 2014:5).

Keberhasilan Manajemen Ekonomi dan Strategi Media Global ISIS

Dari pemaparan data mengenai manajemen ekonomi dan strategi media global diatas penulis berkesimpulan bahwa ISIS telah menjadi sebuah gerakan terorisme yang jauh lebih kompleks dan terorganisir dibandingkan dengan gerakan-gerakan teror lain yang pernah muncul di dunia. Disamping bentuknya yang memang cendeung mengaraha kepada *pseudostates* jika tidak sebuah negara tetapi harus diakui bahwa ISIS mampu melakukan manajemen jaringan dan struktur dengan sangat baik. Al-Qaeda sebagai gerakan teror yang cukup kompleks jaringan dan sel nya tidak mampu menunjukkan kemampuan manajemen ekonomi dan strategi media global yang mampu menandingi ISIS. Al-Qaeda hanya mendapatkan perhatian dan menjadi pembicaraan dunia ketika terjadi aksi kekerasan dan aksi serangan tertentu saja tetapi diluar itu Al-Qaeda bergerak dalam jaringannya saja. Berbeda dengan ISIS yang sepanjang waktu dapat terus menjadi ancaman konstan yang akan selalu hadir dalam masyarakat. strategi media global yang digunakan oleh ISIS juga dapat menjadi bentuk kejeniusan para peramu kebijakan di dalam ISIS. Hal ini dikarenakan ISIS telah mampu membaca pola dan menerapkan strategi efektif dalam realitas dunia yang semakin mengglobal dan semakin

modern ini. Strategi ini seringkali disebut sebagai postmodern strategy yang memasukkan aspek-aspek revolusi informasi ke dalam konsiderasi strategis organisasi ISIS. Era globalisasi dan revolusi informasi yang terjadi juga membuat ancaman dan teror yang dihadirkan oleh ISIS cenderung bersifat pasif dalam artian ia selalu dapat kita temui dalam berbagai media sosial. ISIS juga di sisi lain bersifat aktif karena dalam setiap media sosial tersebut ISIS akan selalu berusaha untuk menyebarkan gerakannya jika tidak menyebarkan teror secara umum.

Indikator keberhasilan strategi global ISIS juga dapat dilihat dari semakin banyaknya pendukung dan loyalis ISIS yang bergabung melalui Bay'at, kelompok-kelompok ini diantaranya adalah Mujahidin Indonesia Timor dari Indonesia, Gerakan Jihad dan Khalifah Pakistan, Kelompok Abu Sayyaf, Ansar al-Khalifah dan Bangsamoro Islamic Freedom Fighters di Filipina, Jund al Khilafah di Mesir, Islamic Movement of Uzbekistan dan berbagai gerakan lain. Selain itu dalam upaya penyebaran propaganda *lone-wolf* ISIS telah berhasil menghasilkan serangan-serangan terhadap musuh ISIS utamanya pada negara-negara barat, seperti ketika British Islamic State Fighters mendeklarasikan gerakan *lonewolf* di Inggris, adanya upaya-upaya penyerangan terhadap ulama yang pro terhadap *war on terror* di Inggris, adanya gerakan ISIS di Perancis yang membuat basis komunitas tersendiri hingga berdirinya kelompok pendukung ISIS di Amerika Serikat sendiri (McFate et.al, 2014:7).

Hasil propaganda dan Teror-teror yang diberikan oleh ISIS melalui strategi media globalnya juga merupakan hasil dari baiknya manajemen ekonomi yang dimiliki oleh ISIS. Kemampuan manajemen ekonomi ISIS dapat menjadi baik dikarenakan memang ISIS memiliki modal sumber daya yang melimpah di wilayah-wilayah yang mereka jajah.

Sumber daya ini utamanya adalah mineral dan gas alam yang menyumbang hingga \$1 Miliar pendapatan ISIS. Selain itu dalam pengelolaan sumber daya alamnya ISIS menerapkan strategi penggunaan pekerja lama sehingga biaya produksinya dapat lebih efektif tanpa harus mencari pekerja baru dari luar negeri. Selain itu ISIS juga mampu memanfaatkan berbagai potensi ekonomi yang dimilikinya seperti pemanfaatan situs-situs arkeologi dan pemanfaatan ladang-ladang agrikultur di Iraq dan Syria. Akibatnya ISIS juga meraup keuntungan dari hasil penjualan barang-barang kuno yang nilainya dapat menyentuh hingga \$40juta. Produk agrikultur ISIS di sisi lain memberikan pemasukan hingga \$400juta setiap tahunnya melalui penjualan gabah dan gandum di pasar gelap.

Selain manajemen sumber daya yang baik, perekonomian ISIS juga ditopang oleh para pendonor yang telah lama memberikan donasi kepada ISIS. Nilai donasi ini memang tidaklah begitu besar dibandingkan dengan aset sumber daya alam yang dimiliki oleh ISIS, tetapi ISIS telah mampu menyalasi hal tersebut dengan menjalankan metode baru pencarian donasi melalui media sosial seperti Skype, Facebook dan Twitter untuk mendapatkan bantuan donor secara efektif. Hal ini mengantisipasi batasan aturan yang diberlakukan terhadap pendonor-pendonor di kawasan negara Timur Tengah akibat sanksi Amerika Serikat. Hal lain yang menjadikan ISIS jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok jihad lainnya adalah kemampuan ISIS untuk menerapkan pajak terhadap hampir berbagai hal dalam negara Islam tersebut. Keberadaan pajak juga memberikan arus keuangan yang secara konstan dan rutin mengalir. Meskipun rakyatnya telah dikenai pajak tetapi masyarakat masih banyak yang mendatangi ISIS dan melakukan hijrah ke

wialyah tersebut. Hal ini dikarenakan ISIS juga memberikan gaji dan insentif yang besarnya bermacam-macam kepada para pejuang yang bersedia untuk hijrah ke wilayah ISIS. Praktek pemberian insentif ini juga merupakan contoh keberhasilan ISIS dalam mengelola jaringannya. Dikarenakan para pendukungnya akan tetap loyal dan terjamin karena kebutuhan-kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Oleh karena itu dari fakta dan analisis diatas dapat dipahami bahwa dalam waktu setidaknya satu atau dua dekade ke depan ISIS masih akan menjadi gerakan teror yang tersktrutur dan terorganisir dengan baik dibandingkan dengan organisasi teror lainnya di dunia. Hal ini dapat terjadi akibat baiknya manajemen ekonomi dan strategi media global yang mereka terapkan. Tetapi akibat ISIS terlalu berfokus pada sumber daya yang jumlahnya terbatas dan berfokus pada media sosial yang sangat fluktuatif bukan tidak mungkin juga kedua kelebihan ISIS tersebut dapat menjadi titik kelemahan dan awal mula kehancuran ISIS.

Referensi

- Barrett, Richard. 2014. *The Islamic State*. The Soufan Group.
- Berger J.M dan Jonathon Morgann. 2015. *The ISIS Twitter Census Defining and describing the population of ISIS supporters on Twitter*. "The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World Analysis Paper | No. 20, March 2015
- Brisard, Jean-Charles and Damien Martinez. 2014. *Islamic State: The Economy-Based Terrorist Funding*. Thompson Reuters Publisher.
- Castells, Manuel. 2010. *The Power of Identity*. Blackwell Publishing : West Sussex.

- FATF. 2015. *Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)*. Financial Action Task Force Report February 2015
- Gerges, Fawaz A. .2014. *ISIS and the Third Wave of Jihadism*. nm
- Humud, Carla. E ; Robert Pirog & Liana Rosen. 2015. *Islamic State Financing and U.S. Policy Approaches*. Congressional Reserach Service : Washington
- Levitt, Matthew. 2014. *Terrorist Financing and the Islamic State*. Testimony submitted to the House Committee on Financial Services November 13, 2014.
- Lister, Charles. 2014. *Profiling the Islamic State*. Brookings Doha Center Analysis Paper Number 13, November 2014
- McFate, Jessica Lewias ; Harleen Gambhir and Evan Sterling. 2014. *ISIS's Global Messaging Strategy Fact Sheet*. Institute for The Study of War.
- Mubah, Safril. 2015, "Terorisme from Al-Qaeda to ISIS" dalam Kuliah Masalah-Masalah Non Organisasional Lintas Batas, Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Mei 2015.
- Nissen, Thomas Eikjer. 2014 . *Terror.com - IS's Social Media Warfare in Syria and Iraq*. Military Studies Magazine Danish Defence Issue 2, Volume 02, 2014.
- Phillips, Andrew. (2014). The Islamic State's Challenge to International Order. *Australian Journal of International Affairs*. 68:5, 495-498, DOI: 10.1080/10357718.2014.947355
- Richards, Anthony . (2014). Conceptualizing Terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*. 37:3, 213-236, DOI: 10.1080/1057610X.2014.872023
- Stalinsky, Steven and R. Sosnow. .nd. *From Al-Qaeda To The Islamic State (ISIS), Jihadi Groups Engage in Cyber Jihad: Beginning With 1980s Promotion Of Use Of 'Electronic Technologies' Up To Today's Embrace Of Social Media To Attract A New Jihadi Generation*. The Middle East Media Research Institute.
- The Meir Amit Intelligence. 2014. *ISIS: Portrait of a Jihadi Terrorist Organization*. The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center.

BAB VI

Strategi di Era Pos-Modern: Perang Informasi dalam Konflik Negara dengan Kelompok Separatis

Pendahuluan

Studi mengenai strategi dalam konteks Hubungan Internasional selama ini sering dikaitkan dengan pembahasan mengenai perang. Itulah sebabnya mengapa para teoretisi mengenai strategi di era strategi klasik seperti Sun Tzu, Carl von Clausewitz, Liddell Hart, dan Henri de Jomini serta Macchiavelli selalu menggunakan kata "War" sebagai bagian integral dari judul buku mereka. Sun Tzu dengan "Art of War", Clausewitz dengan "On War", dan Macchiavelli dengan "The Art of War". Dari anggapan ini, bisa disimpulkan bahwa perubahan dalam konsep perang juga akan mengubah konsep strategi yang digunakan.

Krepinevich (1994) misalnya, menganggap bahwa perubahan dalam peperangan yang terjadi seiring dengan *revolution in military affairs* (RMA) amat potensial mengubah strategi. Gray (2003) bahkan menekankan bahwa menyusun strategi merupakan hal yang amat sulit, karena masa depan hampir tidak mungkin diprediksi. Disinilah kemudian pentingnya analisis mengenai strategi di era kontemporer, terutama yang terkait dengan revolusi teknologi informasi.

Mengapa kemudian penulis mengangkat isu ini? Salah satu alasannya adalah adanya perubahan pola peperangan di era kontemporer ini. Perang virtual⁶ (Derian 2000; Ignatieff 2000) yang didasarkan pada

⁶Ada perbedaan mendasar antara definisi menurut Der Derian maupun Ignatieff. *Virtual war* (istilah yang digunakan Ignatieff) dianggap lebih terkait dengan perkembangan

perkembangan pesat teknologi informasi dalam peperangan, nampak nyata pada Perang Teluk tahun 1991 serta Perang Kosovo tahun 1999. Webster (2006) bahkan menyebutkan pola perang baru ini sebagai *information warfare*, dengan karakteristik semacam munculnya *knowledge warriors*, pentingnya *perception management*, penggunaan teknologi tingkat tinggi, adanya *cyberwar*, dan sifat perang yang *pre-programmed* (telah dirancang jauh hari sebelum perang berlangsung).

Dari sinilah kemudian, penulis mencoba menganalisis sejauhmana perubahan dalam konsep peperangan ini mempengaruhi studi mengenai strategi dan seberapa strategiskah strategi yang digunakan di era ini. Lebih lanjut, untuk melakukan analisis tersebut, penulis memfokuskan diri pada fenomena konflik antara negara dengan kelompok-kelompok separatis dalam kasus Chechnya dan Papua. Ini dikarenakan konflik tersebut dianggap merupakan sebuah *irregular warfare*, yang merupakan salah satu penanda era perang posmodern.

Tulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama merupakan latar belakang dan pendahuluan yang mengarahkan pada pentingnya telaah mengenai strategi di era informasi ini. Bagian kedua berisikan konsep-konsep penting mengenai perang dan strategi, serta perubahan yang terjadi di era informasi ini. Bagian ketiga tulisan berisikan mengenai konsep perang informasi dan strategi *netwar*. Bagian keempat menganalisis sejauhmana kemudian perubahan di era informasi mengubah strategi yang digunakan oleh negara dalam melakukan *counter* terhadap strategi kelompok separatis dan seberapa strategis sebenarnya strategi yang

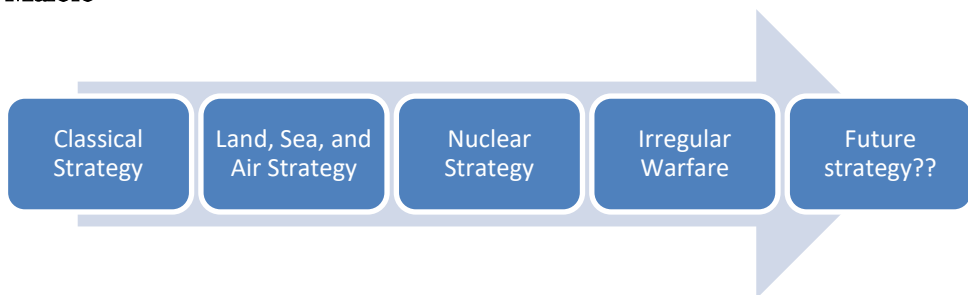
teknologi informasi dan lebih teknis, sedangkan *virtuous war* (istilah lain yang lebih sering digunakan Der Derian) mencakup baik aspek teknis maupun etika. Lebih lanjut lihat Der Derian (2000) dan Ignatieff (2000).

digunakan itu. Sementara bagian kelima merupakan kesimpulan dari tulisan ini.

Perang dan Strategi: Perkembangan Konsep

Studi mengenai strategi, dalam perkembangannya, bisa dibagi menjadi beberapa tahapan. Thomas Mahnken dan Joseph Maiolo (2008) memberikan paling tidak lima tahapan perkembangan studi strategis. Untuk memudahkan, penulis menggambarkan (dengan beberapa simplifikasi), perkembangan studi strategis menurut Mahnken dan Maiolo. Gambar 1 menggambarkan proses perkembangan, yang bukan merupakan sebuah proses historis, melainkan perkembangan pemikiran.

Gambar 6.1. Perkembangan Studi Strategis Menurut Mahnken dan Maiolo



Tahapan pertama menurut Mahnken dan Maiolo adalah era strategi klasik, yang merupakan dasar terbentuknya studi strategis modern (2008, 51). Mahnken dan Maiolo memberikan beberapa contoh strategi klasik yang menurut mereka menggambarkan konteks strategi klasik, melalui tulisan Sun Tzu dan Liddell Hart. Pemikiran Sun Tzu mengenai perang menjadi salah satu sumber awal studi strategis. Sun Tzu mengatakan bahwa perang adalah hal yang sangat penting bagi negara (1963, 53); bahwa yang terpenting bukanlah mengalahkan musuh melainkan menghancurkan moral dan keinginan berperangnya. Liddell

Hart mengembangkan konsep Sun Tzu bahwa “...the perfection of strategy would be...to produce a decision without any serious fighting...” (Mahnken & Maiolo 2008, 51). Dengan begitu, ada satu karakteristik yang menurut penulis menggambarkan konsep strategi klasik, yaitu bahwa strategi klasik memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana memenangkan perang dan bagaimana cara berperang. Bagi Mahnken dan Maiolo, strategi dalam pengertian klasik ini memberikan dasar bagi munculnya studi strategis di era selanjutnya (2008, 105).

Era berikutnya menurut Mahnken dan Maiolo adalah era teknologi dan perang, ketika kemajuan teknologi mengubah pandangan mengenai perang (2008, 105). Konsep mengenai *land power*, *maritime power*, dan *air power* menjadi konsep-konsep penting studi strategis yang terutama banyak muncul di era Perang Dunia I dan II. Konsepsi Fuller mengenai kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam peperangan (Reid, 1978), konsep Corbett mengenai kekuatan laut dalam perang (1988) yang dalam banyak hal dipengaruhi konsep Mahan dan pemikir-pemikir maritim sebelumnya, serta konsep kekuatan udara dalam perang yang diberikan oleh Overy (1992) serta Byman dan Waxman (2000) yang dipengaruhi pendekatan *air power* dalam geopolitik oleh Seversky, menjadi gambaran bahwa periode selanjutnya dalam studi strategis sangat terkait dengan penggunaan teknologi baru dalam peperangan. Konsep mengenai teknologi dalam perang ini kemudian menjadi dasar studi strategis era selanjutnya, yaitu era nuklir.

Nuklir, yang menjadi penanda perubahan konteks dunia pasca Perang Dunia II, menjadi dasar analisis studi strategis era nuklir, atau yang sering juga disebut *nuclear strategy*. Nuklir, menurut Bernard Brodie, mengubah konsep mengenai perang yang selama ini ditekankan oleh

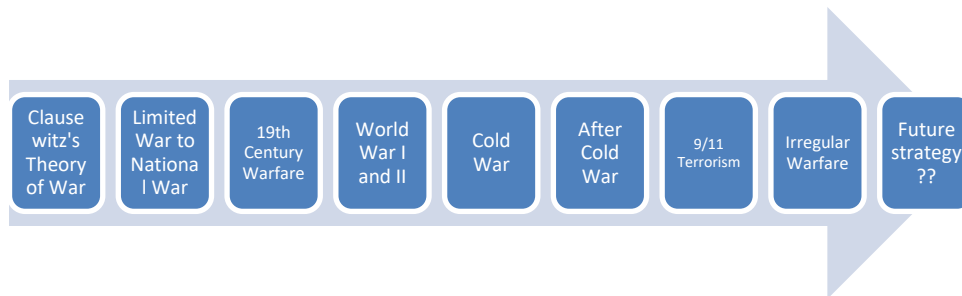
pemikir-pemikir klasik (1946). Hal ini terutama dikaitkan dengan kemampuan nuklir menghancurkan sasaran hanya dengan sekali serang. Namun, pandangan Brodie ini tidak begitu saja diterima. Colin Gray mengatakan bahwa walaupun memang terjadi perubahan dalam hal pandangan strategis terkait perang dan nuklir, namun pandangan bahwa elemen-elemen strategi dan perang yang ada di era sebelumnya tidak lagi relevan tidak didasarkan dengan pandangan historis yang kuat (2006, 22). Perang tetap ada, walaupun bukan antara kekuatan besar nuklir, dan pola-pola strategi perang tetap berada dalam koridor yang sejalan dengan pandangan klasik.

Bila era sebelumnya selalu terkait dengan perang, yang kemudian dilanjutkan dengan perang nuklir, maka perkembangan studi strategis kemudian diwarnai dengan *irregular warfare* dan *small wars*. Perang tidak lagi dikaji dalam konteks perang besar antar negara melainkan dalam konteks perang gerilya, perang-perang melawan gerakan separatis, perang melawan pemberontakan, dan terorisme (Mahnken & Maiolo 2008, 241). Kondisi ini kemudian, menurut Mahnken dan Maiolo, mengantar kita pada pandangan mengenai *future warfare* terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan kemungkinan bahwa strategi, dalam hal ini strategi perang yang didasarkan pada pandangan klasik, telah kehilangan makna di era globalisasi ini (2008, 361-362).

Sedikit lebih kompleks dari Mahnken dan Maiolo, Colin Gray mencoba menunjukkan bahwa konsep mengenai strategi, terutama yang terkait dengan strategi perang, mengalami perkembangan yang cukup panjang. Studi strategis menurutnya, dalam lingkup Hubungan Internasional, terkait dengan penggunaan kekuatan dalam pencapaian

tujuan (Gray, 2007, p.1). Gambaran singkat mengenai perkembangan studi strategis menurut Gray bisa dilihat pada Gambar 2.

Gambar 6.2. Perkembangan Studi Strategis dan Perang menurut Colin Gray



Secara umum, pandangan Gray (2007) sejajar dengan pandangan Mahnken dan Maiolo mengenai perkembangan studi strategis. Hanya saja, Gray menelaah dengan lebih detail terkait fakta bahwa perkembangan studi strategis, dan juga studi Hubungan Internasional, bersejajaran dengan perkembangan perang yang terjadi di dunia.

Dari studi mengenai perang dan strategi, dapat disimpulkan bahwa studi strategis, terutama dalam konteks Hubungan Internasional, memang selama ini selalu terkait dengan perang dan konsep-konsep militer. Ini menegaskan apa yang diutarakan Gray bahwa sering terjadi kesalahan dalam konsep strategi, antara yang militeristik atau merupakan *grand strategy* (2007, p.1). Mengingat konsep awal strategi, bahwa strategi merupakan sebuah terminologi yang berasal dari bahasa Yunani kuno dengan arti seorang komandan perang di Athena (Ghyczy, et al., 2001, p.30); jenderal yang terpilih (*Encyclopædia Britannica*, 2010); dan “generalship” (Nickols, 2003); maka tidaklah mengherankan ketika strategi banyak terkait dengan perang.

Perang Informasi: Perdebatan Konseptual

Setelah di bagian sebelumnya membahas mengenai perkembangan studi strategis dan kaitannya dengan perang, di bagian ini penulis membahas mengenai konsep perang informasi dan perdebatan konseptual yang muncul mengenai perang informasi ini. Rattray (2001) dengan canggih mampu menggambarkan perdebatan mengenai konsep perang informasi ini. Rattray (2001, 9) mengatakan bahwa biasanya *information warfare* dipahami secara luas, seperti pemahaman bahwa perang informasi merupakan penggunaan informasi untuk pencapaian tujuan nasional (Stein 1995, dalam Rattray 2001, 9). Alger menganggap bahwa perang informasi mencakup kejahatan finansial, pengumpulan data intelijen, dan ancaman-ancaman teroris (Alger 1994, dalam Rattray 2001, 9). Libicki (1995) mengidentifikasi tujuh bentuk perang informasi, yaitu *command and control warfare*, *intelligence-based warfare*, *electronic warfare*, *psychological warfare*, *hacker warfare*, *economic information warfare*, dan *cyberwarfare*.

Libicki (1995) juga memberikan tiga pemahaman mengenai fenomena perang informasi. Yang pertama, bahwa perang informasi tidak selalu tergantung pada kemampuan teknologi informasi yang dimiliki. Informasi bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dan terus dipertahankan, melainkan selalu berubah dan berpotensi untuk dikuasai oleh pihak lain. Kedua, bahwa fungsi dari korps informasi pada militer bukanlah untuk bertempur dengan pihak lain, melainkan untuk mencapai kepentingan negara ataupun kelompoknya. Ketiga, pengetahuan mengenai kondisi pihak lain menjadi kunci dalam pelaksanaan perang informasi.

Terkait perang informasi ini, Ronfeldt dan Arquilla (1999) mengemukakan tiga area yang terkait dengan pentingnya informasi di era

kontemporer. Yang pertama adalah cyberspace. *Cyberspace* disini dimaknai sebagai:

“...global system of internetted computers, communications infrastructures, on-line conferencing entities, databases, and information utilities... mostly means the Internet... may also be used to refer to the electronic environments and critical infrastructures of a corporation, military, government, or other organization” (Ronfeldt & Arquilla 1999, 353).

Dalam konteks *cyberspace*, perang informasi adalah upaya mengamankan *cyberspace* milik internal, dan upaya mengeksploitasi kelemahan *cyberspace* milik pihak lain (Ronfeldt & Arquilla 1999, 353). Konteks yang dianggap lebih tinggi dari sekedar *cyberspace* adalah *infosphere* dan *noosphere* (Ronfeldt & Arquilla 1999, 353-354). *Infosphere* adalah konteks ketika informasi menjadi dasar ruang global, tidak saja berada dalam level *cyberspace* melainkan juga semua hal terkait informasi seperti media, perpustakaan manual, dan institusi yang belum melakukan digitalisasi. Sementara itu, *noosphere* adalah konsep yang paling abstrak, dalam artian bahwa bukan saja informasi yang menjadi penting namun “mind” menjadi pembentuk ruang global. Namun, konteks perang informasi saat ini masih berada pada tataran cyberspace, sehingga belum sampai pada konteks pikiran sebagai pembentuk ruang global.

Terkait hal ini, Ronfeldt dan Arquilla pada tahun 1993 mengemukakan konsep *netwar* untuk menjelaskan fenomena strategi penggunaan jaringan-jaringan dan teknologi informasi dalam pencapaian kepentingan kelompok-kelompok tertentu (Ronfeldt & Arquilla 2001, 2). Pengertian *netwar* sendiri menurut Ronfeldt & Arquilla (2001, 6) adalah:

“...an emerging mode of conflict (and crime) at societal levels, short of traditional military warfare, inwhich the protagonists use network forms of organization and

related doctrines, strategies, and technologies attuned to the information age...”

Dari pemaparan di bagian ini, penulis menyimpulkan bahwa strategi penggunaan jaringan informasi telah menjadi strategi baru di era kontemporer ini. Strategi ini menjadi penting dalam era perang informasi karena, mengutip Libicki (1995), informasi bukanlah suatu hal yang bisa terus menerus dikuasai oleh kekuatan teknologi saja. Oleh karenanya, jaringan menjadi amat penting dalam strategi *netwar* ini. Apalagi, mengutip Ronfeldt dan Arquilla (2001), perang informasi di *cyberspace* lebih sesuai dengan aktor-aktor non-negara. Tentunya kasus yang diangkat penulis, terkait strategi kelompok separatis menjadi lebih relevan. Yang kemudian menarik, menjadi pembahasan di bagian selanjutnya, adalah bagaimana negara menyusun kontra-strategi terhadap strategi *netwar* ini. Apakah negara menggunakan strategi perang informasi juga? Ataukah negara memiliki strategi lain? Seberapa strategis kemudian strategi negara tersebut?

Strategi Perang Informasi: Antara Negara dan Kelompok Separatis

Di bagian ini, penulis menganalisis strategi kelompok separatis, dalam penelitian ini kelompok Chechen dan OPM, serta kontra-strategi dari negara, dalam penelitian ini Rusia dan Indonesia. Strategi Rusia dan Indonesia nantinya dilihat berdasarkan kebijakan dan buku putih pertahanan kedua negara.

Sesuai dengan konsep Ronfeldt dan Arquilla (2001, 7), pola-pola *netwar* melalui penggunaan jaringan-jaringan teknologi informasi lebih cenderung digunakan oleh aktor non-negara. Dalam penelitian ini,

kelompok separatis OPM dan Chechen ternyata sama-sama menggunakan strategi berbasis jaringan internet. Chechen misalnya, menggunakan strategi *online* untuk mendapatkan simpati dan membangun *image* di masyarakat internasional. Chechen menggunakan jalur online melalui untuk mengkomunikasikan tujuannya sebagai negara berdaulat dan berharap bahwa dunia internasional bersedia mengakui kemerdekaan Chechen. Chechen memiliki beberapa website, seperti “chechenwar.com”, “www.chechen.org”, dan “chechencenter.info” untuk mencari dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan politik mereka melawan pemerintah Rusia.

Terkait OPM, Wardhani (2009) telah melakukan analisis terhadap upaya-upaya perlawanan OPM melalui jalur jaringan internet. Paling tidak, menurut Wardhani (2009, 10), ada tiga website OPM yang terus diperbaharui sampai tahun 2009 yaitu “www.westpapua.net”, “www.freewestpapua.org” dan “www.koteka.net”. Pada halaman depan website “www.freewestpapua.org” misalnya, tertulis:

“The forgotten land of West Papua is under brutal Indonesia military occupation. Its tribal people are being slaughtered, and their unique environment destroyed”.

Dalam kedua kasus tersebut, baik OPM maupun Chechen paling tidak cukup berhasil meningkatkan atensi masyarakat internasional pada kondisi mereka. Wardhani (2009, 4) mengatakan bahwa upaya OPM bisa dinyatakan cukup berhasil dengan dukungan fakta bahwa permasalahan OPM ini dibahas di Kongres Amerika Serikat. Sementara itu, terkait Chechen, opini dunia yang begitu mendesak Rusia terutama pasca terbunuhnya jurnalis Anna Politkovskaya pada tahun 2006 (MSNBC, 2006) menunjukkan bahwa upaya Chechen untuk membentuk

image mampu mendorong reaksi masyarakat internasional, walaupun tidak seberhasil OPM.⁷

Rusia dan Indonesia ternyata memiliki jalan yang berbeda dalam menanggapi upaya-upaya Menghadapi perlawanan *cyberspace* OPM, terdapat website yang tetap mendukung Indonesia atau pro-Indonesia, meskipun bukan resmi dari Pemerintah Indonesia. Sedangkan Rusia, menandingi perlawanan *cyberspace* Chechen dengan website yang secara langsung mengatasnamakan Pemerintah Rusia.

Mulvey (2000) menggambarkan upaya Rusia dalam melakukan kontra-strategi adalah dengan melakukan *netwar* juga. Rusia membentuk website “www.kavkaz.com” sebagai sebuah strategi Rusia untuk memberitakan perang di Dagestan tahun 2000, menurut versi Rusia. Selain itu, Rusia juga membentuk “www.itar-tass.com” untuk melaporkan kepada dunia internasional mengenai apa yang terjadi di Chechnya. Saling serang antar *hacker* kedua belah pihak juga terjadi, menandai sebuah *netwar* antara kelompok separatis Chechen dengan pemerintah Rusia (Mulvey 2000).

Walaupun begitu, pemerintah Rusia tidak menghilangkan opsi strategi militer. Kramer (2005) menjelaskan beberapa perilaku militeristik Rusia terhadap Chechen. Namun, walaupun Kramer lebih memfokuskan diri pada aspek militer, secara tersirat ia menunjukkan upaya-upaya pemerintah Rusia dalam menguasai informasi seperti sensor terhadap berita terkait Chechnya di televisi (2005,257). Fakta bahwa sampai saat ini

⁷Berhasil disini dimaksudkan bahwa permasalahan OPM telah dibahas di Kongres AS sedangkan permasalahan Chechen belum. Analisis mengenai hal ini tentunya tidak saja dari faktor penggunaan internet, tetapi juga perlu dilakukan analisis mendalam mengenai posisi Rusia dan Indonesia di arena internasional. Pembahasan dalam tulisan ini hanya menekankan pada upaya Chechen dan OPM menggunakan internet serta kontra-strategi dari pemerintah.

belum ada negara yang mendukung maupun mengakui secara resmi Chechen sebagai negara bisa dikatakan sebagai sukses pemerintah Rusia.

Indonesia dalam menghadapi OPM belum membentuk *website* resmi atas nama Pemerintah Republik Indonesia seperti halnya Rusia. Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hingga saat ini belum memberitakan apa yang sebenarnya terjadi di Papua menurut pandangan Pemerintah Indonesia. Wardhani (2009) sebenarnya menemukan paling tidak dua *website* yang lebih pro-Indonesia, yaitu “www.papuaweb.org” dan “www.westpapuapoint.wordpress.com”. Namun, penulis menemukan fakta bahwa pada saat tulisan ini dikerjakan, *website* “www.papuaweb.org” sudah tidak bisa diakses sedangkan *website* “www.westpapuapoint.wordpress.com” walaupun terus diperbarui namun bukan merupakan *website* resmi pemerintah. Terbukti, *website* “www.westpapuapoint.wordpress.com” masih memberikan *link* pada *website* pro-OPM.

Dalam menghadapi cyberspace separatisme, sejauh ini, mungkin hanya Rusia yang melakukan strategi *netwar* terhadap situs-situs organisasi separatisme di negaranya. *Netwar* yang dijalankan oleh Rusia, tidak hanya dengan membentuk *website* tandingan sebagai kontra-berita tentang pemberitaan di daerah Chechnya, melainkan dengan meng-hack *website* Chechen. Sedangkan perlawanan terhadap situs-situs OPM hanya dilakukan oleh situs-situs tertentu yang tidak mengatasmakan Pemerintah RI.

Pemerintah RI sendiri justru lebih mengandalkan kekuatan dan strategi militer. Buku Putih Pertahanan RI tahun 2008 (Dephan RI 2008, 73) mengatakan bahwa menghadapi ancaman separatisme, pemerintah bisa menggunakan kekuatan militer. Kalau pun ada penggunaan kekuatan

nirmiliter, sifatnya lebih pada penciptaan kesejahteraan dan keadilan. Selain itu, tokoh masyarakat diharapkan mampu “menyadarkan” kelompok separatis. Buku Putih ini secara umum tidak menempatkan teknologi informasi sebagai pusat kekuatan Indonesia. Bahkan, subbagian yang menjelaskan mengenai peran teknologi informasi hanya sebanyak dua halaman dan terbatas pada upaya memandirikan kebutuhan teknologi informasi negara (Dephan RI 2008, 90-92).

Analisis penulis terhadap kasus ini kemudian bergulir seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan peperangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan tersebut mengharuskan adanya sebuah strategi baru yang lebih sesuai dengan kondisi era informasi ini. Dari pandangan Libnicki serta Ronfeldt dan Arquilla, sebenarnya strategi yang paling tepat dalam hal peperangan saat ini adalah strategi perang informasi, atau dalam bahasa Ronfeldt dan Arquilla adalah strategi *netwar*. Penguasaan informasi menjadi kewajiban bagi setiap pihak yang berada di medan perang era kontemporer ini.

Konsepsi Sun Tzu, sebagai salah satu ahli strategi klasik, ternyata masih sesuai dengan perkembangan jaman. Salah satu terminologi Sun Tzu (1963, 64) yang paling dikenal adalah,

“know the enemy and know yourself; in a hundred battles you will never be in peril...when you are ignorant of the enemy but know yourself, your chances of winning or losing are equal.....if ignorant both of your enemy and of yourself, you are certain in every battle to be in peril...”

Pernyataan ini mengarahkan kita pada pentingnya monopoli informasi dalam peperangan. Pengetahuan akan kekuatan musuh menjadi syarat utama kemenangan bagi Sun Tzu. Ini sebenarnya sesuai dengan pandangan Libnicki (1995) mengenai pentingnya informasi, namun perlu

adanya sedikit perubahan. Sun Tzu, pada jamannya, mengasumsikan bahwa informasi bisa dimonopoli dan dipertahankan monopolinya. Sedangkan Libnicki justru menuliskan bahwa sangat sulit menahan informasi agar tetap termonopoli. Oleh karenanya, penulis menganggap, dalam hal ini, strategi *netwar* Rusia cukup berhasil. Ini terkait dengan kemampuannya menahan informasi melalui televisi dan kemampuan pemerintah untuk membungkam jurnalis dan wartawan yang bertentangan dengan pemerintah dalam kasus Chechnya (Kramer 2005,257).⁸

Sebaliknya, strategi pemerintah Indonesia yang tidak jelas dan mengandalkan kekuatan militer sebagai jalur utama serta tidak adanya kemauan dari pemerintah untuk secara resmi mengorganisir masyarakat untuk melakukan kontra-strategi terhadap strategi *netwar* OPM memang masih efektif mencegah OPM memperoleh tujuannya. Namun, simpati yang diraih oleh OPM di dunia internasional tidak bisa dicegah melalui aksi militer maupun kekerasan. Terbukti, pembahasan mengenai Papua di Kongres AS serta dukungan Eni Faleomavaega serta Congressional Black Caucus (CBC) untuk hak rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri (US House of Representatives 2005) menunjukkan adanya celah dalam strategi pemerintah Indonesia. Walaupun demikian, ternyata sampai saat ini, pola-pola strategi pemerintah untuk memberikan pemekaran wilayah bagi Papua cukup efektif. Faktanya, tuntutan dari Kongres AS terhadap *self-determination rights* bagi rakyat Papua jarang terdengar lagi. Bahkan, dalam kunjungannya ke Indonesia tahun 2007, Faleomavaega justru

⁸Ini bukan berarti penulis menganggap pembungkaman jurnalis adalah hal yang baik ataupun benar dan boleh dilakukan. Namun, terkait strategi *netwar* dan perang informasi, penulis menganggap bahwa pemerintah Rusia berhasil menjalankannya dengan cukup baik. Terlepas dari banyaknya kritikan pasca meninggalnya Anna Politkovskaya maupun Alexander Litvinenko, ternyata sampai saat ini kebijakan Rusia di Chechnya tidak pernah sampai dibahas di forum internasional maupun menghasilkan demonstrasi massa yang besar-besaran di negara lain.

mendukung kebijakan otonomi khusus pemerintah RI di Papua dan mendukung pula Papua sebagai bagian dari Indonesia (MelanesiaNews.org, 28 November 2007).

Apakah fakta ini, dan fakta bahwa bisa jadi tekanan terhadap Rusia yang cukup minim terkait dengan kekuatan Rusia yang jauh lebih besar dari Indonesia, membuat strategi *netwar* oleh negara bisa dianggap tidak strategis?⁹ Inilah yang akan dibahas pada bagian penutup dari tulisan ini.

Seberapa Strategis-kah Strategi *Netwar* oleh Negara?

Analisis pada bagian sebelumnya telah menunjukkan adanya nilai lebih yang dimiliki oleh Rusia dengan menggunakan strategi *netwar*, yaitu minimnya tekanan publik, baik domestik maupun internasional bagi pemerintah Rusia terkait kelompok separatis Chechnya. Selain itu, posisi Indonesia yang tidak menggunakan strategi *netwar*, nampaknya justru lebih lemah dari Rusia. Ini tidak lepas dari tekanan Kongres AS dan munculnya website-website dukungan bagi OPM. Dari fakta singkat ini, strategi *netwar* seakan sangat strategis bagi negara. Benarkah demikian?

Sulit rasanya menentukan sesuatu strategis atau tidak. Salah satu indikatornya adalah bahwa strategi merupakan jembatan antara *high-order goals* dengan taktik. Dengan demikian, strategi lebih umum daripada taktik atau seperti yang dikatakan Gray bahwa, "...strategists *plan*, tacticians *do*; you have a strategy, but you do tactics...strategy...is 'done' by tactics and by operations" (1999, p.20). Berarti, strategi bukanlah merupakan gambaran-gambaran kecil peperangan melainkan sebuah rencana jangka panjang dan gambaran besar dari sesuatu.

⁹Strategis berbeda dengan efektif. Sesuatu bisa saja efektif dalam mengatasi permasalahan, namun sebenarnya tidak strategis karena tidak menyelesaikan akar persoalan.

Ini berarti, sesuatu bisa dikatakan strategis bila strategi tersebut memperhitungkan gambaran besar dari suatu fenomena. Menurut pandangan penulis, strategi *netwar* oleh negara justru lebih merupakan taktik, karena secara umum justru tidak menysasar tepat sasaran. Tepat sasaran disini maksudnya adalah, apakah memang upaya-upaya separatis itu hanya sebatas sebuah upaya penciptaan *image*? Bukankah dibalik itu semua ada unsur-unsur lain yang bermain seperti unsur ekonomi, politik, dan identitas? Dari segi ini, upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan kesejahteraan ekonomi dan kebebasan politik bisa dianggap lebih strategis daripada upaya pemerintah Rusia mengatasi persoalan Chechnya, walaupun memang tidak seefektif strategi *netwar* Rusia. Namun, persoalan mendasar seperti identitas, agama, dan budaya yang berbeda, sehingga menyebabkan kemungkinan konflik justru belum disentuh oleh negara. Seperti yang diungkapkan Bikkhu Parekh (2002), peranan masyarakat dalam hal ini menjadi penting, dengan menyediakan ruang bagi dialog interkultural. Strategi interkultural inilah yang belum dilakukan oleh kedua negara. Kedua negara masih berkuat pada upaya-upaya yang militeristik dan bernilai kekerasan.

Selain itu, sesuatu menjadi strategis ketika ada unsur-unsur perbedaan. Michael Porter, teoritis utama terkait *competitive strategy*, menuliskan bahwa strategi kompetitif terkait dengan menjadi berbeda dibandingkan kompetitor. Strategi menurutnya, “...is about competitive *position*, about differentiating yourself in the eyes of the customer, about adding value through a mix of activities different from those used by competitors...” (Nickols, 2003). Selain itu Porter juga mengutarakan bahwa memiliki posisi strategi yang distinct sangat terkait dengan enam hal, yaitu adanya tujuan jangka panjang, adanya nilai-nilai unik yang berbeda, adanya

pengorbanan aspek-aspek tertentu, adanya kebersamaan, dan adanya kontinuitas tujuan (Porter 2001, 71). Strategis dengan demikian, adalah melakukan sesuatu yang berbeda dan *distinct*, dengan berdasarkan pada kontinuitas tujuan jangka panjang, serta adanya pengorbanan aspek-aspek tertentu. Apabila negara berhasil menemukan bahwa permasalahan terpentingnya adalah ekonomi, atau budaya, atau apapun, maka strategi *distinct* yang dilakukannya akan menentukan apakah tindakan tersebut strategis atau tidak. Dalam hal ini, kedua negara nampaknya belum menemukan unsur penting tersebut, sehingga kesulitan pula menyusun strategi yang unik dan *distinct*. Bahkan, strategi jangka panjang yang jelas pun sulit ditemukan, mengingat kedua negara amat tergantung pada figur pemimpin negara-nya.

Pada akhirnya, era informasi sebenarnya memungkinkan penggunaan strategi-strategi baru yang berbeda dari yang selama ini dilakukan. Konsep *cyberspace*, *infosphere*, dan *noosphere* dari Ronfeldt dan Arquilla (1999) bisa menjadi dasar bagi terbentuknya strategi-strategi baru di masa yang akan datang. Ini tentunya membutuhkan kajian lebih mendalam mengenai strategi kelompok-kelompok non-negara dan kontra-strategi yang dilakukan negara. Penulis berharap penelitian-penelitian seperti ini semakin marak di jurusan Hubungan Internasional Unair pada masa-masa mendatang.

Referensi

- Arquilla, J. & Ronfeldt, D., 2001. The Advent of Netwar (Revisited). Dalam: J. Arquilla & D. Ronfeldt, eds. 2001. *Networks dan Netwar: The Future of Terror, Crime, and Militancy*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Bab 1.

- Bhikhu Parekh, 2002. Terrorism or Intercultural Dialogue. dalam: K. Booth & T. Dunne, eds. *Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order*. New York: Palgrave Macmillan. Bab 24.
- Brodie, B., 1946. War in the Atomic Age. In: T. Mahnken & J. Maiolo, eds. 2008. *Strategic Studies: A Reader*. Oxon and New York: Routledge. Bab.11.
- Byman, D.L. & Waxman, M.C., 2000. Kosovo and the Great Air Power Debate. In: T. Mahnken & J. Maiolo, eds. 2008. *Strategic Studies: A Reader*. Oxon and New York: Routledge. Bab.10.
- Corbett, J., 1988. Some Principles of Maritime Strategy. In: T. Mahnken & J. Maiolo, eds. 2008. *Strategic Studies: A Reader*. Oxon and New York: Routledge. Bab.8.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta : Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- Der Derian, J., 2000. Virtuous War/Virtual Theory. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 76(4), hlm.771-788.
- Encyclopædia Britannica*, 2010. *Strategy*. [Internet] dalam: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/568259/strategy> [Diakses 13 Juli 2010].
- Ghyczy, T.V., Oetinger, B.V., and Bassford, C., 2001. *Clausewitz on Strategy: Inspiration and Insight from a Master Strategist*. Diterjemahkan oleh: William Skinner and Peritus Precision Translations, Inc. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Gray, C., 1999. *Modern Strategy*. New York: Oxford University Press.
- _____, 2003. Why Strategy is Difficult. dalam: T. Mahnken & J. Maiolo, eds. 2008. *Strategic Studies: A Reader*. Oxon and New York: Routledge. Bab.21.
- _____, 2006. *Strategy and History: Essays on Theory and Practice*. Oxon and New York: Routledge.
- _____, 2007. *War, Peace, and International Relations: An Introduction to Strategic History*. Oxon and New York: Routledge.
- Ignatieff, M., 2000. *Virtual War: Kosovo and Beyond*. New York: Picador.

- Kramer, M., 2005. Guerrilla Warfare, Counterinsurgency and Terrorism in the North Caucasus: The Military Dimension of the Russian-Chechen Conflict. *Europe-Asia Studies*, 57(2), hlm.209-290.
- Krepinevich, A.F., 1994. From Cavalry to Computer: The Patterns of Military Revolutions, dalam T. Mahnken & J. Maiolo, eds. 2008. *Strategic Studies: A Reader*. Oxon and New York: Routledge. Bab.19.
- Libicki, M.C., 1995. *What Is Information Warfare?*. Washington, DC: National Defense University.
- Mahnken, T.G. & Maiolo, J.A. eds., 2008. *Strategic Studies: A Reader*. Oxon and New York: Routledge.
- MelanesiaNews.org, 2007. *Eni Faleomavaega: Berbalik 180 Derajat?*. [internet] 28 November. dalam: http://www.melanesianews.org/suara/publish/aksi/Eni_Faleomavaega_281107_2.shtml [diakses 14 Juli 2010].
- MSNBC, 2006. *Murdered Russian investigative reporter buried*. [internet] 10 Oktober. dalam: <http://www.msnbc.msn.com/id/15172854/> [diakses 13 Juli 2010].
- Mulvey, S., 2000. *Chechen War on the Web*. [internet] 16 Maret. dalam: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/619180.stm>. [Diakses 13 Juli 2010].
- Nickols, F., 2003. *Strategy: Definitions and Meanings*. [internet]. dalam: http://www.nickols.us/strategy_definitions.pdf [Diakses 13 Juli 2010].
- Overy, R.J., 1992. Air Power and the Origins of Deterrence Theory Before 1939. dalam: T. Mahnken & J. Maiolo, eds. 2008. *Strategic Studies: A Reader*. Oxon and New York: Routledge. Bab.9.
- Porter, M.E., 2001. *Strategy and the Internet*. Harvard Business School Publishing, Product No. 6358.
- Rattray, G.J., 2001. *Strategic Warfare in Cyberspace*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Reid, B., 1978. J.F.C.Fuller's Theory of Mechanized Warfare. dalam: T. Mahnken & J. Maiolo, eds. 2008. *Strategic Studies: A Reader*. Oxon and New York: Routledge. Bab.7.

- Ronfeldt, D. & Arquilla, J., 1999. Noopolitik: A New Paradigm for Public Diplomacy. dalam: N.Snow & P.M.Taylor, eds., 2009. *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. New York & London: Routledge. Bab.29.
- Tzu, S., 1963. The Art of War. Diterjemahkan oleh S.B.Griffiths. dalam T. Mahnken & J. Maiolo, eds. 2008. *Strategic Studies: A Reader*. Oxon and New York: Routledge. Ch.4.
- US House of Representatives, 2005. *Congressional Black Caucus (CBC) Joins With Faleomavaega in Urging U.S. Secretary of State and UN Secretary General to Support West Papua's Right to Self-Determination*. [internet]. dalam: http://www.house.gov/list/press/as00_faleomavaega/enionwestpapua.html [diakses 13 Juli 2010].
- Wardhani, B.L.S.W., 2009. Papua on the Net: Perjuangan Pemisahan Diri Papua melalui Dunia Maya. dalam: *Persidangan Hubungan Indonesia-Malaysia 2009*. Fakultas Sastra dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Malaysia, 6-8 Agustus 2009.
- Webster, F., 2006. *Theories of the Information Society*. 3rd ed. London & New York: Routledge.

BAB VII

Relevansi Strategi Sun Tzu dan Clausewitz di era Perang Virtual

Pendahuluan

Studi mengenai strategi, baik di era klasik maupun kontemporer, tidak pernah lepas dari dua nama yaitu Sun Tzu dan Carl von Clausewitz. Mahnken dan Maiolo (2008) menekankan bagaimana kedua tokoh ini merupakan peletak dasar studi-studi mengenai strategi. Dalam bahasa Handel (2001), yang mencoba mengomparasikan keduanya, Sun Tzu dan Clausewitz bisa dianggap sebagai “the masters of war”. Handel (2001) bahkan lebih jauh mengatakan bahwa karya Sun Tzu (*The Art of War*) dan karya Clausewitz (*On War*) terus menjadi bahan kajian ahli-ahli strategi sampai ribuan tahun setelah kemunculannya. Ini menunjukkan bagaimana Sun Tzu dan Clausewitz dianggap sebagai dua tokoh utama dalam studi strategi.

Dalam ranah praktis, sudah banyak kajian mengenai pengaruh yang diberikan oleh keduanya. Feng (2007) mengemukakan bahwa sumbangsih Sun Tzu terhadap studi mengenai strategi nampak pada, misalnya, penerapan strategi Cina di Perang Korea. Strategi Commander Lin Biao saat itu menunjukkan ia memakai konsep Sun Tzu bahwa yang utama adalah menyerang strategi musuh, bukan secara *head-to-head* menyerang pasukan musuh. Ini dibuktikan lewat strategi penciptaan *chaos* dalam pasukan musuh (Amerika Serikat). Salah satu taktik yang digunakan Mao Tse-Tung misalnya, yaitu perang gerilya, bisa dikatakan diilhami dari

strategi Sun Tzu.¹⁰ Pernyataan Mao (dalam Stephens & Baker 2006, 24) yang terkenal, “The enemy advances, we retreat; the enemy camps, we harass; the enemy tires, we attack; the enemy retreats, we pursue” senada dengan pernyataan Sun Tzu (1963) yaitu “...when he concentrates, prepare against him; where he is strong, avoid him; when enemy is at ease, tire him; attack where he is unprepared...”.

Berbeda dengan Sun Tzu, Clausewitz memang tidak memberikan “tuntunan” strategi. Ia, meminjam analogi Handel (2001, 17), berupaya menjelaskan mengapa “apel” jatuh ke tanah, bukan mengatakan bahwa apel selalu jatuh ke tanah. Walaupun begitu, prinsip dasar dan logika-logika Clausewitz justru sering dijadikan landasan analisis mengenai perang. Howard (2002) misalnya menyebutkan bahwa strategi Jerman dibawah Moltke amat dipengaruhi oleh Clausewitz. Bahkan, pandangan Clausewitz mengenai hubungan perang dengan struktur sosial-politik dianggap menginspirasi Marx, Engels, Lenin, dan Trotsky (Howard 2002).

Permasalahannya kemudian, pola-pola perang telah berubah jauh dari perang konvensional di era Clausewitz, apalagi dibandingkan era Sun Tzu. Terminologi baru yang muncul kemudian adalah *virtual war* (Ignatieff 2000) atau *virtuous war* (Der Derian, 2000).¹¹ Keduanya didasarkan pada perkembangan pesat teknologi informasi dalam peperangan, yang nampak nyata pada Perang Teluk tahun 1991 dan

¹⁰Walaupun begitu, Handel misalnya menganggap bahwa dari segi jiwa tulisannya, Mao Tse-Tung justru lebih dekat dengan Clausewitz. Ini didasarkan pada pemahaman Handel bahwa Mao mencoba memahami “...the nature of war, the problem of theory and practice, protracted war, and the role of the people in war...” (Handel 2001, *Introduction*). Perlu dipahami bahwa pernyataan Handel ini terkait dengan tesisnya bahwa logika strategi merupakan suatu yang universal. Untuk pemahaman berbeda, lihat Feng (2007) atau Sondhaus (2006).

¹¹Dua terminologi ini, menurut Der Derian, memiliki perbedaan mendasar. Bila *virtual war* lebih terkait dengan perkembangan teknologi informasi, netral secara moral, dan lebih teknis, maka *virtuous war* mencakup baik aspek teknis maupun etika. Lebih lanjut lihat Der Derian (2000).

serangan NATO ke Kosovo tahun 1999. Webster (2006) juga menyebutkan pola perang baru ini sebagai *information warfare*, dengan karakteristik semacam munculnya *knowledge warriors*, pentingnya *perception management*, penggunaan teknologi tingkat tinggi, adanya *cyberwar*, dan sifat perang yang *pre-programmed* (telah dirancang jauh hari sebelum perang berlangsung).

Teoritisi seperti Handel (2001) pun mengakui bahwa pola-pola perang baru ini potensial mengubah pola-pola strategi yang ada.¹² Pertanyaan penting yang dimunculkan Der Derian (2000) kemudian menjadi amat krusial. Mengutip Der Derian (2000, 776), era *virtuous war* saat ini memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti, “...is virtualization the continuation of war (as well as politics) by other means? Is it repudiating, reversing, or merely updating Clausewitz? Is virtuality replacing the reality of war?”. Terinspirasi oleh pertanyaan-pertanyaan Der Derian itulah kemudian penulis mencoba menelaah bagaimana relevansi konsep-konsep perang dan strategi dari Sun Tzu dan Clausewitz di era *virtual/virtuous war* saat ini.

Untuk menelaah bagaimana relevansi tersebut, tulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama merupakan latar belakang dan pendahuluan yang kemudian mengarahkan pada pentingnya telaah mengenai relevansi tersebut. Bagian kedua berisikan konsep-konsep penting mengenai perang dan strategi, baik dari Sun Tzu maupun Clausewitz.

¹²Dalam bukunya, Handel (2001) menganggap bahwa pemahaman mengenai studi strategi klasik lebih mampu menjelaskan mengenai perang daripada hanya berputar dalam aspek kemajuan teknologi yang dicapai saat ini. Menurut penulis, Handel melupakan fakta bahwa teori selalu terkait dengan konteks perkembangan jaman saat teori tersebut dikeluarkan. Oleh karenanya, penulis menganggap penting upaya-upaya kontekstualisasi terhadap teori-teori strategi klasik.

Tulisan ini tidak berniat membandingkan secara detail antara keduanya¹³ namun karena penulis menganggap penting untuk memasukkan keduanya dalam sebuah analisis secara bersamaan. Ini didasarkan pada anggapan penulis bahwa strategi terkait erat dengan kultur, dan penulis sepakat dengan Feng (2007) serta Sondhaus (2006) bahwa Sun Tzu dan Clausewitz mewakili dua kultur berbeda yang sering dianggap bertentangan. Bagian ketiga tulisan berisikan pemahaman mengenai konsep-konsep *virtual/virtuous war*. Bagian keempat membahas mengenai kontekstualisasi konsep-konsep Sun Tzu dan Clausewitz di era *virtual war*. Sementara bagian kelima merupakan kesimpulan dari tulisan ini.

Perang dan Strategi menurut Sun Tzu

Apa sebenarnya pandangan Sun Tzu mengenai strategi? Paling tidak ada dua konsep besar Sun Tzu mengenai strategi. Pertama, bahwa kemenangan yang paling ideal adalah kemenangan tanpa pertempuran. Dalam bahasa Sun Tzu, “...to subdue the enemy without fighting is the acme of skill...” (1963, 60). Disini Sun Tzu menekankan bagaimana kemudian strategi mencapai kemenangan adalah dengan melakukan hal-hal sebelum pertempuran. Poin kedua yang juga penting adalah bahwa “...all warfare is based on deception...” (1963, 55). Dari poin ini, Sun Tzu menekankan bahwa strategi yang paling utama adalah *deception*, saat kuat tunjukkan bahwa kita lemah, saat kita lemah, tunjukkan bahwa kita kuat. Hal-hal seperti itu menjadi karakteristik strategi yang diusung Sun Tzu.

¹³Untuk kajian-kajian yang membandingkan secara detail antara keduanya, tulisan Handel (2001) nampaknya sudah cukup mewakili bagaimana keduanya dibandingkan secara proporsional. Walaupun, dalam pandangan penulis, Handel dalam banyak hal memposisikan diri lebih condong pada Clausewitz.

Untuk lebih memahami strategi Sun Tzu, ada poin-poin utama selain kedua poin diatas yang menjadi titik tekan Sun Tzu dalam *The Art of War* (1963). Poin pertama adalah bahwa perang merupakan hal yang vital bagi negara (1963, 53). Bagi Sun Tzu, perang itu sendiri adalah kepentingan yang utama. Ini tentu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang penulisan buku-nya yang berada dalam konteks *The Warring States Period* (Feng 2007, 21). Dari konsep perang sebagai kepentingan utama negara inilah, Sun Tzu menunjukkan ada lima faktor esensial dalam berperang, yaitu “moral influence, weather, terrain, command, and doctrine” (1963, 53).

Poin berikutnya yang esensial dalam strategi Sun Tzu adalah pernyataannya bahwa “victory is the main object in war....if this long delayed, weapons are blunted and morale depressed....for there has never been a protracted war from which a country has benefited” (1963, 58). Konsep ini menjadi salah satu poin utama Sun Tzu, karena ia menekankan bahwa kemenangan yang cepat adalah tujuan utama strategi perang. Ia lantas menekankan bahwa “...what is essential in war is victory, not prolonged operations...” (1963, 60).

Salah satu poin krusial, yang terkait dengan kemenangan tanpa bertempur, adalah adanya gradasi keutamaan strategi menurut Sun Tzu (1963, 60-61). Yang pertama dan utama adalah menyerang strategi musuh. Tanpa kemampuan menciptakan strategi, maka musuh akan kalah dengan sendirinya. Yang berikutnya adalah mengganggu aliansi atau kawan-kawannya, karena musuh akan menjadi lemah dan tidak punya pilihan dalam mengatur strategi. Yang ketiga adalah menyerang pasukannya. Yang paling buruk adalah menyerang kota, karena akan mengakibatkan banyak korban jiwa dan perang berkepanjangan.

Salah satu terminologi Sun Tzu (1963, 64) yang paling dikenal adalah,

“know the enemy and know yourself; in a hundred battles you will never be in peril...when you are ignorant of the enemy but know yourself, your chances of winning or losing are equal.....if ignorant both of your enemy and of yourself, you are certain in every battle to be in peril...”

Pernyataan ini apabila dikaitkan dengan pandangannya mengenai *deception* akan mengarahkan kita pada pentingnya monopoli informasi dalam peperangan. Pengetahuan akan kekuatan musuh menjadi syarat utama kemenangan bagi Sun Tzu.

Penulis menyimpulkan bahwa dari sekian banyak konsep perang dan strategi menurut Sun Tzu, ada beberapa poin krusial yang bisa dikaitkan dengan pola-pola *virtual war*. Yang pertama adalah konsep kemenangan tanpa bertempur. Hal ini menjadi ciri khas Sun Tzu yang membedakannya dengan ahli strategi lain, terutama Clausewitz. Kedua, bahwa strategi perang terkait dengan adanya *deception* atau tipu daya. Dari konsep ini, Sun Tzu seakan telah menekankan pentingnya penguasaan informasi dalam peperangan. Yang ketiga adalah pandangannya mengenai perang dalam waktu singkat. Hal ini memang tidak khas Sun Tzu, namun menjadi krusial karena Sun Tzu merupakan orang pertama yang mengemukakan pentingnya kemenangan tanpa berlama-lama berperang. Yang keempat adalah mengenai gradasi keutamaan kemenangan menurut Sun Tzu, yang terdiri dari lima tingkatan: kemenangan tanpa bertempur; menyerang strategi lawan; mengganggu aliansi; menyerang pasukan; dan menyerang kota. Keempat poin ini akan menjadi dasar pembahasan di bagian selanjutnya. Bisa dilihat bahwa pemikiran Sun Tzu memang penuh

dengan saran dan anjuran, namun tetap berbentuk argumen filosofis yang bisa diartikan berbeda di setiap generasi.

Perang dan Strategi Menurut Clausewitz

Ada beberapa pandangan Clausewitz yang penting, yang kemudian seringkali dikutip dan ditelaah oleh banyak orang. Dalam hal strategi, Clausewitz beranggapan bahwa strategi adalah “...the linking together (*Verbindung*) of separate battle engagements into a single whole, for the final object of the war...” (Howard 2002, 16). Ini menunjukkan bahwa Clausewitz menolak anggapan bahwa perang bisa dilakukan tanpa pertempuran, karena justru pertempuran itulah yang menjadi inti dari peperangan. Disini Clausewitz berbeda dengan Sun Tzu yang menganggap kemenangan terbesar adalah mampu mengalahkan musuh tanpa bertempur.

Terkait dengan strategi, Clausewitz mendasarkan strategi menurutnya pada pemahaman bahwa strategi perang amat tergantung pada tujuan politik dari perang itu sendiri. Namun, strategi menurutnya tetap memiliki dimensi penggunaan kekuatan atau *engagement* (Smith 2004, 128). Strategi dengan demikian amat tergantung juga pada taktik di lapangan, karena konsep *engagement* tersebut. Mengutip Clausewitz, “success is not due simply to general causes...details only known to those who were on the spot” (Clausewitz 1832, 241). Menurutnya, perang merupakan “series of engagement” sehingga strategi kemudian diartikan pula sebagai “skillful ordering of priority of engagements” (Smith 2004, 128). Atau, mengutip bahasa Clausewitz, “...If the idea of fighting underlies every use of the fighting forces, then their employment means simply the

planning and organizing of a series of engagements...” (Clausewitz 1832, 38).

Pandangan lain Clausewitz yang membuat dia berbeda dengan Sun Tzu adalah konsepnya bahwa perang hanyalah merupakan kelanjutan dari kebijakan negara melalui cara-cara lain. Dalam bahasa Clausewitz, perang adalah “...*simply* the continuation of policy with the admixture of other means” (Howard 2002, 36). Howard mencatat bahwa kesimpulan Clausewitz ini dicapai di akhir-akhir hidupnya, walaupun sejak awal karirnya Clausewitz telah mengatakan bahwa tujuan utama perang adalah hal-hal yang bersifat politis (2002, 36). Namun, Smith (2004, 100) mencatat bahwa pandangan Clausewitz mengenai hubungan perang dan politik bukanlah sesuatu yang benar-benar murni dari dirinya, namun sejalan dengan konteks sosial Prussia saat itu. Bagaimanapun juga, pandangan inilah yang membedakan Clausewitz dengan Sun Tzu yang menganggap perang merupakan hal yang vital bagi negara (1963, 53).

Menurut Clausewitz, perang terdiri dari empat hal penting (Smith 2004, 68) yaitu bahwa perang adalah pertempuran; bahwa perang adalah kontestasi antar pasukan; bahwa perang adalah instrumen kebijakan; dan bahwa perang adalah perilaku sosial yang terikat pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik dari suatu negara serta tradisi, nilai-nilai, dan persepsi negara yang bersangkutan. Menurut Smith, Clausewitz juga mengubah pandangan mengenai perang, yang menurut Clausewitz merupakan kontestasi antar pasukan dalam kerangka antar negara yang rasional (2004, 70). Selain itu, Clausewitz juga mengemukakan konsep perang sebagai “remarkable trinity” antara “...the directing policy of the government, the professional qualities of the army, and the attitude of the population...” (Howard 2002, 21).

Konsep paling terkenal dari Clausewitz terkait strategi adalah konsep mengenai “centre of gravity”. “Centre of gravity” disini, menurut Clausewitz, bukanlah titik terlemah ataupun titik terkuat dari lawan, melainkan pusat dari seluruh kekuatan dan pergerakan, yang merupakan pusat dari semua hal (Smith 2004, 134). “Centre of gravity” ini bukanlah sumber dari kekuatan lawan melainkan sumber dari kesatuan dan kohesifitas lawan, sehingga menjadi penting dalam setiap operasi militer untuk mengidentifikasi “centre of gravity” ini dan menyerangnya untuk membuat lawan “off balance and end his resistance” (Smith 2004, 134).

Dari konsep-konsep perang dan strategi menurut Clausewitz ini, ada beberapa hal yang bisa dicatat. Pertama, anggapan Clausewitz bahwa perang tak lain dan tak bukan hanyalah perpanjangan kebijakan dengan cara lain. Hubungan antara perang, strategi, dan politik inilah yang membuat pemikiran Clausewitz mampu menginspirasi banyak kalangan. Yang kedua adalah anggapannya mengenai perang sebagai benturan kepentingan, atau dengan kata lain bahwa perang tidak mungkin dimenangkan tanpa bertempur. Poin ketiga adalah argumen mengenai perang sebagai sebuah *engagements*, sebuah benturan antar kekuatan militer. Poin lainnya adalah konsep “holy trinity” yang merupakan kesatuan antara pemerintah, tentara, dan masyarakat. Menurut Clausewitz, hubungan ini selalu mendasari setiap peperangan. Yang terakhir adalah konsepsi Clausewitz mengenai “centre of gravity” atau pusat semua hal yang dimiliki lawan. Inilah poin-poin yang nantinya akan dievaluasi dalam kerangka *virtual war*. Bisa dilihat pula, berbeda dengan Sun Tzu yang lebih filosofis, Clausewitz dalam banyak hal lebih teknis namun memiliki kelebihan dalam penjelasan mengenai situasi serta *thenature of war and strategy*.

Telaah Konseptual Virtual/Virtuous War

Mengutip Der Derian (2000, 772), *virtuous war* adalah sebuah konsep ketika aktor¹⁴ memiliki kemampuan yang diperlukan, baik secara teknik maupun etik, untuk mengancam ataupun melakukan tindakan kekerasan terhadap aktor lain dari jarak jauh dengan tanpa menimbulkan korban, atau paling tidak dengan jumlah korban minimal, di pihak sendiri. Dari pemahaman Der Derian tersebut, paling tidak ada beberapa konsep dasar dari *virtuous war*. Pertama, adanya kemampuan teknik dan etik dari suatu aktor. Kemampuan teknik ini tentu terkait dengan teknologi yang dimiliki oleh suatu aktor. Dalam hal ini, baik Der Derian (2000) dan Ignatieff (2000) sepakat bahwa Amerika Serikat menjadi aktor tertinggi di level ini.

Terkait dengan kemampuan etik, baik Der Derian dan Ignatieff juga sejalan ketika menganggap bahwa pola-pola perang virtual ini potensial mengubah etika-etika perang yang sebelumnya ada. Der Derian (2000) menjelaskannya dengan mengatakan bahwa *virtuous war* memungkinkan orang untuk membunuh tanpa bertanggung jawab atas perbuatannya, memungkinkan orang merasakan “kematian” tanpa merasakan konsekuensi tragis yang dihasilkannya. Dalam kalimat Ignatieff (2000), *virtual war* potensial menghasilkan *moral impunity*, atau kebebasan dari keterikatan moral. Bagi keduanya, ini merupakan hal yang amat krusial, yang menandai perbedaan antara perang model lama dengan *virtual war*.

¹⁴Penulis disini mengartikannya sebagai aktor karena selain Der Derian juga tidak menyebutkan secara spesifik negara sebagai aktor, juga karena penulis menganggap era *virtual war* ini tidak hanya melibatkan negara melainkan juga aktor-aktor lain seperti kelompok separatis dan gerakan teroris. Faktanya, konflik di Irak dan Afghanistan yang masih berlangsung sampai sekarang merupakan arena pertarungan antara negara dengan aktor non-negara.

Kedua hal ini, kemajuan teknologi dalam peperangan dan konsekuensi moral dari perang virtual, akan menjadi basis penting bagi upaya kontekstualisasi di bagian selanjutnya. Ilustrasi mengenai keduanya jelas menjadi poin krusial yang mampu menunjukkan apakah pemikiran-pemikiran Sun Tzu serta Clausewitz yang telah disimpulkan sebelumnya masih relevan atau tidak.

Kontekstualisasi Pemikiran Sun Tzu dan Clausewitz di era Perang Virtual

Pembahasan mengenai kontekstualisasi ini dimulai dari anggapan dasar Clausewitz mengenai perang sebagai perpanjangan politik dengan cara yang lain. Ini adalah doktrin dasar yang selalu dianggap benar oleh para peneliti strategi dan ahli strategi lain. Penulis disini ingin mengungkapkan hal yang berbeda. Logika yang ingin dibangun peneliti adalah bahwa dalam konteks perang virtual, kebijakan bisa jadi ditentukan oleh perang yang terjadi. Perang itu sendiri merupakan sebuah konstruksi realitas, yang dalam hal ini sering dilakukan oleh media. Gambaran faktual dari logika tersebut dijelaskan pada paragraf selanjutnya.

Der Derian (1998; 2000) menggambarkan dengan jelas bagaimana perang virtual dilakukan. Secara sederhana, perang dilakukan dalam kerangka seperti simulasi, menggunakan komputer, dan seperti sedang bermain *game* perang. Namun, walaupun yang dilakukan seakan sedang bersimulasi atau bermain *game*, sesungguhnya yang terjadi di lapangan itu nyata. Operator komputer yang sedang menembak sebuah instalasi militer dan melukai banyak orang dalam “game” tersebut memang menimbulkan korban yang nyata di lapangan. Di Amerika Serikat, bisa jadi tentara seperti sedang bersimulasi menyerang Irak. Namun di Irak, korban

berjatuhannya akibat serangan dari misil-misil teknologi tinggi yang berjatuhannya. Bahkan, Der Derian (1998) sempat menyatakan bahwa perkembangan teknologi yang dimiliki militer memungkinkan menurunkan semacam robot ke medan pertempuran. Robot ini bukan robot biasa karena dikendalikan secara virtual oleh manusia di belahan dunia yang lain. Manusia tersebut melihat dunia secara tiga dimensi dalam bentuk “synthetic environment”. Kalau sudah begini, realitas bukan lagi sesuatu yang benar-benar nyata. Bisa jadi, realitas yang dianggap ada tersebut tidak pernah ada, atau paling tidak berbeda dengan situasi aslinya.

Mengutip Der Derian (1998), di era *virtual war* ini, terjadi perubahan dalam hubungan antara teknologi dan kebijakan. Selama ini, kebijakan mendorong lahirnya teknologi untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Ini dalam banyak hal sejalan dengan pandangan Clausewitz bahwa strategi lahir dari kebijakan politik, untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Namun, Der Derian (1998) mengungkapkan bahwa era perang virtual membuat kebijakan, terutama militer, justru tergantung dari hasil teknologi yang ada. Penyusunan kebijakan berubah sejalan dengan perkembangan teknologi. Kalau sudah begitu, logika dasar Clausewitz mengenai politik sebagai pembentuk strategi dan perang sebagai kelanjutan dari politik bisa dipertanyakan. Apabila suatu kebijakan didasarkan pada fakta yang ada, pada perang yang sedang berlangsung, sedangkan perang itu sendiri bukanlah hasil kebijakan melainkan konstruksi realitas, masihkah politik menentukan strategi?

War on Terror Amerika Serikat menjadi bukti bahwa kebijakan politik dibentuk oleh sebuah perang yang terjadi dalam kerangka konstruksi realitas. *War on Terror* AS selalu dikaitkan dengan serangan 11 September 2001. Nacos (2002) menekankan bagaimana kondisi *real-*

time dan *live event* yang terjadi ketika serangan tersebut membuat efek multiplikasi begitu besar.¹⁵ Secara umum mayoritas warga AS saat itu, menurut Nacos (2002), seakan tidak percaya bahwa liputan media itu nyata dan justru mengira sedang ada syuting film bertema *disaster*. Disinilah kemudian fakta di lapangan, yang kemudian direkonstruksi oleh media, justru menjadi dasar pengambilan sebuah kebijakan politik. Eytan Gilboa (2002) mengilustrasikannya dengan begitu baik ketika ia mengemukakan adanya sebuah *CNN Effect* dalam pembentukan kebijakan luar negeri, terutama terkait dengan kebijakan *War On Terror* Amerika Serikat. Dengan begitu, rasanya valid untuk kemudian mempertanyakan kembali apakah pandangan Clausewitz yang deterministik mengenai hubungan politik dan strategi serta perang masih cukup relevan di era perang virtual, ketika realita bukan lagi nyata melainkan sebuah konstruksi virtual belaka.

Tentu akan muncul kritik bahwa yang utama tetap keberhasilan secara politik. Namun dalam pandangan penulis, hampir seluruh analisis mengenai tujuan politik AS di Irak misalnya, menemui kebuntuan. AS selalu mengubah-ubah justifikasi politik mereka terkait perang Irak. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar, apakah memang strategi militer AS di Irak didasarkan pada kebijakan politik yang jelas, ataukah ternyata hanya didasarkan pada ketakutan dan keinginan membalas sebuah serangan yang telah terkonstruksi oleh media? Penulis menganggap jawaban terakhir itu yang lebih mungkin.

Yang berikutnya menjadi pembahasan adalah hubungan antara perang dengan pertempuran. Hasil telaah sebelumnya menunjukkan bahwa Sun Tzu menekankan kemenangan ideal adalah tanpa bertempur,

¹⁵Terkait dengan detail bagaimana persepsi masyarakat AS terkait liputan media secara langsung dan *real-time* tersebut, bisa dibaca lebih dalam pada Nacos (2002).

sedangkan Clausewitz justru menekankan pentingnya pertempuran dalam perang. Penulis merasa bahwa perang virtual secara konseptual lebih condong pada pemikiran Sun Tzu. Ignatieff (2000) menunjukkan bahwa Perang Kosovo tahun 1999 dimenangkan oleh NATO tanpa satu pun korban yang jatuh di pihak NATO. Bahkan, superioritas teknologi serta pola-pola digitalisasi perang memungkinkan tidak adanya “pertempuran” atau *engagements*. Operator rudal misalnya, cukup duduk di belakang meja dan menekan tombol, dan dalam sekejap kemenangan militer bisa dicapai. Lantas, dimana kemudian *engagements* yang dibayangkan Clausewitz? Apakah ketika suatu pihak melakukan pola-pola “turkey shoot” (Ignatieff 2000, 161) maka hal itu bisa dikatakan *engagement*? Seperti yang dikatakan Der Derian (2000), *virtuous war* mempromosikan sebuah pola perang yang higienis (dalam artian meminimalisir jumlah korban), *bloodless*, dan bersifat humaniter. Maka, dalam pandangan penulis, kondisi ini lebih tepat dengan pandangan Sun Tzu mengenai menang tanpa bertempur.

Poin selanjutnya adalah mengenai pandangan Sun Tzu tentang *deception* dan pentingnya monopoli informasi. Menurut penulis, ini menjadi salah satu poin dari perang virtual, karena monopoli informasi dan disinformasi menjadi kata kunci. Media sebagai pengonstruksi realitas juga berperan besar dalam membuat pola-pola disinformasi dan *deception*. Ignatieff (2000) menggambarkan bagaimana pengetahuan akan kekuatan lawan menjadi kunci serangan virtual yang sukses. Di sisi lain, Ignatieff juga menyoroti bagaimana media digunakan oleh pemerintah Yugoslavia dalam upayanya memberikan dorongan bagi warga untuk tetap berperang. Disini, penulis menganggap bahwa filosofi Sun Tzu tentang *deception* dan informasi tak lekang oleh jaman dan perubahan teknologi.

Justru, kemajuan teknologi informasi semakin mengukuhkan posisi ide filosofis tersebut.

Permasalahan informasi ini membawa kita pada pandangan Clausewitz mengenai trinitas antara pemerintah, tentara, dan masyarakat. Tentu, penulis sepakat, hubungan antar ketiganya mewarnai setiap perang dan strategi yang diambil. Namun, era virtual ini kemudian seperti meniadakan aspek rakyat. Seperti yang dituliskan Ignatieff (2000), perang berlangsung dan disiarkan secara langsung dan terus menerus sehingga bagi warga negara, itu semua seakan bukan realita yang nyata dan hanyalah gambar di televisi. Masyarakat menjadi apatis dan seakan terbiasa dengan perang. Oleh karenanya, bisa jadi di era virtual ini muncul trinitas yang berbeda. Usulan Der Derian (2000) mengenai MIME (Military-Industry-Media-Entertainment) menurut penulis lebih bisa menangkap fenomena yang terjadi di era virtual ini. Bukan kemudian untuk menganggap bahwa konsep trinitas Clausewitz menjadi tidak relevan, namun mengingat fenomena yang ada menunjukkan apatisme masyarakat namun negara dan militer tetap berperang dibantu media, maka wajar kiranya bagi penulis untuk memilih MIME dari Der Derian sebagai pola baru dalam peperangan.

Poin selanjutnya adalah mengenai serangan cepat oleh Sun Tzu. Ini sesuai dengan karakteristik perang virtual yang begitu menekankan teknologi tinggi, kecepatan, presisi, dan minimalisasi korban sipil. Kemenangan NATO di Kosovo dicapai hanya dalam waktu 3 bulan serangan, sedangkan Perang Teluk tahun 1991 malah hanya berlangsung dalam waktu satu bulan sejak masuknya kekuatan AS dan sekutunya. Keduanya menunjukkan bagaimana perang virtual begitu menekankan kecepatan dalam menghancurkan lawan.

Terkait dengan penghancuran lawan ini, konsep “centre of gravity” dari Clausewitz dan pola-pola kemenangan bertingkat dari Sun Tzu (terutama terkait menyerang strategi lawan) menjadi relevan. Tentunya, “centre of gravity” tidak lagi seperti yang dibayangkan Clausewitz yaitu berupa kota dan tentara, melainkan berupa obyek-obyek vital dan jaringan-jaringan informasi. Namun, sebenarnya, fungsi utama dari kemampuan melakukan perang virtual adalah menakuti lawan untuk tidak melakukan tindakan macam-macam. Dalam bahasa lain, fungsi kemampuan *virtual war* adalah melakukan *deterrence* pada lawan. Ignatieff (2000) mengungkapkan ini dengan jelas walaupun kemudian disertai peringatan bahwa lawan yang merasa tidak mampu menang akan menggunakan cara-cara seperti nuklir, senjata kimia, dan senjata biologis.

Relevansi Strategi Klasik di era *Virtual War*

Dari keseluruhan pembahasan pada bagian sebelumnya, penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa cukup sulit untuk menganggap strategi dan pemikiran klasik, terutama Clausewitz, masih sangat relevan dalam era *virtual war*. Mengapa penulis bisa mengambil kesimpulan tersebut? Ini dikarenakan pemikiran Clausewitz yang mencoba memahami perang dan strategi, bukan menyusun strategi bagi kemenangan. Pola-pola pemahaman terhadap sesuatu bersifat sangat kontekstual, sehingga perubahan pola strategi dan perang di era virtual jelas membutuhkan pemahaman baru. Memang, pemahaman baru bisa didasarkan pada pengembangan pemahaman lama, dan pemikiran Clausewitz amat potensial untuk dikembangkan di era virtual ini.

Di sisi lain, pemikiran Sun Tzu dalam banyak hal sangat filosofis sehingga memiliki potensi untuk terus bertahan dalam kondisi apapun.

Namun, kelemahan yang muncul adalah daya analisis yang tidak begitu tajam, karena lebih dimaksudkan sebagai petunjuk filosofis bagi para pemimpin perang.

Jadi, walaupun penulis nampak berpihak pada Sun Tzu terkait relevansi dengan kondisi sekarang, penulis menganggap bahwa relevansi tersebut bukanlah karena kedalaman analisis Sun Tzu ataupun kemampuan telaah analisisnya yang luar biasa, namun lebih karena sifatnya yang filosofis dan multi-interpretatif. Sementara itu, Clausewitz justru sulit menjadi relevan karena kedalaman analisisnya serta kemampuan penjelasannya yang begitu baik. Oleh karenanya, nampaknya memang diperlukan sebuah pemahaman baru mengenai strategi di era perang virtual saat ini.

Referensi

- Clausewitz, C.V., 1832. *On War*. Diterjemahkan oleh M. Howard & P. Paret, 2007. New York: Oxford University Press.
- Der Derian, J., 1998. All But War Is Simulation. dalam G.O. Tuathail & S. Dalby, eds. *Rethinking Geopolitics*. London & New York: Routledge.
- _____, 2000. Virtuous War/Virtual Theory. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 76(4), hlm.771-788.
- Feng, H., 2007. *Chinese Strategic Culture and Foreign Policy Decision-Making: Confucianism, Leadership, and War*. Oxon & New York: Routledge.
- Gilboa, E., 2002. Global Communication and Foreign Policy. *Journal of Communication*, 52(4), hlm.731-748.
- Handel, M., 2001. *Masters of War: Classical Strategic Thought*. 3rd ed. London: Frank Cass Publishers.
- Howard, M., 2002. *Clausewitz: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.

- Ignatieff, M., 2000. *Virtual War: Kosovo and Beyond*. New York: Picador.
- Nacos, B., 2002. *Mass-Mediated Terrorism: The Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism*. Oxford: Rowman & Littlefield Publisher.
- Smith, H., 2004. *On Clausewitz: A Study of Military dan Political Ideas*. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.
- Sondhaus, L., 2006. *Strategic Culture and Ways of War*. Oxon: Routledge.
- Stephens, A., & Baker, N., 2006. *Making Sense of War: Strategy for the 21st Century*. New York: Cambridge University Press.
- Tzu, S., 1963. The Art of War. Diterjemahkan oleh S.B.Griffiths. dalam T. Mahnken and J. Maiolo, eds. 2008. *Strategic Studies: A Reader*. Oxon and New York: Routledge. Ch.4.
- Webster, F., 2006. *Theories of the Information Society*. 3rd ed. London & New York: Routledge.

BAB VIII

Model Multilateral-Holistik dalam Pengentasan Digital Divide: Implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity

Pendahuluan

Bab ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan analisis mengenai penggunaan model multilateral-holistik dalam pengentasan digital divide. Studi kasus yang digunakan oleh penulis adalah implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity di ASEAN. Struktur tulisan ini diawali dengan pemaparan permasalahan utama dalam diskursus digital divide yaitu mengenai pengertian dan pemaknaan digital divide yang berbeda-beda serta permasalahan solusi yang paling efektif dalam upaya pengentasan digital divide. Bagian kedua bab ini membahas mengenai digital divide di Asia Tenggara. Bagian ketiga dari bab ini membahas mengenai dimensi multilateral-holistik dari implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity.

Digital Divide

Globalisasi tidak dapat dipungkiri telah membawa kesempatan dan perubahan dalam persebaran teknologi dan ilmu pengetahuan. Sekalipun begitu ternyata tidak semua negara ataupun institusi menikmati persebaran tersebut secara adil dan setara. Fakta menunjukkan sebaliknya bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan ternyata hanya dimiliki oleh sekelompok negara dan institusi bahkan korporasi yang secara langsung berada dalam lingkaran kemajuan teknologi. Yang berarti teknologi dan ilmu

pengetahuan hanya dimiliki oleh negara-negara maju dan institusi-institusi turunannya.(Archibugi, 2003:88) Pendapat Archibugi ini ternyata sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Drahos bahwa dunia sekarang memasuki era feodalisme informasi. Era feodalisme informasi menurut Drahos adalah era dimana informasi dikuasai oleh hanya segelintir pihak yang memiliki kemampuan saja dan meninggalkan sebagian lain untuk kesulitan dalam mengakses teknologi dan ilmu pengetahuan (Drahos, 2002). Menurut Drahos telah terjadi pergeseran dari fungsi awal knowledge yang dulunya adalah public goods menjadi private goods dikarenakan knowledge telah menjadi property(Drahos, 2002).

Salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa terdapat jurang yang semakin tinggi dalam hal akses dan persebaran teknologi dapat diamati melalui digital divide. Digital divide merupakan fenomena ketika terdapat jurang antara individu, bisnis bahkan wilayah geografi pada tingkatan sosial ekonomi yang berbeda akibat dari perbedaan kesempatan terhadap akses informasi dan teknologi(OECD, 2001 :4). Tingkat ekonomi dan sosial memainkan peran penting karena ternyata fakta menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang integral antara tingkat sosial ekonomi dengan akses teknologi. Fenomena digital divide ini adalah salah satu outcome dari tidak meratanya persebaran kesejahteraan dunia akibat dari globalisasi sehingga berujung pada jurang aksesibilitas tersebut. Tetapi, di akhir analisisnya OECD membuka jalan bagi diskursus mengenai digital divide dengan menyatakan bahwa :

“The so-called “digital divide” raises a number of questions. Where does it occur and why? What are its causes? How is it to be measured? What are the relevant parameters? What is its extent, that is, how wide is the digital divide? Where is it most critical? What are its effects likely to be in the short term? In the longer term?”

What needs to be done to alleviate it? These questions have only recently been raised, and it is not possible, as yet, to answer all of them with any certainty.”(OECD,2001:5).

Dari pernyataan tersebut diskursus mengenai digital divide mulai bergulir, dan hingga kini perdebatan mengenai dampak dan definisi hingga solusinya terus terjadi. Salah satu penulis yang mengulas tentang digital divide adalah Di Maggio et.al(2001). Dalam tulisannya Di Maggio memaparkan mengenai digital divide secara lebih terperinci dibandingkan pemaparan OECD. Ia menyatakan bahwa digital divide adalah permasalahan mengenai akses (yang lebih luas dari definisi literalnya) terhadap internet. Hal ini dibuktikan Di Maggio dengan analisis aksesibilitas internet di Amerika. Dalam hasil penelitiannya ia mengambil kesimpulan bahwa digital divide dapat setidaknya dikategorikan menjadi dua permasalahan yaitu permasalahan akses dan permasalahan kesenjangan. Permasalahan akses oleh Di Maggio tidak dimaknai secara literal tentang bisa atau tidaknya seseorang mengakses internet tetapi lebih luas yaitu bagaimana tingkat penggunaan dari aksesibilitas terhadap internet tersebut. Sedangkan permasalahan kesenjangan berkaitan dengan kelompok-kelompok yang mengalami kesenjangan dalam digital divide. Di Maggio juga menyatakan bahwa kesenjangan dapat terjadi tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi seperti OECD tetapi juga berdasarkan tempat tinggal, status pekerjaan, pendapatan, edukasi, etnisitas, umur, gender, dan struktur keluarga.

Sejalan dengan Di Maggio, Noll et.al(nd) juga menyoroti aspek aksesibilitias dan konektifitas dalam digital divide. Menurut Noll digital divide dapat setidaknya dibagi ke dalam dua permasalahan yaitu permasalahan hardware dan software. Permasalahan hardware berkaitan

dengan ketersediaan piranti keras atau akses terhadap alat-alat komunikasi dan informasi. Sedangkan software berkaitan dengan piranti lunak dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan hardware tersebut. Argumen Di Maggio dan Noll ini kemudian disempurnakan oleh Valadez & Duran(2007) yang menyatakan bahwa digital divide tidak bisa hanya dipahami sebagai permasalahan fisik akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi(TKI) tetapi juga mencakup penggunaan TKI, ada atau tidaknya bantuan dalam mengakses TKI serta konsekuensi sosial dari TKI. Kontribusi Di Maggio, Noll serta Valadez dan Duran dalam diskursus mengenai digital divide berkuat dalam pembahasan mengenai aspek fisik dan aksesibilitas masyarakat kepada teknologi informasi. Hal ini kemudian di kritik oleh Govindan Parayil(2005).

Parayil menyatakan bahwa analisis mengenai digital divide selama ini yang berkaitan dengan aspek aksesibilitas adalah tidak sepenuhnya tepat dikarenakan menurutnya digital divide berkaitan dengan permasalahan kesetaraan. Ia juga menyatakan bahwa selama ini, pembahasan mengenai digital divide yang hanya berusaha untuk menyediakan akses terhadap permasalahan teknis kesenjangan akses merupakan hal yang salah. Digital divide menurut Parayil merupakan hal yang lebih besar dari hanya sekedar penciptaan atau pemberian akses teknologi kepada masyarakat luas. Permasalahan utama dalam ekonomi-politik dunia sekarang menurutnya adalah adanya gap antara orang kaya dengan orang miskin, pemilik teknologi dan masyarakat yang tidak memiliki teknologi serta masyarakat yang memiliki informasi dan masyarakat miskin informasi. Oleh karena itu solusi untuk meningkatkan kapabilitas melalui pemberian dan peningkatan teknologi semata tidak akan mampu menyelesaikannya. Parayil kemudian merangkum

argumennya dengan menyatakan bahwa digital divide adalah praktek kesenjangan dan ketidaksetaraan yang holistik dan multidimensional. Mungkin ia berawal dari permasalahan akses teknologi tetapi dampak dari inekualitas tersebut telah secara sistemik merambat ke berbagai aspek lain kehidupan (Parayil, 2005).

Oleh karena itu penulis secara umum merangkum pemaknaan digital divide sejalan dengan argumen Keniston & Kumar (2003) yang menyatakan bahwa terdapat empat macam digital divide. Yang pertama adalah digital divide yang terjadi di seluruh dunia baik di negara berkembang atau negara maju yang dalam kesenjangan antara orang kaya, terpelajar dan berkuasa dengan mereka yang tidak kaya, kurang edukasi dan tidak memiliki kekuasaan. Yang kedua adalah kesenjangan yang terjadi akibat aspek bahasa dan budaya. Kesenjangan ini terjadi dikarenakan bahasa dan budaya tertentu ternyata memiliki tingkat aksesibilitas terhadap informasi yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan Keniston & Kumar melalui analisis perbandingan negara barat dengan negara afrika serta negara berbahasa inggris dengan yang tidak berbahasa inggris. Kesenjangan yang ketiga berkaitan dengan semakin tingginya gap antara negara kaya dengan negara miskin. Hal ini dapat terlihat bahwa negara-negara yang masuk dalam kategori negara maju menjadi semakin maju sementara negara-negara yang berkembang dan tertinggal semakin jauh dari kemajuan teknologi. Yang terakhir kesenjangan ini adalah dikarenakan dalam era masyarakat informasi muncul kaum baru yaitu "digerati". Digerati ini adalah masyarakat yang secara umum memiliki kemampuan dan tingkat edukasi yang cukup sehingga membuat mereka menjadi pengendali teknologi dan informasi. Kaum ini adalah para pebisnis, ilmuwan dan konglomerat teknologi seperti yang muncul di

Bangalore dan Silicon Valley. Kesenjangan yang terjadi dalam konteks ini adalah mengenai dampak dan kontribusi digerati terhadap inekualitas digital masyarakat sekitarnya.

Selain hal diatas diskursus digital divide juga mencakup tentang cara-cara dan praktek terbaik yang dapat dilakukan untuk menjembatannya. Beberapa penulis seperti Ya'u(2004), Sridhar & Sridhar(2006), serta Joseph & Parayil(2008) percaya bahwa liberalisasi ekonomi dan peningkatan kapabilitas ekonomi masyarakat tertinggal menjadi kunci utama pengentasan digital divide. Sementara Peters(2000), OECD(2001), Guillén dan Suárez(2005), serta Lopez-Carlos& Dutta(2005) percaya bahwa faktor ekonomi vital dalam pengentasan digital divide tetapi terdapat faktor lain yang lebih utama dalam pengentasan digital divide.

Ya'u(2004) menyatakan bahwa liberalisasi ekonomi menjadi krusial dalam upaya menjembatani digital divide. Ia menyajikan kasus upaya pengentasan digital divide yang dilakukan oleh WTO dan negara barat di Afrika. Dalam analisisnya Ya'u mendapatkan temuan bahwa ternyata meskipun terdapat liberalisasi ekonomi dan terdapat upaya perbaikan standar aksesibilitas melalui donor negara barat dan organisasi internasional ternyata menimbulkan masalah baru di Afrika. Masalah baru ini merupakan adanya imperialisasi baru dalam kedok bantuan ICT dan pembangunan infrastruktur di Afrika. Oleh karena itu Ya'u kemudian mencapai kesimpulan bahwa bantuan secara langsung dalam hal donor dan liberalisasi ekonomi masih merupakan satu hal yang sulit diimplementasikan di negara-negara yang masih kesulitan dalam melakukan demokratisasi akses informasi. Sridhar & Sridhar

Sridhar & Sridhar(2006) sejalan dengan Ya'u menyatakan bahwa liberalisasi ekonomi menjadi kunci pengentasan digital divide. Ia menyatakan peningkatan penetrasi informasi dan teknologi menjadi salah satu indikator menipisnya digital divide di suatu wilayah. Untuk mendapatkan kemudahan akses ini dibutuhkan deregulasi dan liberalisasi sektor informasi oleh negara. Dan yang paling dasar adalah pembukaan pasar atau liberalisasi ekonomi dalam suatu negara. Tetapi, Sridhar & Sridhar menyatakan bahwa liberalisasi ekonomi yang paling tepat dan paling dasar harus dilakukan adalah melalui penyediaan informasi dan bantuan kepada masyarakat tertinggal terkait dengan pekerjaan, pasar dan harga. Hal ini vital karena dengan adanya informasi maka masyarakat akan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dan dalam jangka panjang meningkatkan tingkat penetrasi informasi.

Argumen terakhir mengenai pentingnya liberalisasi ekonomi dalam pengentasan digital divide dikemukakan oleh Joseph & Parayil(2008). Menurut mereka, liberalisasi ekonomi melalui organisasi internasional menjadi salah satu aspek penting pengentasan digital divide. Kehadiran organisasi internasional ini dianalisis melalui kehadiran Informations Technology Agreements(ITA) dalam WTO yang membuat negara-negara berkembang mendapatkan kemudahan perdagangan dan bantuan *capacity-building* dalam pembangunan sistem teknologi-informasi.

Peters(2000) menyatakan bahwa terdapat aspek penting dalam pengentasan digital divide yaitu perumusan kebijakan dalam kerangka tersebut. Ia menyatakan bahwa terdapat delapan kebijakan esensial dalam pengentasan digital divide yaitu pertama pembangunan infrastruktur ICT dalam masyarakat utamanya aspek regulasi telekomunikasi dan akses internet. Kedua adalah peningkatan kepercayaan dalam aktivitas online

seperti transaksi online serta adanya perlindungan dan pengamanan dari pemerintah dalam hal HAKI dan perlindungan konsumsi. Ketiga, diperlukan *capacity building* yang berkaitan dengan pembangunan tenaga kerja dan masyarakat yang memiliki literasi digital baik. Keempat, dibutuhkan kebijakan mengenai pajak dan regulasi perdagangan yang bersinggungan dengan ICT. Kelima, dibutuhkan peningkatan pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja dalam bidang ICT atau bidang terkait untuk secara simultan meningkatkan literasi dan pendapatan masyarakat. Keenam dibutuhkan suatu difusi teknologi seperti adanya *e-government*, *e-learning* dan *e-commerce*. Dan yang terakhir adalah diperlukan peran aktif pemerintah secara keseluruhan melalui peningkatan demokrasi dan akuntabilitas serta perbaikan struktur pemerintahan yang mengakomodasi terwujudnya masyarakat informasi.

Argumen Peters tersebut kemudian dipersingkat oleh OECD(2001) dengan langkah nyata pemerintah melalui pembangunan infrastruktur jaringan, difusi individu dan masyarakat ke dalam *cybersphere*, peningkatan kemampuan masyarakat melalui pelatihan, peningkatan peran publik dalam pengentasan digital divide, serta pembuatan kooperasi multilateral untuk memberikan kerangka pengentasan dalam level global. Argumen Peters & OECD ternyata menjadi rujukan bagi Augusto Lopez Carlos dan Dutta(2005) untuk merumuskan Global Information Technology Report(GITC). GITC merupakan kerangka kerja persiapan pengentasan digital divide. Kerangka kerja ini memiliki tiga pilar utama yaitu iklim pengembangan ICT, kesiapan jaringan, serta kesiapan riil dan intensitas penggunaan ICT dari pemerintah, individu dan, swasta. Iklim pengembangan ICT menurut Carlos & Dutta merupakan hal yang berkaitan dengan persiapan dan

pembangunan infrastruktur ICT secara umum. Hal ini juga merupakan aspek paling vital dalam pengentasan digital divide. Kesiapan jaringan berkaitan dengan tingkat akses individu, pemerintah dan swasta. Tingkat akses juga dapat dimaknai sebagai ketersediaan informasi bagi masyarakat. Hal ini diperlukan karena hampir 80% dari seluruh konten internet merupakan bahasa inggris sehingga ketersediaan dalam bahasa asli menjadi penting. Aspek terakhir yaitu kesiapan riil berkaitan langsung dengan peningkatan kapabilitas dan kemampuan semua aspek masyarakat. Dimulai dari individu, kalangan swasta serta regulasi pemerintah dalam mengatur teknologi informasi.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum digital divide merupakan permasalahan aksesibilitas yang berkaitan dengan perbedaan tingkat akses masyarakat dalam hal teknologi informasi. Tetapi, solusi dari permasalahan tersebut tidak bisa hanya diarahkan kepada liberalisasi, pembangunan infrastruktur atau pemberian perangkat keras informasi saja. Melainkan juga harus mencakup aspek inekualitas yang merupakan eksistensi tambahan dari digital divide. Oleh karena itu dalam kaitan ini penulis menggunakan pemaknaan *four digital divide* milik Keniston & Kumar untuk menjelaskan kesenjangan yang terjadi di ASEAN. Selain itu penulis juga menggunakan model Joseph & Parayil(2008) serta Carlos dan Dutta dalam menjelaskan Master Plan on ASEAN Connectivity(MPAC) sebagai solusi pengentasan digital divide di ASEAN. Hal ini dikarenakan MPAC merupakan bentuk kerangka kerja multilateral yang berkaitan dengan liberalisasi ekonomi dan integrasi kawasan di Asia Tenggara yang di sisi lain juga memiliki aspek holistik dalam penguatan konektivitas baik fisik maupun non-fisik di Asia Tenggara.

ASEAN dan Digital Divide

Dalam menganalisis digital divide di ASEAN terdapat dua dari empat parameter Keniston & Kumar(2003) yang digunakan yaitu tingkat kesenjangan yang berbeda-beda dalam negeri setiap anggota ASEAN serta tingginya kesenjangan secara umum antara negara-negara ASEAN. Kedua parameter ini secara umum akan dijelaskan melalui analisis Global Network Readiness Index 2015. Global Network Readiness Index(GNRI) merupakan indeks tahunan yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Indeks ini berguna untuk merangking negara dalam hal kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Penilaian GNRI berdasarkan pada lima poin/prinsip utama yaitu I) Iklim regulasi bisnis yang memadai dalam hal ICT, II) Kesiapan ICT yang diukur melalui ketersediaan, kemampuan serta infrastruktur, III) Inklusifitas ICT melalui partisipasi pemerintah, pebisnis dan masyarakat, IV) Dampak sosial-ekonomi pengembangan ICT, V) adanya kejelasan *network readiness framework* yang secara jelas memberikan arahan terkait kesiapan ICT(WEF, 2015). Negara-negara ASEAN dalam GNRI menempati peringkat sebagai berikut : Singapura [1], Malaysia[32], Thailand[67], Filipina[76], Indonesia[79], Vietnam[89], Laos[97], Kamboja[110] dan Myanmar[139](Brunei Darussalam tidak masuk dalam index tahun 2015)(WEF, 2015). Singapura sebagai negara dengan tingkat teknologi dan ICT paling tinggi dan cukup maju di kawasan ternyata menyimpan permasalahan dalam pemerataan akses. Permasalahan ini tetap terjadi meskipun Singapura menempati peringkat pertama dalam *global network readiness index(GNRI)*dengan 6.0 poin bersama dengan Finlandia. Permasalahan utama yang terjadi di Singapura adalah fakta bahwa eksklusifitas masih menjadi hambatan pemerataan ICT. Bentuk

kesenjangan yang terjadi adalah tingginya tingkat masyarakat lanjut usia yang tidak memiliki akses terhadap komputer dan perangkat elektronik lainnya. Secara umum memang masalah ini tidak begitu berdampak terhadap kemajuan ekonomi dikarenakan masyarakat lansia bukanlah angkatan kerja produktif (Lim & Tan, 2003).

Malaysia yang menempati peringkat 32 dalam GNRI juga memiliki permasalahan dalam kesenjangan aksesibilitas informasi. Permasalahan di Malaysia hadir dalam bentuk kesenjangan geografi yaitu antara kawasan urban dan rural serta kesenjangan pendapatan yang berujung pada kesenjangan akses terhadap ICT (Faziharudean, 2005). Kesenjangan urban dan rural tercermin dalam teledensitas (tingkat penetrasi telepon) masyarakat yang rendah di kawasan rural yaitu 11,7 dibandingkan dengan di kawasan urban yang mencapai 28,6 (Malaysia National Information Technology Committee dalam Faziharudean, 2005). Selain itu tingkat kesenjangan pendapatan sangat tinggi ditunjukkan melalui tingkat *internet subscribers* yang mencapai 103,9/1000 orang di Kuala Lumpur yang kota berpendapatan tertinggi dengan Kelantan yang merupakan wilayah dengan pendapatan paling rendah di Malaysia yang hanya 12,5/1000 orang (Faziharudean, 2005).

Thailand yang menempati peringkat 67 dalam GNRI mengalami permasalahan kesenjangan dalam bentuk inekualitas pendapatan dan adanya gap gender dan gap usia. Hal ini terlihat dari tingkat pengguna internet di Thailand yang 55,2% nya berada di Bangkok sedangkan hanya 4,7% pengguna internet berasal dari wilayah Thailand Selatan yang termarginalkan (NECTEC dalam Hongladarom, .nd). sedangkan rasio penggunaan ICT berdasarkan gender di Thailand mencapai angka 65:35 pada tahun 2000. Sedangkan gap usia menunjukkan bahwa masyarakat

usia 20-29 menguasai 58% akses terhadap ICT di Thailand(NECTEC dalam Hongladarom, .nd). Filipina di sisi lain mengalami stagnansi dalam hal penetrasi terhadap internet begitu juga Indonesia. Filipina stagnan pada angka 44juta penduduk atau mmencapai 44% dari penduduk sementara Indonesia hanya sejumlah 78 Juta penduduk atau mencapai 28% dari penduduknya(Kemp, 2015). Di kedua negara tersebut permasalahan utama yang terjadi adalah inekualitas pendapatan dan akses akibat tingkat infrastruktur dan pendapatan yang sangat tinggi antara wilayah rural dan urban. Indonesia dalam GNRI mmenempati peringkat 79. Sementara itu empat negara paling tertinggal di ASEAN yaitu Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar memiliki tingkat penetrasi internet secara urut pada angka 44%, 25%, 25% dan 1%(Kemp, 2015).

Dari pemaparan diatas dapat terlihat bahwa kesenjangan secara nyata terjadi di Asia Tenggara baik kesenjangan intra negara maupun intra negara. Hal ini direfleksikan oleh GNRI yang sangat timpang, Singapura berada pada peringkat pertama sedangkan enam negara lain berada dibawah peringkat 70(Filipina 76, Indonesia 79, Vietnam 89, Laos 97, Kamboja 110 dan Myanmar 139).

Master Plan on ASEAN Connectivity(MPAC)

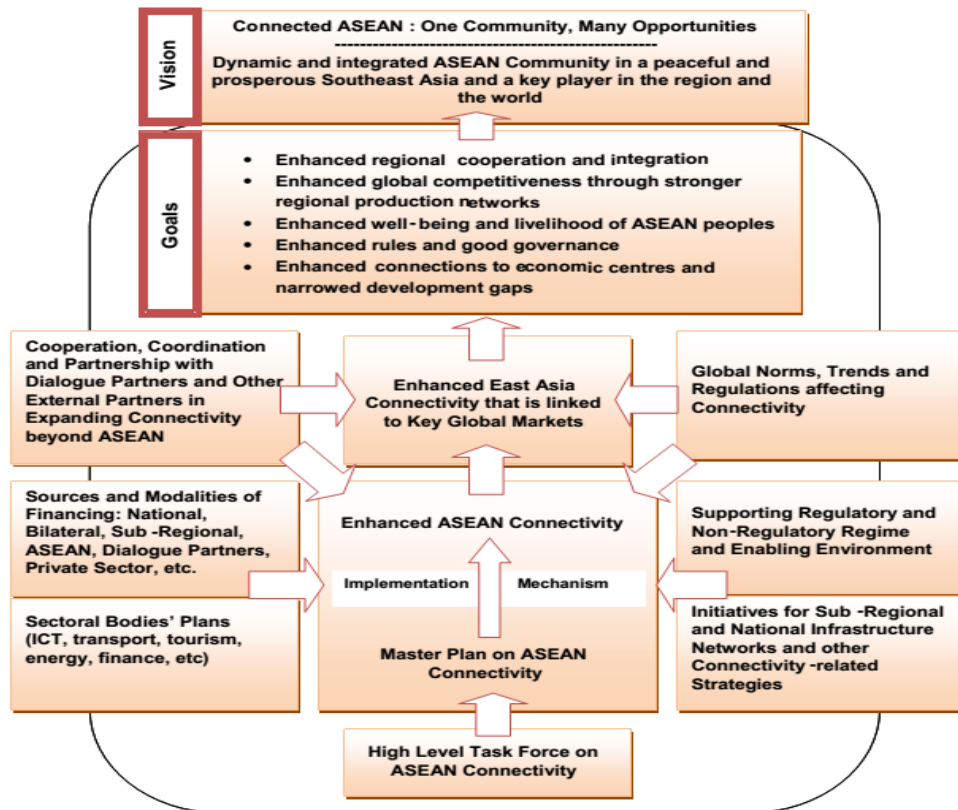
MPAC merupakan sebuah kerangka kerja dan tujuan yang coba dicapai bersama oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan antar masyarakat dalam kerangka pembentukan komunitas ASEAN 2015. MPAC merupakan hasil dari 15th ASEAN Summit di Cha-am Hua Hin, Thailand pada 9 April 2010. MPAC ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas intra regional secara umum dan peningkatan dinamika sosial-

politik melalui pembangunan infrastruktur dan aspek non fisik lainnya terutama di negara-negara dengan tingkat infrastruktur rendah seperti Kamboja, Laos, Vietnam dan Myanmar. Selain itu MPAC juga bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan yang banyak tersebar di seluruh kawasan Asia Tenggara. MPAC juga diharapkan dapat meningkatkan keuntungan ekonomi akibat interkoneksi masyarakat dari Indonesia hingga Vietnam. Akibat terdapat fungsi peningkatan konektivitas maka secara langsung terdapat implikasi dalam peningkatan ketersediaan, kemampuan dan aksesibilitas ICT yang menjadi salah satu pilar dalam MPAC.

Pendanaan MPAC didapat dari berbagai macam sumber yaitu dari bantuan internasional seperti World Bank, ADB, IDB tetapi yang paling vital adalah pendanaan nasional negara yang disinkronisasikan dalam kerangka implementasi MPAC. Secara Umum MPAC dirumuskan untuk memenuhi tujuan utama yaitu meningkatkan ingerasi dan kooperasi di ASEAN, meningkatkan tingkat kompetitif ASEAN di level internasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN, mewujudkan good governance di ASEAN, meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat lokal, meningkatkan upaya untuk menanggulangi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan serta menghilangkan dampak negatif dari konektifitas. Sedangkan Secara khusus, MPAC diimplementasikan dalam tiga pilar utama yaitu konektifitas fisik yang mencakup transportasi, energi dan ICT; konektivitas institusi yang mencakup liberalisasi dan fasilitasi perdagangan-investasi, perjanjian dan prosedur regulasi lintas batas, transportasi intra regional serta peningkatan kapasitas masyarakat dan yang terakhir adalah konektifitas *people to*

people yang mencakup koneksi budaya, edukasi dan turisme(ASEAN,2015).

Gambar8.1. Visi dan Tujuan ASEAN Connectivity



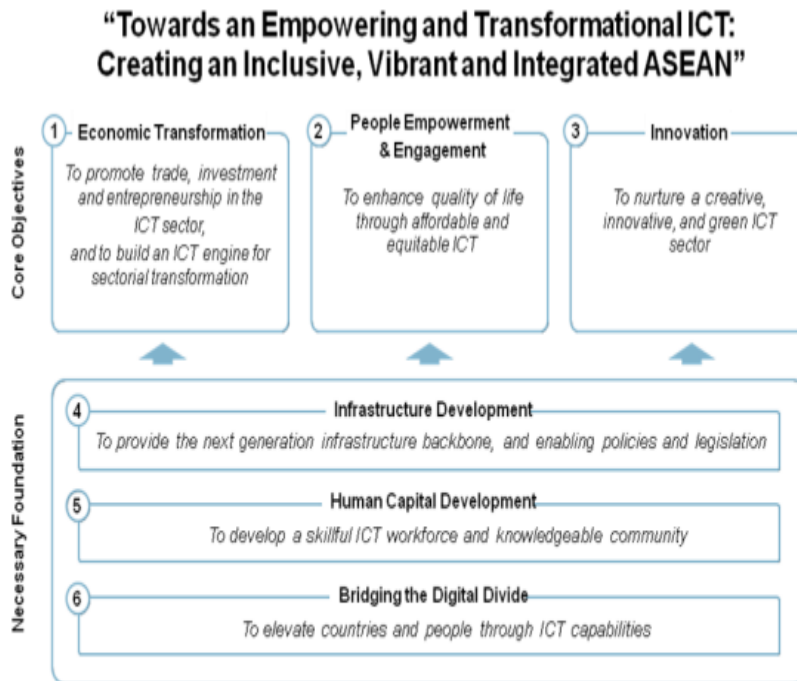
Source: Modified from Thailand's paper on "Possible Approaches towards Enhancing Regional Connectivity: A Preliminary View"

Salah satu aspek dari MPAC adalah peningkatan pembangunan infrastruktur dan jasa ICT di seluruh negara anggota ASEAN. Pembangunan infrastruktur dijalankan secara bersamaan dengan sumber daya manusia dan iklim regulasi yang baik untuk mengoptimalkan peran ICT sebagai mesin perdagangan dan pertumbuhan ekonomi serta pemerintahan yang lebih baik di ASEAN. Permasalahan Digital divide

adalah salah satu permasalahan yang harus diatasi oleh ASEAN jika ingin mewujudkan hal ini. Fakta menyatakan bahwa ada negara dengan reputasi global yang baik dalam hal infrastruktur, industri dan jasa ICT seperti Singapura, sedangkan di sisi lain masih terdapat negara yang menempati posisi sangat rendah dalam tingkat ketersediaan infrastruktur dan akses terhadap ICT seperti Myanmar dan Kamboja. Oleh karena itu tujuan utama dari aspek ICT dalam MPAC adalah untuk mengurangi bahkan menjembatani digital divide tersebut(ASEAN, 2015).

Terdapat tujuh poin aplikasi peningkatan infrastruktur ICT melalui MPAC. Yang pertama adalah pembuatan ASEAN Broadband Corridor. ASEAN Broadband Corridor memungkinkan terwujudnya koneksi internet yang setara di antara para anggota ASEAN. Yang kedua adalah promosi diversitas konektivitas internasional oleh negara anggota ASEAN pada tahun 2015. Yang ketiga, adalah pembuatan ASEAN Internet Exchange Network yang memfasilitasi aktivitas peering oleh para pengguna internet di negara ASEAN untuk mengurangi latency, meningkatkan kecepatan internet serta mengurangi harga internet pada 2013. Yang keempat adalah promosi integritas jaringan dan keamanan informasi, proteksi data serta computer emergency response team melalui kooperasi antar negara. Selain itu juga untuk mewujudkan standar minimum untuk menjaga tingkat kesiapan dan integritas jaringan di ASEAN pada 2015. Yang kelima memprioritaskan dan mengawasi perwujudan kapabilitas infrastruktur internet pada sekolah-sekolah di negara ASEAN pada 2015. Dan yang keenam adalah mengkaji kemungkinan perwujudan ASEAN Single Telecommunication Market paska 2015 dalam konteks menjamin kemudahan arus produk, jasa, investasi dan tenaga kerja terlatih paska 2015(ASEAN, 2015).

Gambar 8.2. Pilar dan Fondasi ASEAN ICT Masterplan 2015



Source: MPAC Industry Consultation at:

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=asean%20broadband%20corridor&source=web&cd=5&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.aseansec.org%2FTELMIN%2FQuestionnaire-ICT-2.doc&ei=2XBhT8GdMaOtiAL1aWzBA&usg=AFQjCNH0j9ShVKEbhZVO8iXw8p-w_dhLcw&cad=rja

Dalam implementasinya, AIM 2015 dapat dibagi menjadi dua pilar utama yaitu transformasi ekonomi masyarakat ASEAN untuk mewujudkan kesiapan ICT dan pembangunan baik aspek fisik maupun non-fisik dalam ASEAN. Aspek transformasi ekonomi diwujudkan dengan tiga langkah yaitu yang pertama adalah penciptaan kondisi yang kondusif agar bisnis dapat memberikan dampak positif dalam ICT. Hal ini dicapai melalui harmonisasi praktek dan standar regulasi ICT oleh negara di ASEAN serta membuat model paling efektif untuk mendorong

kerjasama antara pemerintah dan sektor privat dalam bisnis ICT(IIC ASIA FORUM, 2012).

Yang kedua adalah mewujudkan kemudahan dan keamanan aksesibilitas terhadap produk ICT kepada seluruh masyarakat. Hal ini dicapai melalui promosi jaringan broadband intra kawasan, penyamaan standar teknis dalam produk ICT menggunakan bahasa Inggris, mengadopsi standar yang sama untuk meningkatkan efisiensi industri ICT, perwujudan e-service bagi masyarakat, serta penciptaan mekanisme pengamanan ICT yang dimulai dari peningkatan kesadaran hingga adanya standar khusus kawasan(IIC ASIA FORUM, 2012)..

Yang ketiga adalah membuat dan meningkatkan inovasi, riset, pengembangan serta keberlanjutan produk dan jasa ICT. Hal ini dicapai melalui perwujudan code of ethics dalam riset dan pengembang teknologi, meningkatkan transfer teknologi antar negara ASEAN, pemberian insentif dan bantuan terhadap upaya riset dan pengembangan teknologi ICT serta mempromosikan akses terhadap internet agar anak-anak di ASEAN dapat terus terkoneksi dan terhubung antar satu dengan yang lainnya(IIC ASIA FORUM, 2012)..

Aspek pembangunan fisik dan non-fisik sumber daya ICT di ASEAN diwujudkan melalui tiga langkah yaitu yang pertama adalah pembangunan infrastruktur yang mencakup peningkatan konektifitas internet antara negara ASEAN melalui perusahaan internet broadband kawasan dengan memetakan dan optimalisasi jalur koneksi antar negara melalui ASEAN *Broadband Corridor* serta melalui ASEAN *Internet Exchange Network*. Selain itu juga dilakukan perwujudan dan pencarian model efektif pengamanan data dan infrastruktur ICT di ASEAN salah satunya melalui ASEAN Network Security Action Council. Yang kedua

adalah pembangunan sumber daya manusia yang diwujudkan melalui penyempurnaan data mengenai tenaga ahli dan inovasi ICT, membuat beasiswa dan bantuan guna mengapresiasi riset dan pengembangan ICT, pengembangan standar sertifikasi ICT kawasan serta mendorong tingkat kompetisi pengembangan ICT di kawasan. Yang ketiga adalah meningkatkan upaya menjembatani digital divide melalui tambahan kurikulum ICT di sekolah, mendorong kolaborasi antara sektor ICT dan pendidikan untuk mewujudkan akses internet di sekolah di seluruh ASEAN, peningkatan kolaborasi baik dalam bentuk pertukaran siswa ataupun guru intra ASEAN, mendorong kampanye internet positif, memfasilitasi akses masyarakat terhadap ICT, serta menganalisis gap dalam setiap sektor dan memberikan solusi yang tepat dalam konteks ICT dan digital divide(IIC ASIA FORUM, 2012).

Dari penjabaran diatas dapat dicapai kesimpulan bahwa Master Plan on ASEAN Connectivity(MPAC) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh ASEAN untuk mengurangi digital divide. Perwujudan MPAC ini merupakan salah satu model multilateral-holistik dalam pengentasan digital divide. Aspek multilateral menjadi penting dikarenakan upaya-upaya bilateral cenderung tidak efektif dalam penanganan digital divide. Selain itu adanya fungsi pengawasan dan kekuatan institusi dalam organisasi multilateral juga menjadi faktor pendorong lain implementasi MPAC. Dalam konteks ASEAN MPAC menjadi vital dalam keberlanjutan integrasi kawasan. Salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan integrasi tersebut paling awal adalah dengan mengurangi tingkat disparitas baik itu disparitas ekonomi, sosial-budaya atau teknologi. Keberadaan semangat ASEAN ways dan semangat kooperatif dan *mutual recognition* menjadikan MPAC sebagai

model yang tepat untuk memberikan respon umum atas digital divide di kawasan. Tetapi dorongan di level multilateral dan adanya prinsip kooperasi tidak lantas menjamin berkurangnya digital divide. Oleh karena itu aspek holistik kemudian menjadi salah satu penjelas MPAC yang lain. MPAC secara langsung berbicara mengenai konektivitas dalam artian umum. Konektivitas yang berbicara dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Hal ini sejalan dengan permasalahan digital divide yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi tetapi juga berkaitan dengan aspek lain yang bersinggungan seperti ekonomi, sosial, budaya hingga hubungan personal. MPAC secara jelas berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Upaya-upaya dan operasionalisasi yang ada dalam MPAC jika diwujudkan secara maksimal akan secara simultan memajukan ekonomi yang akan berujung pada berkurangnya digital divide serta mengurangi digital divide yang secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kohesivitas kawasan.

Referensi

- Archibugi, Danielle & Carlo Pietrobelli. 2002. *The Globalisation of Technology and its Implications for Developing Countries : Windows of opportunity or further burden? Dalam Technology Forecasting and Social Change : University of Rome*
- ASEAN. 2009. "Master Plan on ASEAN Connectivity". Cha-am Hua Hin, Thailand : 24 October 2009
- DiMaggio, Paul et.al. . 2001. "From Unequal Access to Differentiated Use: A Literature Review and Agenda for Research on Digital Inequality" Report prepared for the Russell Sage Foundation.
- Drahos, Peter dan J. Braithwaite. 2002. "On the Importance of the Publicness of Knowledge", dalam *Information Feudalism: Who*

- Owens the Knowledge Economy, New York: New Press, pp. 210-219
- Fazilharudean, Tengku Mohamed. 2005. "Digital Divide In Malaysia: Examining The Issues Of Income, Workplace And Geographical Difference In Diffusing Ict To The Mass Public" [Online] dalam <https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2949/3/Honbun-3972.pdf>
- Guillén, Mauro F. & Sandra L. Suárez. "Explaining the Global Digital Divide: Economic, Political and Sociological Drivers of CrossNational Internet Use" *Social Forces*, Vol. 84, No. 2 (Dec., 2005), pp. 681-708 [Online] dalam <http://www.jstor.org/stable/3598474>
- Hongladarom, Soraj. .nd. "Cultural Politics of the Digital Divide in Thailand" Department of Philosophy, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
- IIC Asia Forum. 2012 "ASEAN ICT Masterplan 2015". Singapore : 3rd April 2012
- Kemp, Simon. 2015. "Digital, Social and Mobile 2015".We Are Social [Online] dalam <http://s3.amazonaws.com/pptdownload/wearesocialsguidetodigitalsocialandmobilein2015v01-150120180554-conversion-gate01.pdf>
- Keniston, Kenneth & Deepak Kumar. 2003. "The Four Digital Divides". Delhi : Sage Publications [Online] dalam http://web.mit.edu/people/kken/PDF/Intro_Sage_1_.pdf
- Lim, S. S. and Tan, Y. L. 2003." Old People And New Media In Wired Societies: Exploring The Socio-Digital Divide In Singapore", *Media Asia*, 30(2) : 95 - 102
- Noll, Roger G. Et.al. .nd. "The Digital Divide: Definitions, Measurement, And Policy Issues". [Online] dalam <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.197.9007&rep=rep1&type=pdf>
- OECD. 2001. Understanding Digital Divide. Paris : OECD Publication
- Parayil, Govindan. 2007." The Digital Divide and Increasing Returns: Contradictions of Informational Capitalism". *The Information Society: An International Journal*, 21:1, 41-51 [Online] dalam <http://dx.doi.org/10.1080/01972240590895900>

- Parayil, Govindan & K. J. Joseph. 2008.” Can Trade Liberalisation Bridge the Digital Divide? Assessing the Information Technology Agreement” *Economic and Political Weekly*, Vol. 43, No. 1 (Jan. 5 - 11, 2008), pp. 46-53 [Online] dalam <http://www.jstor.org/stable/40276444>
- Phissamay, Phonpasit. 2015. “Digital Inclusion in Laos”. *Asia-Pacific Regional Forum on Universal Access and Service and Broadband Development 2015*, Bangkok, Thailand.
- Sharma, Ravi & Intan Azura Mokhtar. 2005.” Bridging the Digital Divide in Asia” *International Journal Of Technology, Knowledge And Society*, Volume 1, Number 3, 2005/2006 [Online] dalam <http://ssrn.com/abstract=1137850>
- Sridhar, Kala Seetharam & Varadharajan Sridhar. 2006. “Telecommunications and Growth: Causal Model, Quantitative and Qualitative Evidence” *Economic and Political Weekly*, Vol. 41, No. 25 (Jun. 24-29, 2006), pp. 2611-2619 [Online] dalam <http://www.jstor.org/stable/4418381>
- Valadez, James R. & Richard Duran. 2007. “Redefining the Digital Divide: Beyond Access to Computers and the Internet”. *The High School Journal*, Vol. 90, No. 3 (Feb. - Mar., 2007), pp. 31-44 [Online] dalam <http://www.jstor.org/stable/40364198>
- World Economic Forum. 2015. “The Global Information Technology Report 2015 : ICTs for Inclusive Growth”. WEF Insight Report. Geneva: WEF
- Ya’u, Y.Z. 2004. “The New Imperialism & Africa in the Global Electronic Village”. *Review of African Political Economy*, Vol. 31, No. 99, ICTs 'Virtual Colonisation' & Political Economy (Mar., 2004), pp. 11-29 [Online] dalam <http://www.jstor.org/stable/4006937>

BAB IX

Epilog: Arti Penting Informasi dalam Dunia Era Kontemporer

Dari pemaparan di atas dapat terlihat bahwa revolusi informasi mencakup isu yang luas dan memiliki dampak masif dalam dinamika kehidupan manusia, utamanya dalam buku ini terkait dengan kajian hubungan internasional. Perubahan bentuk perang hingga wacana mengenai strategi menjadi isu-isu yang paling mengemuka dalam pembicaraan mengenai revolusi informasi. Selain itu, terdapat juga isu penyalahgunaan media serta ruang siber untuk kepentingan-kepentingan sepihak baik oleh negara maupun oleh aktor lain yang terlibat.

Salah satu contoh menarik mengenai hal tersebut dapat kita saksikan sekarang dalam dinamika keseharian. Misalkan ketika presiden Amerika Donald Trump lebih sering mengeluarkan komentar dan bahkan pernyataan kepresidenan melalui cuitan dalam akun media social twitternya. Hal ini merupakan fenomena baru yang tidak akan pernah kita jumpai atau bahkan tidak akan pernah kita bayangkan 50 tahun yang lalu. Fenomena ini memberikan dampak signifikan dalam pola interaksi aktor dalam hubungan internasional dikarenakan terdapat pengaburan dalam ukuran nyata dan kapabilitas ketika interaksi hanya terjadi dalam media social lebih lagi dalam dimensi siber. Kekuatan sebesar Amerika Serikat, sebuah institusi yang seringkali dirujuk sebagai hegemoni dan kiblat ekonomi dunia bahkan hingga sebagai pemimpin dunia dapat tereduksi legitimasinya menjadi hanya sepanjang 140 karakter cuitan seorang Donald Trump. Isu seperti ini lah yang masih dan akan terus terjadi dalam

dinamika revolusi informasi di masa depan. Kajian hubungan internasional harus membuka diri dan bersiap diri dalam menjelaskan fenomena-fenomena baru yang akan terus muncul di dimensi siber ini. Selain itu tidak hanya dibutuhkan telaah hubungan internasional namun juga dibutuhkan sebuah kajian strategis terhadap solusi dan aksi terbaik dalam setiap isu dan permasalahan yang muncul dalam ruang siber tersebut.

Oleh karena itu buku ini menjadi bagian kecil dari diskursus dan percakapan besar mengenai isu revolusi informasi dan hubungan internasional. Masih banyak sekali isu yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dicakup dalam buku ini. Namun diharapkan melalui sedikit yang kamin berikan setidaknya para pembaca dapat mengerti dinamika dasar kajian revolusi informasi dari perspektif hubungan internasional.